



LAPORAN AKHIR

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

KERJA SAMA

**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Penajam Paser Utara**

DENGAN

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Mulawarman**



2024



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik. LP2KD Kabupaten Penajam Paser Utara ini berisi informasi capaian kinerja, pelaksanaan, dan kendala Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara, upaya yang telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dan menjadi panduan pihak terkait lainnya. Sebagai bahan evaluasi dan masukan, LP2KD ini masih memerlukan beberapa penyempurnaan karena dalam penyusunannya mengalami beberapa hambatan terutama dari sisi penyajian data, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program OPD serta fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya BAPELITBANG Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah mendukung baik secara langsung atau tidak langsung, memberikan data, arahan, dan masukan selama masa penyelesaian dokumen. Harapan kami, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagai dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.

Penyusunan dokumen ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, meskipun telah dilakukan proses diskusi dengan *stakeholders* terkait dan proses editing penulisan dengan baik. Oleh karena itu, kami terbuka atas saran dan masukan untuk perbaikan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan *stakeholders* terkait lainnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Juni 2024

Tim Penyusun LP2M Unmul



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Penajam Paser Utara adalah laporan yang disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023. TKPKD Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tugas TKPKD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melakukan proses perencanaan, penganggaran serta mampu memantau dan mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

LP2KD ini memberikan gambaran mengenai capaian kondisi pembangunan pada berbagai sektor terkait, serta menginformasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target yang ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, LP2KD ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada *stakeholders* terkait dalam penanggulangan kemiskinan utamanya nanti pada jajaran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan di tahun 2023 maupun jangka menengah sesuai rencana aksi daerah (RAD) 2024 – 2028.

Secara umum kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara selama 3 tahun terakhir (2021-2023) sudah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 12.130 orang (7,61%) menjadi 11.142 orang (6,97%) dan kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan dari 3.341 orang pada tahun 2021 menjadi 762 orang atau 157 KK tahun 2023 sesuai hasil verifikasi dan validasi data P3KE dari desa/kelurahan. Terdapat 6 (enam) sektor pembangunan yang paling terkait dengan pengentasan kemiskinan yaitu konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan. Capaian indikator penanggulangan kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, secara umum, sudah baik karena berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Timur dan capaian nasional. Hal ini didukung oleh kondisi riil di lapangan, seperti penduduk miskin ekstrem berkurang signifikan sebesar 762 orang, cakupan jaminan kesehatan melalui PBI mencapai 99%, dan pengangguran terbuka terendah se-kab/kota dan sebesar 2,07%. Efektifitas penanggulangan kemiskinan tahun 2023 menunjukkan bahwa peningkatan APBD Kab PPU diikuti dengan penurunan angka kemiskinan demikian juga sebaliknya. Hal



RINGKASAN EKSEKUTIF

ini mengindikasikan perkembangan APBD cukup signifikan dalam mendukung tujuan pembangunan, khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan.

Namun demikian, Kabupaten Penajam Paser Utara masih memerlukan kebijakan, strategi dan program yang lebih tepat serta melakukan pendekatan dari segi sosial, ekonomi, dan budaya karena masyarakatnya masih perlu didorong untuk lebih produktif dan lebih partisipatif terhadap kebijakan dan program-program pemerintah. Selain itu, evaluasi terhadap kondisi di lapangan harus dilakukan dan dipastikan sesuai dengan data yang dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Data yang menunjukkan kondisi sebenarnya dan riil sangat berperan penting dalam penyusunan rencana aksi tahunan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Sebagai bahan evaluasi dan masukan, LP2KD ini masih memerlukan beberapa penyempurnaan karena dalam penyusunannya mengalami beberapa hambatan terutama dari segi ketersediaan data yang *update* dan akurat dan masih belum sinkron data kemiskinan menurut Kemenko PMK RI dengan data hasil verifikasi dan validasi P3KE tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, kendala teknis pada unit pendataan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program OPD/SKPD serta fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan LP2KD ini perlu ditingkatkan integrasi dan kompilasi data indikator di tiap OPD/SKPD terkait data *existing* dan partisipasi OPS/SKPD sesuai tugas dan fungsinya sebagai TKPKD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penajam, Juni 2024.

TKPKD Kabupaten Penajam Paser Utara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
TIM PENYUSUN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.2.1 Maksud.....	4
1.2.2 Tujuan.....	4
1.3 Dasar Hukum.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
2.1 Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	11
2.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.....	16
2.3 Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan.....	17
2.3.1 Monitoring dan Evaluasi Penggulangan Kemiskinan.....	17
2.3.2 Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	18
2.4 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.....	19
BAB III. CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN BELANJA untuk PENANGGULANGAN KEMISKINAN di Kab Penajam Paser Utara	
3.1 Kondisi Kemiskinan Umum Daerah.....	21
3.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0).....	22
3.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).....	23
3.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	25
3.2 Bidang Kemiskinan Konsumsi.....	30
3.2.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu.....	31
3.2.2 Analisis Posisi Relatif.....	35
3.2.3 Analisis Relativitas.....	39
3.2.4 Analisis Efektifitas.....	44
3.3 Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan.....	48
3.3.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu.....	49

3.3.2 Analisis Posisi Relatif.....	50
3.3.3 Analisis Relativitas.....	51
3.3.4 Analisis Efektifitas.....	53
3.3.5 Analisis Prioritas Bidang.....	54
3.4 Bidang Kesehatan.....	57
3.4.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu.....	58
3.4.2 Analisis Posisi Relatif.....	64
3.4.3 Analisis Relativitas.....	71
3.4.4 Analisis Efektifitas.....	75
3.5 Bidang Pendidikan.....	80
3.5.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu.....	81
3.5.2 Analisis Posisi Relatif.....	88
3.5.3 Analisis Relativitas Bidang Pendidikan.....	93
3.5.4 Analisis Efektivitas Indikator Bidang Pendidikan.....	97
3.5.5 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan.....	102
3.6 Bidang Infrastruktur Dasar.....	105
3.6.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Infrastruktur Dasar.....	105
3.6.2 Analisis Posisi Relatif Indikator Bidang Infrastruktur Dasar.....	107
3.6.3 Analisis Relativitas Bidang Infrastruktur Dasar.....	107
3.6.4 Analisis Efektifitas Bidang Infrastruktur Dasar.....	107
3.6.5 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar.....	108
3.7 Bidang Ketahanan Pangan.....	109
3.7.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Ketahanan Pangan.....	110
3.7.2 Analisis Posisi Relatif Bidang Ketahanan Pangan.....	114
3.7.3 Analisis Relativitas Bidang Ketahanan Pangan.....	115
3.7.4 Analisis Efektifitas Bidang Ketahanan Pangan.....	116
3.7.5 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan.....	118
3.8 Capaian Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan.....	119
3.9 Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan.....	131
3.9.1 Komposisi Pendapatan Daerah.....	131
3.9.2 Komposisi Belanja Daerah.....	132
3.10 Efektifitas Perkembangan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara..	133
3.11 Anggaran Belanja Bidang Kemiskinan.....	134
3.11.1 Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan.....	134
3.11.2 Anggaran Belanja Sektor Pendidikan.....	136
3.11.3 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan.....	137

3.11.4 Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar.....	139
3.11.5 Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan.....	142
BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH	
4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	144
4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan.....	145
4.3 Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.....	149
4.3.1 Program Pengurangan Beban Pengeluaran Rakyat.....	149
4.3.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat.....	150
4.3.3 Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan.....	150
4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	151
BAB V – RENCANA TINDAK LANJUT	
5.1 Pengurangan Beban Pengeluaran Rakyat.....	152
5.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat.....	154
5.3 Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan	155
BAB VI – PENUTUP	
6.1 Simpulan.....	157
6.2 Rekomendasi.....	159
DAFTAR PUSTAKA.....	161

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Angka Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022	23
Tabel 3.2	Indikator Penyusunan IPM Kab Penajam Paser Utara 2018- 2022	28
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Miskin Desil 1-3 Kabupaten Penajam Paser Utara	29
Tabel 3.4	Capaian Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan.....	120
Tabel 3.5	Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan Kab. PPU Tahun 2023...	134
Tabel 3.6	Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Kab. PPU Tahun 2023.....	136
Tabel 3.7	Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Kab. PPU Tahun 2023.....	138
Tabel 3.8	Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar Kab. PPU 2023.....	139
Tabel 3.9	Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan Kab. PPU Tahun 2023.....	142
Tabel 4.1	Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Revisi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab Penajam Paser Utara Tahun 2022.....	13
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Sebelum Revisi Tim Koordiasi Penganggulangan Kemiskinan Kab Penajam Paser Utara Tahun 2022.....	14
Gambar 3.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2018 – 2022.....	24
Gambar 3.2	Indeks Gini Kab Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022.....	26
Gambar 3.3	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 – 2022.....	27
Gambar 3.4	Sebaran Penduduk Miskin Desil 1 Menurut P3KE Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.....	30
Gambar 3.5	Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan (%) Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	32
Gambar 3.6	Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	33
Gambar 3.7	Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	34
Gambar 3.8	Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kab. PPU 2023.....	36
Gambar 3.9	Analisis Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kab. PPU Tahun 2023.....	37
Gambar 3.10	Analisis Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. PPU Tahun 2023.....	38
Gambar 3.11	Analisis Relativitas Tingkat Kemiskinan (%) Kab.PPU Tahun 2015-2023.....	39
Gambar 3.12	Analisis Relativitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	41
Gambar 3.13	Analisis Relativitas Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	43
Gambar 3.14	Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%) Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	44
Gambar 3.15	Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. PPU Tahun 2015-2020.....	46
Gambar 3.16	Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	47
Gambar 3.17	Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. PPU Tahun 2015–2023.....	49
Gambar 3.18	Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. PPU Tahun 2023.....	51

Gambar 3.19 Analisis Relativitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	52
Gambar 3.20 Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	54
Gambar 3.21 Analisis Prioritas Bidang Ketenagakerjaan Kab. PPU Tahun 2015–2023.....	55
Gambar 3.22 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. PPU Tahun 2021-2022.....	59
Gambar 3.23 Analisis Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Balita Gizi Kurang (Kasus) Kab. PPU Tahun 2018-2023.....	60
Gambar 3.24 Analisis Perkembangan Antar Waktu Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	61
Gambar 3.25 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidan per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2018-2023.....	62
Gambar 3.26 Analisis Perkembangan Antar Waktu Dokter Per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	63
Gambar 3.27 Analisis Posisi Relatif Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 KH Kab. PPU Tahun 2020.....	64
Gambar 3.28 Analisis Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Kab. PPU Tahun 2022.....	65
Gambar 3.29 Analisis Posisi Relatif Prevalensi Balita Gizi Kurang (Kasus) Kab. PPU Tahun 2023.....	67
Gambar 3.30 Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. PPU Tahun 2023.....	68
Gambar 3.31 Analisis Posisi Relatif Bidan Per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2023.....	69
Gambar 3.32 Analisis Posisi Relatif Dokter Per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2023.....	70
Gambar 3.33 Analisis Relativitas Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	71
Gambar 3.34 Analisis Relativitas Balita Gizi Kurang (Kasus) Kab. PPU Tahun 2002-2020.....	72
Gambar 3.35 Analisis Relativitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	73
Gambar 3.36 Analisis Relativitas Bidan Per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	74
Gambar 3.37 Analisis Relativitas Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	75
Gambar 3.38 Analisis Efektifitas Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	76

Gambar 3.39 Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Gizi Kurang (Kasus) Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	77
Gambar 3.40 Analisis Efektifitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	78
Gambar 3.41 Analisis Efektifitas Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	79
Gambar 3.42 Analisis Efektifitas Rasio Dokter per 1.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2014-2023.....	80
Gambar 3.43 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	82
Gambar 3.44 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/MTs kab. PPU Tahun 2015-2023.....	83
Gambar 3.45 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/MA (%) Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	83
Gambar 3.46 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	84
Gambar 3.47 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/MTs Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	85
Gambar 3.48 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	86
Gambar 3.49 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun Kab. PPU Tahun 2021-2023.....	87
Gambar 3.50 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Putus Sekolah Usia 13-15 Tahun Kab. PPU Tahun 2021-2023.....	87
Gambar 3.51 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Putus Sekolah Usia 16-18 Tahun Kab. PPU Tahun 2021-2023.....	88
Gambar 3.52 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kab. PPU Tahun 2022.....	89
Gambar 3.53 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs Kab. PPU Tahun 2022.....	90
Gambar 3.54 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2022.....	90
Gambar 3.55 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kab. PPU Tahun 2022.....	92
Gambar 3.56 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs Kab. PPU Tahun 2022.....	92
Gambar 3.57 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2022.....	93
Gambar 3.58 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	94

Gambar 3.59 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	94
Gambar 3.60 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	95
Gambar 3.61 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	96
Gambar 3.62 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	96
Gambar 3.63 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/ MA Kab. PPU Tahun 2020-2022.	97
Gambar 3.64 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	98
Gambar 3.65 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	98
Gambar 3.66 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	99
Gambar 3.67 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	99
Gambar 3.68 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	100
Gambar 3.69 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2020-2022.....	100
Gambar 3.70 Analisis Efektivitas Jumlah Putus Sekolah Usia 7-12 tahun Kab. PPU Tahun 2021-2023.....	101
Gambar 3.71 Analisis Efektivitas Jumlah Putus Sekolah Usia 13-15 Tahun Kab. PPU Tahun 2021-2023.....	101
Gambar 3.72 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan (APK terhadap Tingkat Kemiskinan) Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	102
Gambar 3.73 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan (APM terhadap Tingkat Kemiskinan) Kab. PPU Tahun 2015-2023.....	103
Gambar 3.74 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan (Jumlah Putus Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan) Kab. PPU Tahun 2015–2023.....	104
Gambar 3.75 Analisis Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kab. PPU Tahun 2020-2023.....	106
Gambar 3.76 Analisis Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kab. PPU Tahun 2020-2023.....	106
Gambar 3.77 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kab. PPU Tahun 2020-2023.....	107
Gambar 3.78 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Kab. PPU Tahun 2020-2023.....	108

Gambar 3.79 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar Kab. PPU Tahun 2020-2023.....	109
Gambar 3.80 Analisis Perkembangan Antar Waktu Harga Beras (Rp) Kab. PPU Tahun 2018-2023.....	110
Gambar 3.81 Analisis Perkembangan Antar Waktu Harga Kebutuhan Pokok Utama Kab. PPU Tahun 2018-2023.....	111
Gambar 3.82 Analisis Perkembangan Antar Waktu Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton) Kab. PPU Tahun 2018-2023.....	112
Gambar 3.83 Analisis Perkembangan Antar Waktu Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023.....	114
Gambar 3.84 Analisis Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. PPU Tahun 2023.....	115
Gambar 3.85 Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023.....	116
Gambar 3.86 Analisis Efektivitas Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton) Kab. PPU Tahun 2018 - 2023.....	117
Gambar 3.87 Analisis Efektivitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023.....	118
Gambar 3.88 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan Kab. PPU Tahun 2018 - 2023.....	119
Gambar 3.89 86 Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah Kab. PPU Tahun 2019 - 2023.....	132
Gambar 3.90 Distribusi Belanja Kab. PPU dalam Program Kemiskinan Tahun 2023	133
Gambar 3.91 Efektivitas Perkembangan APBD terhadap Tingkat kemiskinan Kab. PPU Tahun 2019 - 2023.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *sustainable development goals* (SDGs) nasional menjadi program penting bagi pemerintah, baik pusat dan daerah (Peraturan Presiden No 59, 2017). Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada kemiskinan (*no poverty*). Tidak ada kemiskinan (*no poverty*) menjadi tujuan ke-1 SDGs (UN, 2016) karena kemiskinan menjadi masalah semua negara. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan (*poverty*) merupakan permasalahan mendasar yang sejak dahulu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan harus ditangani melalui implementasi langkah-langkah penanggulangan dengan pendekatan yang terarah, sistematis, dan masif. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Besarnya dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, menjadikan masalah tersebut sebagai isu global. Target TPB/SDGs terdiri dari 169 target, salah satu target adalah pengentasan kemiskinan. Begitu pentingnya masalah kemiskinan di seluruh dunia sehingga penanggulangannya menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh berbagai negara baik oleh lembaga pemerintahan, dunia usaha, LSM, serta berbagai pihak terkait lainnya. Untuk itu, penanganan kemiskinan harus multisektoral.

Penanganan yang melibatkan *stakeholders* dari berbagai pihak inilah yang menjadi alasan utama dibentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sejak 2010, yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan para menteri lintas sektor



sebagai anggotanya. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri baik melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, ekonomi, dan politik, oleh pemangku kepentingan.

Perbaiki tata pemerintahan melalui partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik yang inklusi akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan adalah kunci keberhasilan bagi masyarakat miskin untuk melepaskan diri dari kondisi tidak berdaya karena kemiskinan. Intervensi pemerintah melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya nyata implementasi *theory of change* (ToC). Kebijakan melalui program dan kegiatan rencana aksi daerah (RAD) untuk jangka menengah maupun rencana aksi tahunan (RAT). Intervensi program dan kegiatan penurunan angka kemiskinan ini tentunya sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab PPU) menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) pada tahun 2021 sebesar 7,61% atau 12.310 jiwa. Jumlah penduduk miskin tahun 2022 dan 2023 sebesar 7,25% atau 11.590 jiwa. Adapun target jumlah penduduk miskin sesuai dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab PPU 2024 - 2026 bahwa penduduk miskin tahun 2024 sebesar 6,76%, tahun 2025



sebesar 6,75%, dan tahun 2026 sebesar 6,62%. Hal ini menuntut adanya inovasi dan strategi yang relevan sesuai kondisi perkembangan masyarakat, pertumbuhan penduduk, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di Kab PPU. Dukungan data jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem menjadi sumber informasi utama dalam intervensi program dan kegiatan tahun 2023 yang dilaporkan pada dokumen ini.

Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini menegaskan bahwa perbaikan tata pemerintahan dan perluasan partisipasi harus menjadi bagian dari setiap kebijakan yang dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan taraf dan mutu hidup masyarakat miskin. Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan. Kondisi ini menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Tujuannya tentu saja adalah perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merujuk pada kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Peraturan ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Bupati Penajam Paser



Utara dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten dengan Keputusan Bupati No 415/238/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 415.05/99/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022.

Salah satu tugas TKPK adalah menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang berisi keberhasilan dan permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk itu, LP2KD ini adalah sebagai bentuk penyampaian informasi capaian pelaksanaan, keberhasilan, dan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan Tahun Anggaran 2023. LP2KD Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun dalam rangka menjalankan amanat dari Permendagri 53 Tahun 2020 yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Maksud Dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini adalah tersusunnya dokumen yang mampu memberikan informasi terhadap hasil pelaksanaan, capaian keberhasilan, dan kendala program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



- 1) Mengidentifikasi kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023;
- 2) Mengidentifikasi capaian program dan ketersediaan anggaran penanggulangan kemiskinan di Tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2024-2028 adalah:

- 1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;



- 9) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 13) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
- 14) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- 17) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi



Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);

- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 2);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018–2023;
- 23) Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2024-2026;
- 24) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor No 415/238/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 415.05/99/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud Dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 2.1. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)



- 2.2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- 2.3. Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan
 - 2.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penggulungan Kemiskinan
 - 2.3.2. Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 2.4 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

BAB III. CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN BELANJA untuk PENANGGULANGAN KEMISKINAN di Kab Penajam Paser Utara

- 3.1. Kondisi Kemiskinan Umum Daerah
 - 3.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0)
 - 3.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
 - 3.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
- 3.2 Bidang Kemiskinan Konsumsi
 - 3.2.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu
 - 3.2.2 Analisis Posisi Relatif
 - 3.2.3 Analisis Relativitas
 - 3.2.4 Analisis Efektifitas
- 3.3 Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan
 - 3.3.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu
 - 3.3.2 Analisis Posisi Relatif
 - 3.3.3 Analisis Analisis Relativitas
 - 3.3.4 Analisis Efektifitas
 - 3.3.5 Analisis Prioritas Bidang Ketenagakerjaan
- 3.4 Bidang Kesehatan
 - 3.4.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu
 - 3.4.2 Analisis Posisi Relatif
 - 3.4.3 Analisis Relativitas
 - 3.4.4 Analisis Efektifitas
- 3.5 Bidang Pendidikan
 - 3.5.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu
 - 3.5.2 Analisis Posisi Relatif
 - 3.5.3 Analisis Relativitas Bidang Pendidikan



- 3.5.4 Analisis Efektivitas Indikator Bidang Pendidikan
- 3.5.5 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan
- 3.6 Bidang Infrastruktur Dasar
 - 3.6.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Infrastruktur Dasar
 - 3.6.2 Analisis Posisi Relatif Indikator Bidang Infrastruktur Dasar
 - 3.6.3 Analisis Relativitas Bidang Infrastruktur Dasar
 - 3.6.4 Analisis Efektifitas Bidang Infrastruktur Dasar
 - 3.6.5 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar
- 3.7 Bidang Ketahanan Pangan
 - 3.7.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Ketahanan Pangan
 - 3.7.2 Analisis Posisi Relatif Bidang Ketahanan Pangan
 - 3.7.3 Analisis Efektivitas Bidang Ketahanan Pangan
 - 3.7.4 Analisis Relativitas Bidang Ketahanan Pangan
 - 3.7.5 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan
- 3.8. Capaian Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
- 3.9. Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan
 - 3.9.1. Komposisi Pendapatan Daerah
 - 3.9.2. Komposisi Belanja Daerah
- 3.10. Efektifitas Perkembangan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara
- 3.11 Anggaran Belanja Bidang Kemiskinan
 - 3.11.1 Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan
 - 3.11.2 Anggaran Belanja Sektor Pendidikan
 - 3.11.3 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan
 - 3.11.4 Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar
 - 3.11.5 Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan

BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

- 4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- 4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan
- 4.3 Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
 - 4.3.1 Program Pengurangan Beban Pengeluaran Rakyat
 - 4.3.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat



- 4.3.3 Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan
- 4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat

BAB V – RENCANA TINDAK LANJUT

- 5.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Rakyat
- 5.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
- 5.3. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

BAB VI – PENUTUP

- 6.1. Simpulan
- 6.2. Rekomendasi



BAB II

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara (TKPK Kab PPU) dibentuk sesuai Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor No. 415/238/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 415.05/99/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022. TKPK Kab PPU yang memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kelembagaan TKPK Kab PPU ditujukan untuk menjaga kebijakan program dan kegiatan konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara Kementerian/Lembaga dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan. Intervensi kebijakan melalui program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dalam mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Peran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sangat diperlukan dalam penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan



dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Kelembagaan TKPK Kab PPU di bawah tanggung jawab Pj Bupati Penajam Paser Utara terlihat pada Gambar 2.1 berikut:

- a. Ketua: Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Wakil Ketua: Sekretaris Daerah.
- c. Sekretaris: Kepala Bapelitbang.
- d. Anggota: terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

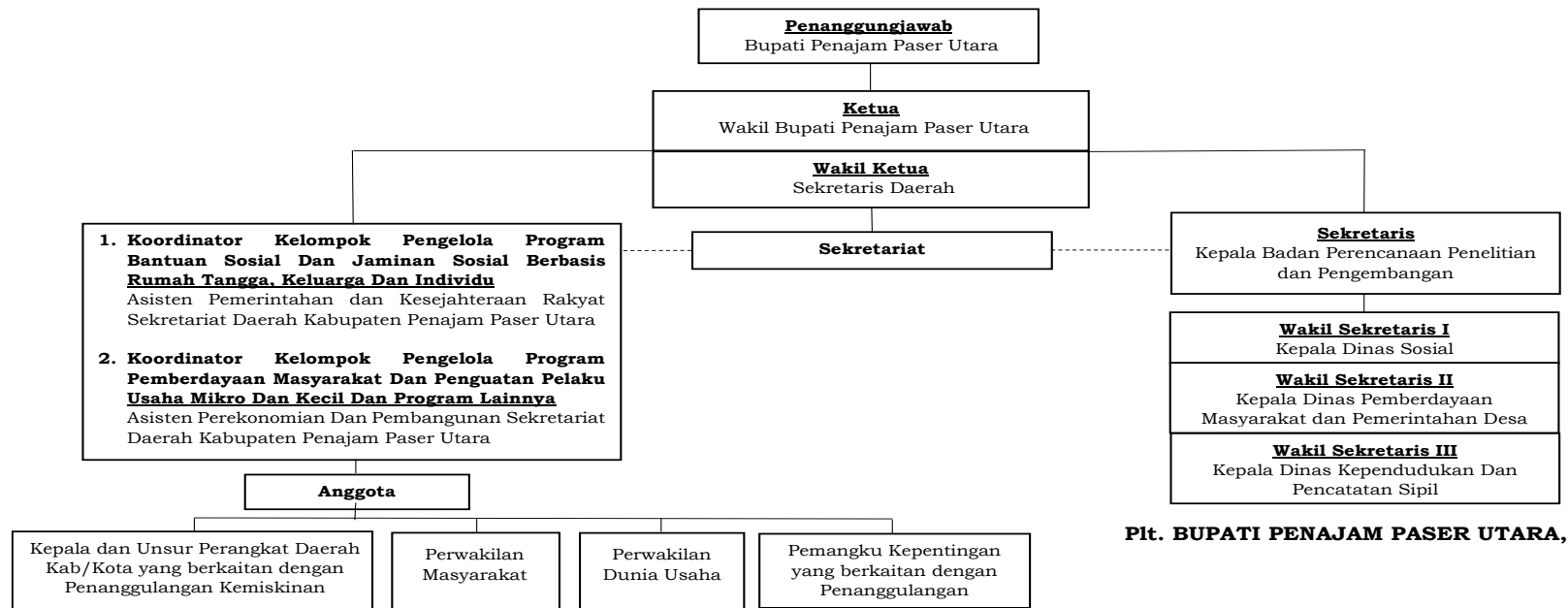
Fungsi TKPK Kab PPU untuk melakukan: a) penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten; b) koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten Penajam Paser Utara di bidang Penanggulangan Kemiskinan; c) koordinasi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan; d) fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan; e) penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; f) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Kelembagaan TKPK Kab PPU sangat penting dalam melakukan sinergi untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan yang bersifat multidimensi ini tidak terbatas pada segi materi saja, tetapi juga terkait sisi etika, prilaku, moralitas, dan karakter masyarakat. Hal ini tentunya semakin menambah kompleks masalah kemiskinan, sehingga penanganan tidak hanya dari satu sisi saja tetapi simultan dengan aspek terkait lainnya. Selain itu, permasalahan kemiskinan yang bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kab PPU saja telah diwadahi TKPK dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan sebagai anggota



LAMPIRAN IV : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 415/238/2022
TANGGAL : 20 OKTOBER 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022



Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

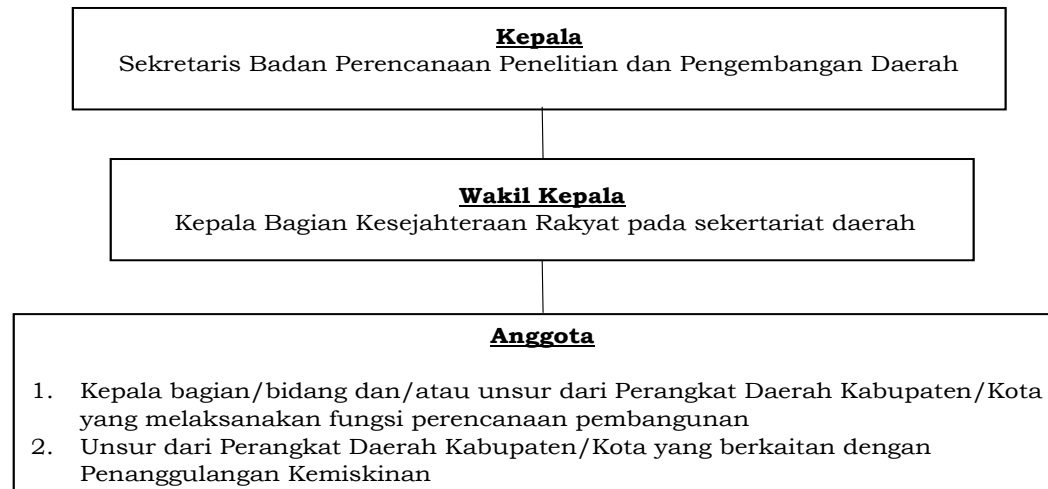
HAMDAM

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Revisi
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022



LAMPIRAN V : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 415/238/2022
TANGGAL : 20 OKTOBER 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022



Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sebelum Revisi
Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022

HAMDAM



Gambar 2.2 menunjukkan struktur organisasi Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kab PPU) Tahun 2022. Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

- 1) Memberi dukungan administrasi teknis;
- 2) Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 3) Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan;
- 4) Menyiapkan bahan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD); dan
- 5) Memberikan dukungan bahan kebijakan, yang bertanggung jawab kepada Ketua TKPK.

Tugas TKPK Kab PPU dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas:

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; dan
- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil dan program lainnya yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan serta meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin



2.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor policy*). Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang juga berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor development*), dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor growth*). Dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah membuat kelompok-kelompok yang memudahkan memberikan bantuan kepada masyarakat. Secara operasional arah penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan dalam empat kelompok program yaitu:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan: pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kelompok masyarakat miskin yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat. Tujuan program ini untuk memperkuat kapasitas untuk terlibat dalam prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro maupun kecil; dan
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Contohnya, program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni. Selain itu, pembangunan/perbaikan akses jalan merupakan upaya pemerintah



untuk meningkatkan, mempermudah, dan memperlancar akses kegiatan ekonomi masyarakat miskin.

2.3. Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

Pengendalian penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

2.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penggulangan Kemiskinan

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk melihat pelaksanaan dan pencapaian program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu juga, untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, pengembangan diversifikasi usaha keluarga miskin, efektivitas program pengembangan ekonomi produktif, perluasan kesempatan kerja bagi warga miskin, serta pola pemanfaatan program pengentasan kemiskinan. Sehingga, program strategis dan langkah-langkah pembinaan yang terpadu, berkesinambungan dan bersifat kontekstual disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian juga intervensi melalui kebijakan dan program pembangunan sosial di berbagai sektor telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat guna menanggulangi atau mengurangi angka kemiskinan.

Salah satu fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan penanggulangan kemiskinan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemantauan yang dilakukan oleh OPD diharapkan memperoleh informasi realisasi capaian kinerja dan target kinerja, penyerapan anggaran kemiskinan, dan



kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap program. Langkah kebijakan yang mungkin dapat diambil agar kemiskinan dapat dikurangi yaitu dengan cara: 1) menciptakan kesempatan kerja dan peluang kerja bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang mempunyai keahlian tertentu; 2) memberdayakan masyarakat miskin dengan upaya memberikan pelatihan kewirausahaan dan memberikan stimulus bantuan modal; dan 3). memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dengan memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk Jamkesda, atau sebagai Penerima Bantuan Iuran/Daerah (PBI/D) untuk masyarakat miskin.

2.3.2. Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

Layanan pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk layanan yang wajib disediakan pemerintah kepada masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengaduan masyarakat juga menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga masyarakat merasa semakin puas terhadap layanan pemerintah dan dapat meminimalisir keluhan masyarakat. Pemerintah Pusat melalui Kemenpan-RB, Kementerian Kominfo, Kantor Staf Presiden dan Ombudsmen RI sejak tahun 2015 telah membuka Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berupa Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Kab PPU bisa melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS), *Call Center* 112. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhannya tentang apa saja untuk diteruskan kepada pihak terkait. Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, masyarakat Kab PPU dapat melakukan koordinasi melalui



perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan berbagai upaya dalam penanganan kemiskinan kepada OPD terkait. Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi dapat disampaikan baik secara langsung maupun tertulis dengan metode penanganan masalah dilakukan secara hierarki maupun birokrasi. Pengaduan disamping secara online juga melalui aplikasi LAPOR, pengaduan ini dapat disampaikan secara langsung.

Dalam penanganan pengaduan masyarakat di Kab PPU telah dilakukan Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola dan Pengaduan dan Pejabat Penghubung pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 555.6/50/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola dan Pengaduan dan Pejabat Penghubung pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.

2.4. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama oleh TKPK Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2023, anggaran belanja program penanggulangan kemiskinan (APBK) Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp. 55.690.645.312 dari total belanja tahun 2023 sebesar Rp. 1.386.765.313.629 (4,02%). Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab PPU dalam rangka



- advokasi program dan anggaran yang mendukung program nasional penanggulangan kemiskinan melalui program kegiatan daerah;
2. Kurangnya koordinasi TKPK dengan OPD pengelola program/kegiatan penanggulangan kemiskinan (ada 10 OPD). Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan peningkatan intensitas rapat dan koordinasi dengan 10 OPD tersebut;
 3. Adanya perbedaan data penduduk miskin yang ada di *database*, contohnya data kemiskinan dari Kemenko PMK RI, dengan data yang ada di RT/desa/kelurahan/kecamatan sehingga sedikit terkendala validasi data. Kondisi ini dapat menyebabkan tumpang tindih data sehingga penerima program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan mendorong RT/desa/kelurahan/kecamatan untuk melakukan musyawarah RT/desa/kelurahan/kecamatan untuk melakukan validasi data penduduk masing-masing RT/desa/kelurahan/kecamatan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

3.1. Kondisi Kemiskinan Daerah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dan tidak terkecuali di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tantangan untuk terus menekan dan menurunkan angka kemiskinan di daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap penurunan kemiskinan secara regional Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Kemiskinan adalah suatu kondisi individu atau rumah tangga yang sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan tergolong dalam masalah sosial karena dapat menimbulkan banyak permasalahan baru, seperti tindak kejahatan, penyimpangan sosial, dan ketimpangan di kalangan masyarakat.

Kemiskinan secara umum dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum sehingga dapat hidup layak. Kondisi kemiskinan masyarakat di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi demografi dan sosiologis. Faktor-faktor tersebut antara lain: tingkat pendidikan, budaya dan tradisi yang berlaku serta kondisi politik daerah setempat. Kondisi ini kemudian diukur dengan menggunakan berbagai indikator sebagai representasi dari program dan target penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan oleh Pemkab PPU. Adapun indikator tersebut meliputi bidang: konsumsi/kemiskinan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan.

Proses analisis selanjutnya dilakukan terhadap berbagai indikator tersebut untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan dari target yang telah ditetapkan. Beberapa analisis yang dilakukan antara lain:



perkembangan antar waktu, posisi relatif, relativitas, efektivitas. Proses analisis dilakukan dengan mengambil dan mengolah data sekunder yang bersumber dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kab PPU maupun data diperoleh langsung dari Pemerintah Kab. PPU dan OPD terkait. Oleh karena itu, proses dan hasil analisis ini sangat tergantung dari ketersediaan data yang diperoleh. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran riil kondisi yang terjadi saat ini di lapangan sehingga dapat digunakan untuk membantu Pemerintah Kab. PPU dalam mengambil kebijakan yang tepat pada periode berikutnya.

3.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0)

Angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara 5 (lima) tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2020–2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat, tahun 2020 meningkat sebesar 410 jiwa dan 2021 meningkat sebesar 200 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19 yang menyerang perekonomian negara dan individu di setiap negara. Peningkatan kemiskinan tahun 2021 lebih kecil 50% dibandingkan peningkatan pada tahun 2020. Menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut mengisyaratkan bahwa perekonomian masyarakat mulai ada perbaikan meskipun jumlah penduduk miskin tetap bertambah. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 turun 0,35% (130 jiwa) dibanding tahun 2021 dengan total penduduk miskin turun menjadi 12.000 jiwa. Penurunan ini semakin menegaskan bahwa sejak diberlakukannya pelonggaran kegiatan masyarakat akibat Pandemi COVID-19 serta upaya–upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Penurunan angka kemiskinan ini juga tidak terlepas dari adanya berbagai proyek–proyek padat karya tunai dan strategis nasional yang sedang



dikerjakan di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tabel 3.1 Angka Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018–2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2018	448.000	11.760	7,40
2019	466.918	11.520	7,18
2020	447.539	11.930	7,36
2021	513.666	12.130	7,61
2022	538.022	11.590	7,25

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022.

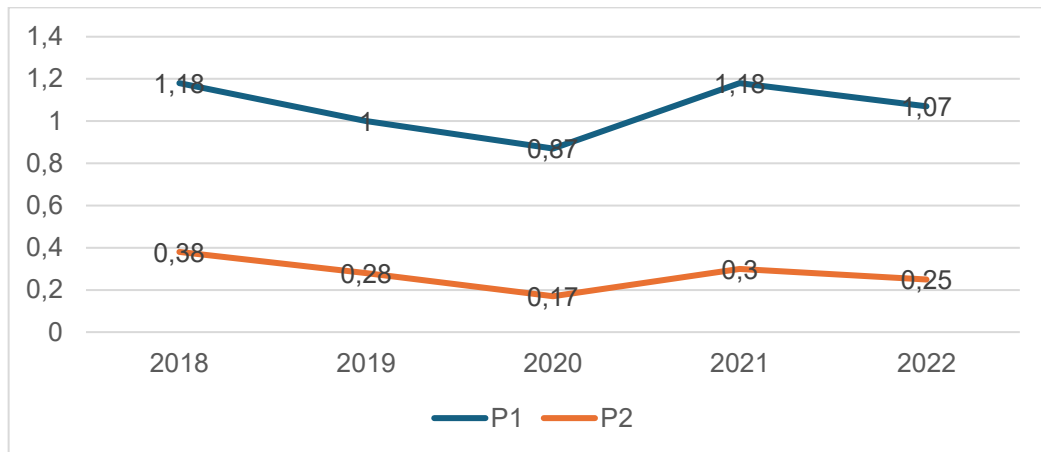
Angka kemiskinan suatu daerah dapat dilihat berdasarkan garis kemiskinannya. Garis kemiskinan merupakan cerminan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama sebulan. Jika seseorang tidak mampu memenuhi garis kemiskinan, maka individu tersebut dikatakan penduduk miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 meningkat sekitar Rp 25.000,- dibandingkan tahun 2021 menjadi Rp 538.022,-. Garis kemiskinan yang meningkat ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara minimal harus mengeluarkan Rp 538.022,- untuk memenuhi kebutuhan pokok termasuk kebutuhan pokok non-makanan. Meningkatnya garis kemiskinan dan menurunnya angka kemiskinan menandakan adanya peningkatan kemampuan masyarakat yang tergolong masyarakat miskin pada tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan pokok pada tahun 2022, sehingga mampu memenuhi batas bawah garis kemiskinan.

3.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Secara lebih spesifik, kondisi kemiskinan suatu daerah dapat dicermati dengan mengetahui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran tiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks



Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Gambar 3.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2018 – 2022.

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023.

Gambar 3.1 menunjukkan kondisi P1 Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 menurun menjadi 1,07. Penurunan kondisi P1 menandakan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin mengecil, artinya kemampuan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok semakin membaik walaupun masih di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, penurunan P1 menandakan bahwa adanya kondisi yang kian membaik dalam hal perekonomian masyarakat. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan diharapkan mampu untuk terus menekan kondisi P1 sehingga kondisi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga dapat semakin menurun. Penyerapan tenaga kerja lokal terhadap proyek-proyek pembangunan dan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan kondisi P1. Selain melalui penyerapan tenaga kerja lokal, konsumsi terhadap produk-produk UMKM, termasuk dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di



pasar. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi penurunan kondisi kemiskinan dari segi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

3.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

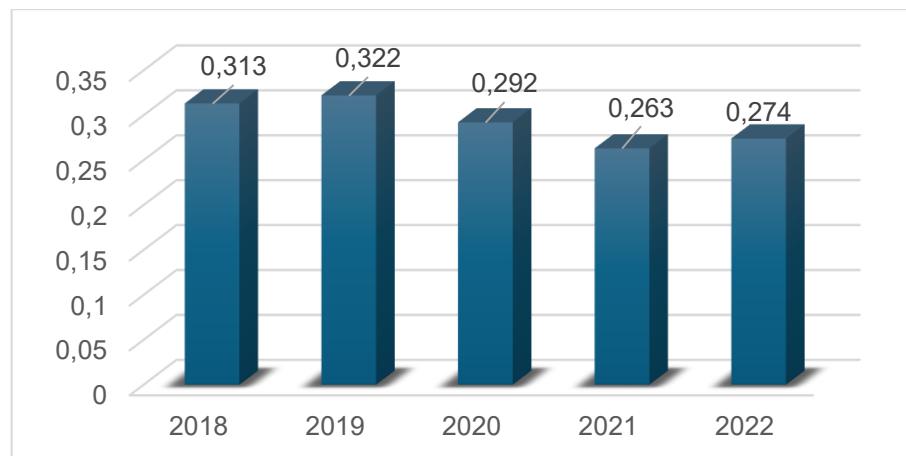
Selain melalui P1, kondisi kemiskinan suatu wilayah juga dapat ditinjau melalui kondisi P2. Kondisi P2 Kabupaten Penajam Paser Utara juga menurun seiring dengan menurunnya P1. Kondisi P2 Kabupaten Penajam Paser Utara menurun besar 0,05 dibandingkan tahun 2021 yaitu menjadi 0,25. Menurunnya P2 menandakan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga menurun, artinya pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2022 memiliki ketimpangan yang rendah. Turunnya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin ini disebabkan oleh adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk miskin walaupun masih di bawah garis kemiskinan. Perbaikan kondisi P2 ini perlu terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar ketimpangan ini terus menurun, sehingga kondisi keparahan kemiskinan tidak meninggi setiap tahunnya.

Pemerintah Pusat menetapkan target terkait kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 0% pada tahun 2024. Kemiskinan Ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar meliputi makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan namun juga akses pada layanan sosial.

Untuk mengetahui indikator ketimpangan pengeluaran secara keseluruhan di suatu wilayah juga dapat dipergunakan Indeks Gini. Indeks Gini juga dapat dipergunakan untuk mengetahui pemerataan pendapatan masyarakat. Indeks Gini berada dalam kisaran antara 0 – 1. Nilai Indeks Gini 0 menggambarkan pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama dan kemampuan pengeluaran yang sama. Nilai Indeks Gini 1 menggambarkan ketimpangan



yang sempurna, artinya satu orang dapat memiliki segalanya namun orang lainnya tidak memiliki apapun. Oleh karena itu, dalam hal pembangunan daerah bertujuan untuk mengecilkan nilai Indeks Gini atau mengecilkan ketimpangan kemampuan pengeluaran masyarakat sehingga ketimpangan sosial dapat lebih kecil dari tahun ke tahun. Indeks Gini di Kabupaten Penajam Paser Utara digambarkan berikut ini:



Gambar 3. 2 Indeks Gini Kab Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022

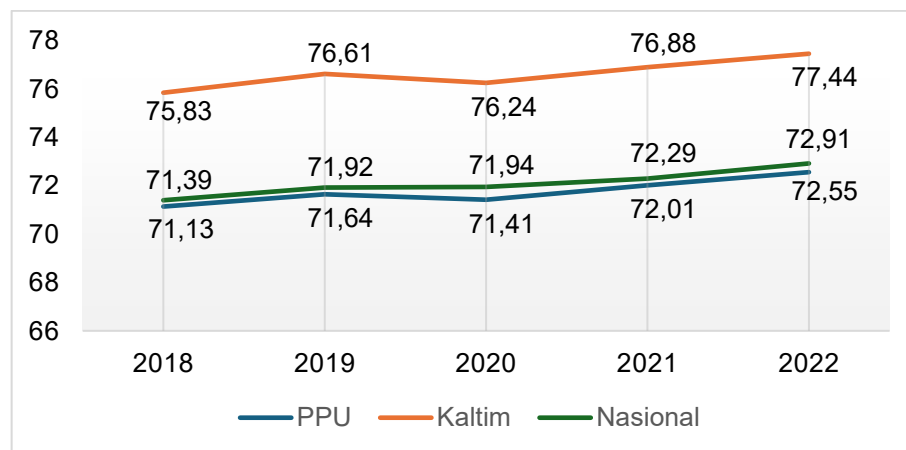
Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023.

Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara terus menurun sejak tahun 2020 – 2022. Kondisi terakhir pada tahun 2022, Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,274. Penurunan Indeks Gini ini menggambarkan adanya keberhasilan dalam upaya penurunan ketimpangan, meskipun penurunan yang terjadi tidak begitu signifikan. Mulai tahun 2022, proyek–proyek strategis nasional terkait pembangunan infrastruktur guna mendukung pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilakukan. Pembangunan infrastruktur di lokasi pemindahan IKN tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga ketimpangan pendapatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menurun.

Kesejahteraan sosial menjadi perhatian dalam menilai perkembangan pembangunan daerah. Tujuan utama dalam hal pembangunan daerah



adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Perkembangan kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui kondisi pendidikan, kesehatan, perekonomian atau secara umum melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur peningkatan kualitas hidup manusia seperti ditunjukkan Gambar 3.3 di bawah ini.



Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 – 2022

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022.

Gambar 3.3 menunjukkan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan pada tahun 2022. Peningkatan ini terus konsisten terjadi sejak tahun 2020 – 2022, tahun 2022 IPM Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 72,55 atau meningkat 0,54 dibandingkan tahun 2021. Kondisi IPM Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi yang terendah ke-2 atau urutan ke-9 dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur, maka IPM Kabupaten Penajam Paser Utara berada jauh di bawahnya. Namun jika dibandingkan dengan IPM nasional, capaian IPM Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlalu jauh berbeda dimana IPM nasional sebesar 72,91. IPM Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menjadi perhatian serius pemerintah, mulai dari perbaikan layanan pendidikan, layanan kesehatan



dan perekonomian. Untuk melihat kondisi pertumbuhan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat di Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3. 2 Indikator Penyusunan IPM Kab Penajam Paser Utara 2018- 2022

No	Indikator	Satuan	Jumlah				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,13	71,64	71,41	72,01	72,55
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,05	71,3	71,68	71,68	71,71
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,54	12,56	12,57	12,57	12,7
4	Rata-rata lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,03	8,28	8,36	8,36	8,51
5	Pengeluaran Per Kapita	Rp	11.492	11,231	11.651	11.651	11.890

Sumber: BPS Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan dari 8,03 pada tahun 2018 meningkat menjadi 8,51 pada tahun 2022. Hal ini juga terlihat pada harapan lama sekolah yang juga meningkat dari 12,54 menjadi 12,7 pada tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS yaitu dengan terus memperluas kesempatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah formal. Aspek Kesehatan menunjukkan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat di tahun 2022 sebesar 71,71 tahun dibanding tahun 2021. Angka ini, sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor kesehatan seperti angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian penduduk akibat penyakit menular/tidak menular, serta penyebab masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu dengan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan dalam arti luas kepada masyarakat, maka diharapkan Usia Harapan Hidup dapat meningkat.

Angka pengeluaran per kapita digunakan untuk mengukur kesejahteraan atau penghidupan yang layak. Angka pengeluaran per kapita ini berkaitan dengan aspek ekonomi yaitu angka rata-rata rupiah yang



dikeluarkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk hidup layak. Pada tahun 2022 angka pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp11,89 juta per tahun. Angka ini meningkat dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp11,65 juta. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota sebesar Rp 990.833 per bulan. Untuk dapat meningkatkan pengeluaran ini, maka upaya yang dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan melakukan perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan produksi usaha masyarakat, dan lainnya.

Adapun jumlah penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara menurut data P3KE untuk Desil 1 sampai Desil 3 pada tahun 2023 berjumlah 13.114 keluarga atau 58.460 individu yang tersebar di empat (4) kecamatan sesuai Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Miskin Desil 1-3 Kabupaten Penajam Paser Utara

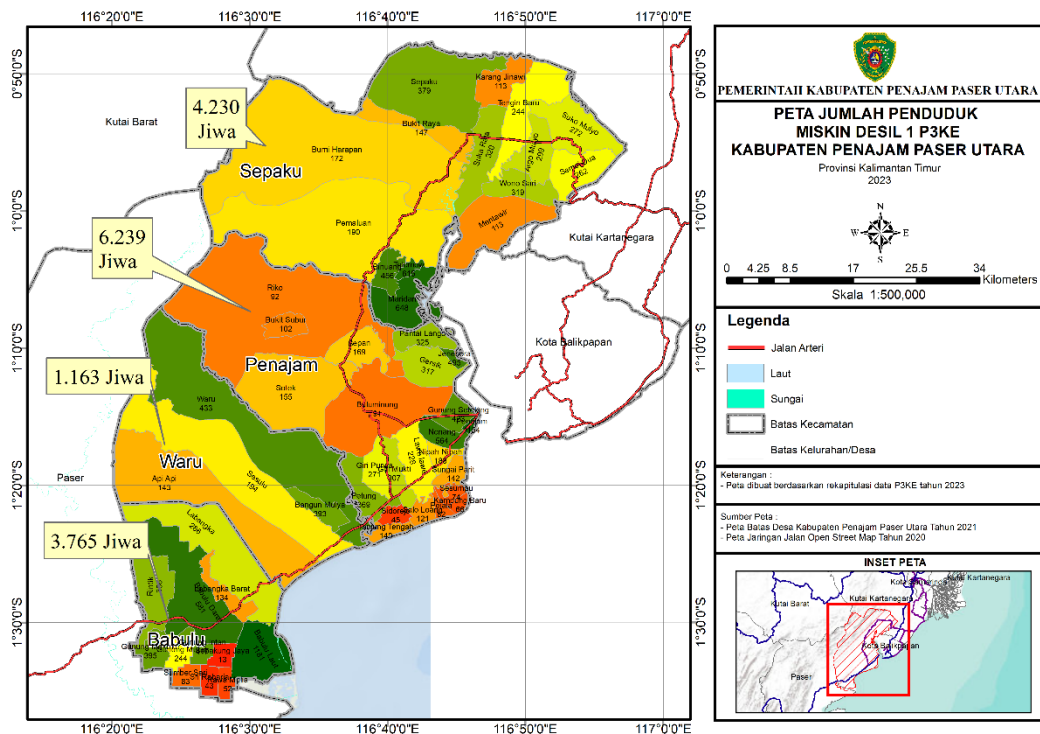
No	DESA/KELURAHAN	DESIL 1-3		DESIL 1 PERSENTIL 1-2		VERVAL AWAL		VALIDASI ULANG	
		JML KK	JML INDIVIDU	JML KK	JML INDIVIDU	JML KK	JML INDIVIDU	JML KK	JML INDIVIDU
1	KECAMATAN PENAJAM	5.475	25.164	187	1.039	122	674	99	501
2	KECAMATAN WARU	1.230	5.381	44	233	0	0	0	0
3	KECAMATAN SEPAKU	3.566	15.164	155	832	50	258	34	158
4	KECAMATAN BABULU	2.843	12.751	112	596	26	122	24	103
	PENAJAM PASER UTARA	13.114	58.460	498	2.700	198	1.054	157	762

Sumber: P3KE Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023.

Dari jumlah penduduk miskin Desil 1 sampai Desil 3, sesuai data P3KE Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem sesuai hasil verval kelurahan/desa adalah 762 jiwa. Jumlah penduduk miskin ekstrem terbesar di Kecamatan Penajam sebanyak 501 jiwa, Kecamatan Sepaku sebanyak 158 jiwa, Kecamatan



Babulu sebanyak 103 jiwa, Kecamatan Babulu tidak ada (0 jiwa). Gambar 3.4 menunjukkan Jumlah penduduk miskin terbesar di Kecamatan Samarinda Seberang sebesar 6.718 jiwa, kemudian Kecamatan Samarinda Ilir sebesar 6.180 jiwa, dan yang terkecil di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 1.219 jiwa.



Gambar 3.4 Sebaran Penduduk Miskin Desil 1 Menurut P3KE Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Sumber: Data diolah, 2023.

3.2. Bidang Kemiskinan/Konsumsi

Analisis bidang kemiskinan menggunakan tiga indikator, yaitu: tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pertama, tingkat kemiskinan (Po) ditunjukkan dengan jumlah (jiwa) dan persentase (%) penduduk miskin Kab. PPU. Gambaran hasil analisis ini akan digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah setempat, sehingga dapat



dijadikan sebagai salah satu dasar untuk melakukan penilaian keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan.

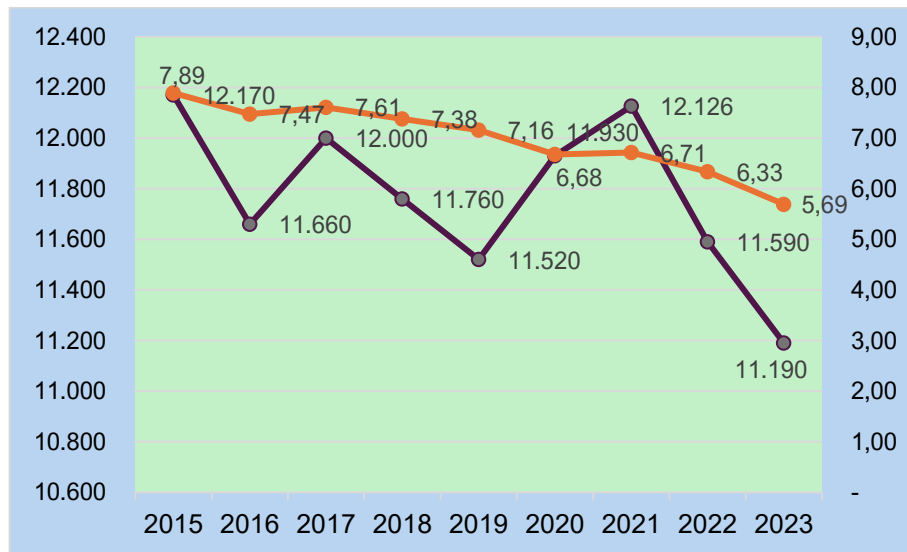
Kedua, indeks kedalaman kemiskinan bertujuan untuk memberikan gambaran kesenjangan kemiskinan antar wilayah, khususnya antar kabupaten/kota. Nilai indeks ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat Kab. PPU. Ketiga, indeks keparahan kemiskinan digunakan untuk mengetahui gambaran kualitas kondisi kemiskinan yang menjadi ukuran tingkat kemiskinan atau indikator kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Gambaran keseluruhan yang diperoleh dari hasil analisis indeks ini diperlukan untuk membantu para pengambil kebijakan dalam menentukan program yang tepat sehingga manfaat yang diperoleh bisa lebih maksimal.

Berdasarkan ketersediaan data yang diperoleh, maka analisis yang dapat dilakukan untuk menganalisis indikator tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan hanya empat jenis, yaitu: perkembangan antar waktu, posisi relatif, relativitas dan efektivitas.

3.2.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu

1) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk miskin dengan total penduduk di suatu daerah. Perkembangan jumlah penduduk miskin selama sembilan tahun terakhir menunjukkan adanya trend penurunan. Secara keseluruhan, analisis perkembangan antar waktu tingkat kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3. 5 Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan (%) Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Data perkembangan antar waktu tingkat kemiskinan selama sembilan tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 yang mencapai 7,89% dan terus menunjukkan trend penurunan hingga mencapai 5,69% pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin terbanyak terjadi pada tahun 2021, yaitu sebanyak 12.126 jiwa dengan tingkat persentase sebesar 6,71%. Tingginya jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada tahun 2020 dan masih berlanjut di tahun berikutnya. Pandemi COVID -19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian masyarakat di Kab. PPU. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tutup sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi dan secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi ini menjadi fokus utama Pemkab PPU pada periode tersebut.

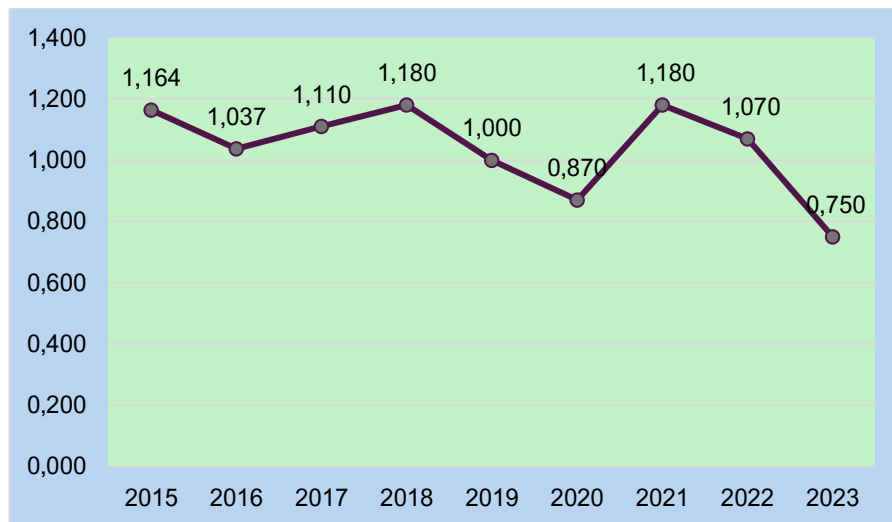
Pemerintah Daerah Kab. PPU beserta jajarannya telah menyiapkan berbagai program untuk membantu masyarakat, terutama di masa pandemi. Berbagai program penanggulangan kemiskinan ini telah berjalan



dengan baik. Hal ini terbukti dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin setelah terjadi pandemi sampai dengan tahun 2023. Jumlah penduduk miskin tahun 2023 juga menjadi yang terendah selama sembilan tahun terakhir yaitu sebanyak 11.190 jiwa. Program-program yang dinilai tepat sasaran dan bermanfaat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat perlu dilanjutkan pada periode berikutnya sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut.

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan trend penurunan. Adapun analisis perkembangan antar waktu indeks kedalaman kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3. 6 Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. PPU, 2024.

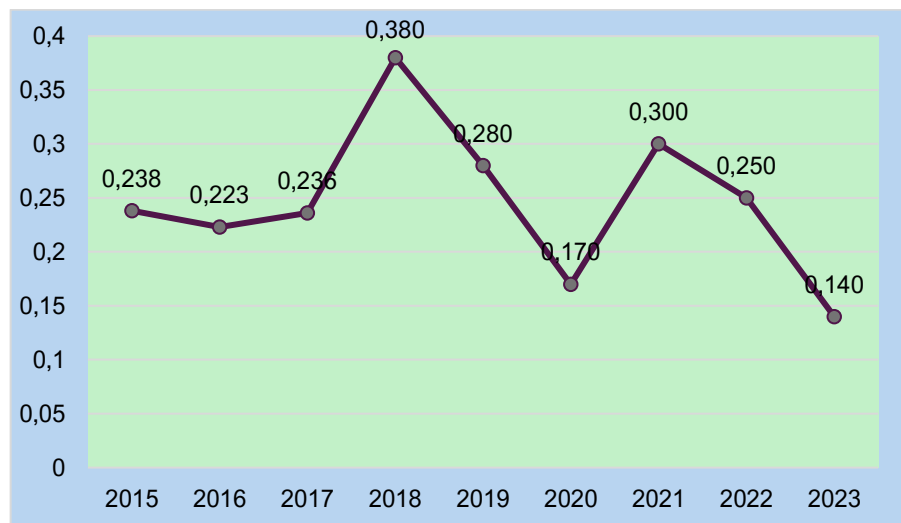
Indeks kedalaman kemiskinan Kab. PPU selama sembilan (9) tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2018 dan 2023 menunjukkan angka yang sama yaitu sebesar 1.180. Nilai indeks ini sekaligus merupakan nilai indeks tertinggi selama sembilan tahun terakhir. Tahun 2023 menjadi pencapaian terbaik karena nilai indeks



kedalaman kemiskinan menjadi yang terendah selama beberapa tahun tersebut, yaitu sebesar 0.750. Adanya fluktuasi nilai indeks tersebut sangat dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kab. PPU yang mengalami dampak secara langsung maupun tidak langsung dari setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Selain faktor tersebut, nilai indeks yang berfluktuasi juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi yang dimiliki setiap wilayah, baik dari potensi ekonomi, sumber daya maupun potensi lainnya.

3) Indeks Keparahan Kemiskinan

Perkembangan nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan trend penurunan meskipun berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Analisis perkembangan antar waktu indeks keparahan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3. 7 Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa nilai indeks keparahan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0.380. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 dengan nilai indeks sebesar 0.170, namun pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 0.300. Hal

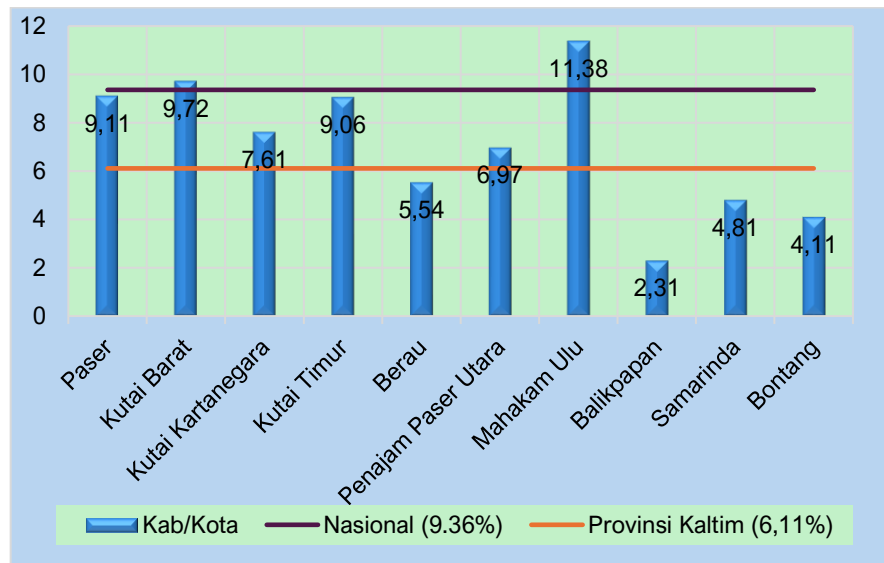


ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan masih berlanjut pada tahun berikutnya, sehingga memiliki dampak secara langsung terhadap perekonomian masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat mulai membaik setelah pandemi COVID-19 mulai berakhir. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan nilai indeks yang menurun pada tahun 2022 dan tahun 2023. Nilai indeks keparahan kemiskinan Kab. PPU pada tahun 2023 menjadi nilai terendah selama sembilan tahun terakhir yaitu sebesar 0.140. Nilai ini menggambarkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Pemkab PPU berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, dalam artian mampu menjangkau masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan manfaat dari program tersebut.

3.2.2. Analisis Posisi Relatif

1) Tingkat Kemiskinan

Analisis posisi relatif tingkat kemiskinan bertujuan untuk mengetahui posisi tingkat kemiskinan Kab. PPU jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tingkat provinsi dan nasional. Data tingkat kemiskinan Kab. PPU pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan persentase antara BPS Kab. PPU dengan BPS Provinsi Kalimantan Timur, namun dengan selisih yang tidak begitu jauh. Persentase tingkat kemiskinan berdasarkan data BPS Kab. PPU pada tahun 2015 adalah sebesar 5,69%, sementara berdasarkan data BPS Provinsi Kaltim adalah sebesar 6,97%. Analisis Posisi Relatif ini dilakukan dengan mengambil data yang bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan untuk menggunakan keseragaman sumber data dalam proses analisis yang dilakukan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Gambar 3.8 menunjukkan analisis posisi relatif tingkat kemiskinan pada tahun 2023.



Gambar 3. 8 Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kab. PPU 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

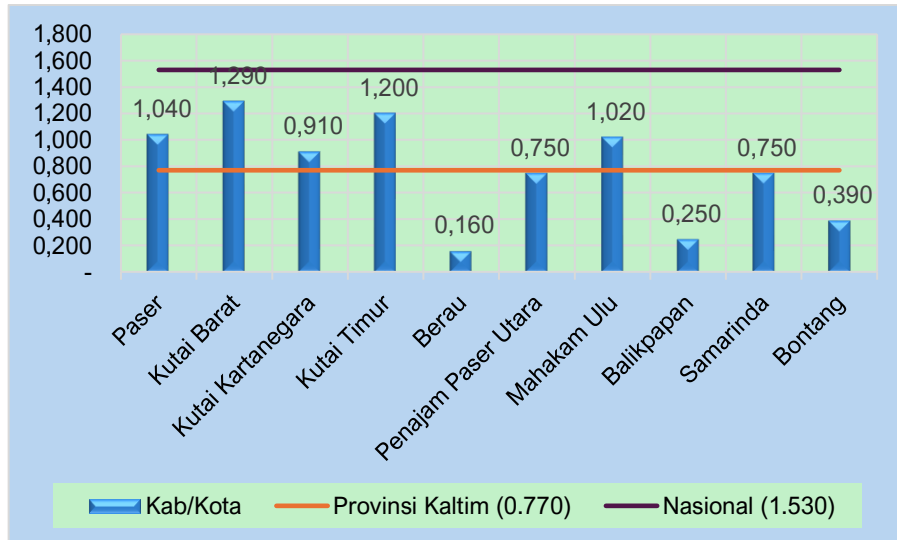
Analisis posisi relatif pada Gambar 3.8. menunjukkan posisi tingkat kemiskinan Kab. PPU masih berada diatas Provinsi Kalimantan Timur dan di bawah nasional. Tingkat kemiskinan Kab. PPU adalah sebesar 6,97%, sementara Provinsi Kaltim adalah sebesar 6,11% dan nasional sebesar 9,36%. Tingkat kemiskinan Kab. PPU ini berada pada posisi kelima terendah setelah Balikpapan, Bontang, Samarinda dan Berau. Berdasarkan hasil analisis ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Proses pengawasan perlu dilakukan terhadap pelaksanaan program sehingga tidak hanya sekedar memenuhi target realisasi anggaran yang dibuat, namun masyarakat juga mendapatkan manfaat yang dapat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini perlu dilakukan mengingat posisi tingkat kemiskinan Kab. PPU yang masih berada di atas rata-rata Provinsi Kaltim.

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Analisis posisi relatif tingkat kemiskinan bertujuan untuk mengetahui posisi indeks kedalaman kemiskinan Kab. PPU jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tingkat provinsi dan nasional. Analisis posisi relatif



indeks kedalaman kemiskinan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Gambar 3. 9 Analisis Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kab. PPU Tahun 2023

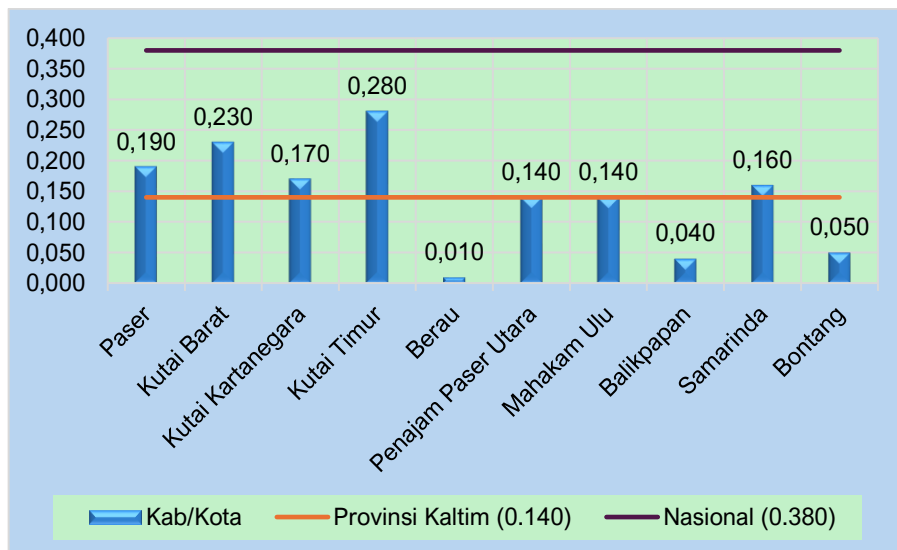
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Hasil analisis indeks kedalaman kemiskinan Kab. PPU menunjukkan trend penurunan selama dua tahun terakhir yaitu 2022 dan 2023, dimana nilai indeks ini sedikit berada di bawah nilai indeks Provinsi Kaltim, yaitu sebesar 0.750. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kab. PPU dalam menangani kemiskinan sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan gambar 3.5 juga dapat diketahui bahwa nilai indeks kedalaman kemiskinan Kab. PPU sama besarnya dengan kota Samarinda, sehingga menempatkan kabupaten dan kota tersebut pada posisi keempat terendah setelah Berau, Balikpapan dan Bontang. Nilai indeks Kab. PPU berada pada posisi cukup jauh di bawah nilai indeks tingkat nasional. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Kab. PPU pada tahun tersebut berpengaruh signifikan terhadap penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan menempatkan Kab. PPU di bawah Provinsi Kaltim dan Nasional.



3) Indeks Keparahan Kemiskinan

Analisis posisi relatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur posisi nilai indeks keparahan kemiskinan Kab. PPU jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, Provinsi Kaltim dan Nasional. Analisis posisi relatif indeks keparahan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 3.10.



Gambar 3. 10 Analisis Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. PPU Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Gambar 3.10 menunjukkan bahwa nilai indeks keparahan kemiskinan Kab. PPU sama besarnya dengan kabupaten Mahulu dan Provinsi Kaltim yaitu sebesar 0.140. Posisi nilai indeks Kab. PPU ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, seperti: Samarinda, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur. Jika dibandingkan dengan nilai indeks keparahan kemiskinan tingkat nasional, maka Kab. PPU masih berada jauh dibawahnya. Nilai indeks Kab. PPU ini berada pada posisi keempat terendah bersama dengan Kabupaten Mahakam Ulu setelah Berau, Balikpapan dan Bontang. Hasil analisis ini memberikan gambaran bahwa meskipun program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kab. PPU sudah baik,

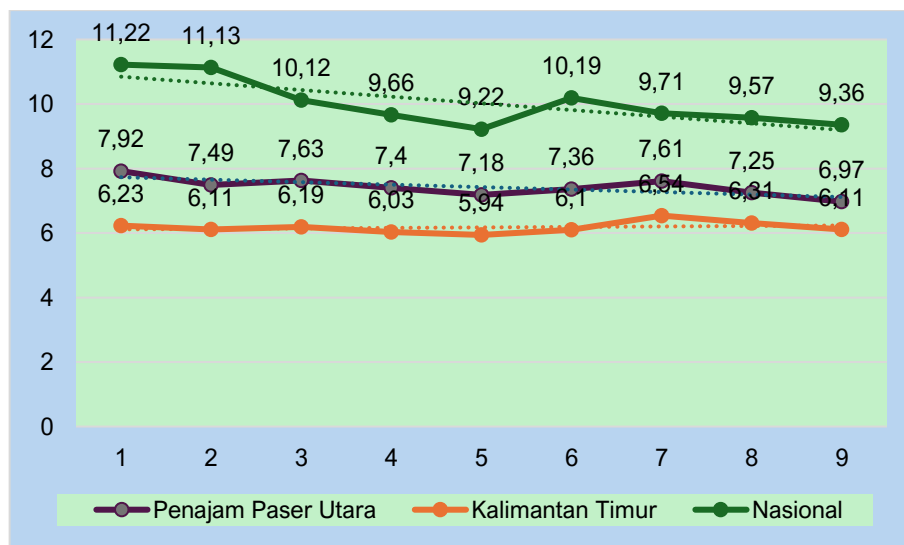


namun tetap perlu dievaluasi sehingga dapat lebih menjangkau masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang atau tidak layak. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk penentuan program di tahun berikutnya sehingga posisi nilai indeks keparahan kemiskinan Kab. PPU diharapkan berada di bawah Provinsi Kaltim dan Nasional.

3.2.3. Analisis Relativitas

1) Tingkat Kemiskinan

Analisis relativitas bertujuan untuk mengetahui dan mengukur *trend* tingkat kemiskinan Kab. PPU jika dibandingkan dengan Provinsi Kaltim dan Nasional selama beberapa tahun terakhir. Gambar 3.11. menunjukkan analisis relativitas tingkat kemiskinan Kab. PPU terhadap Provinsi dan Nasional.



Gambar 3. 11 Analisis Relativitas Tingkat Kemiskinan (%) Kab.PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kab. PPU selama sembilan tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun menunjukkan trend yang menurun dari tahun ke tahun. Kondisi tingkat kemiskinan Kab. PPU masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Kaltim, namun kondisi di tahun



2023 jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan dan pencapaian indikator di tingkat Kabupaten telah sejalan dengan Provinsi dan Nasional. Garis trend tingkat kemiskinan Kab. PPU menunjukkan adanya penurunan, khususnya di tahun 2022 dan 2023, sama halnya dengan Provinsi Kaltim dan Nasional. Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena terjadi pandemi Covid-19, baik di tingkat Kab. PPU maupun di tingkat Provinsi dan Nasional, meskipun tingkat kemiskinan tertinggi Kab. PPU terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan persentase mencapai 7,63%.

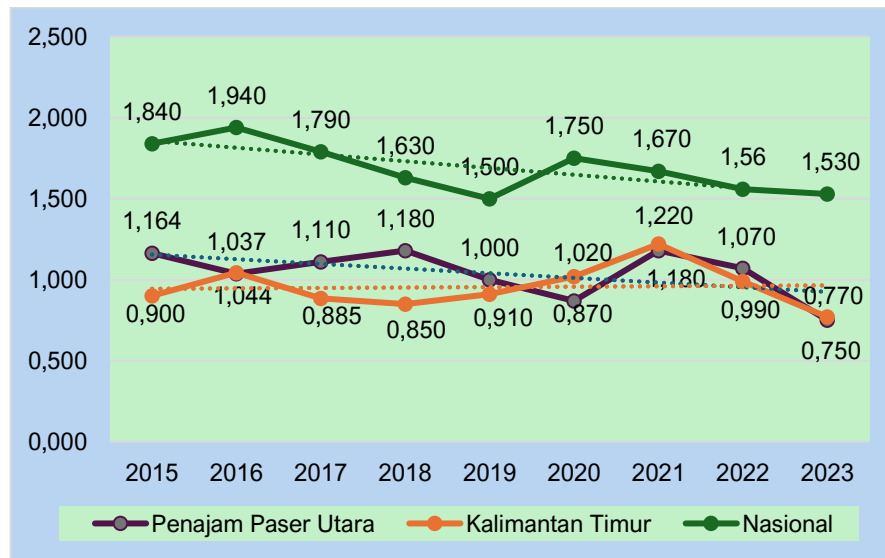
Program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kab. PPU selama dua tahun terakhir mampu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut, meskipun masih berada di atas rata-rata Provinsi Kaltim. Oleh karena itu Pemerintah Daerah tetap perlu melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap program-program yang sudah dijalankan. Program yang dianggap tepat dan terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan dapat dilanjutkan, sementara program yang dinilai kurang tepat sasaran dapat dievaluasi ulang untuk keberlanjutannya. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat membantu Pemerintah Daerah Kab. PPU dalam mengambil kebijakan yang tepat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada periode berikutnya dan mampu menempatkan Kab. PPU dibawah tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Kaltim dan Nasional.

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat relativitas nilai indeks kedalaman kemiskinan Kab. PPU terhadap Provinsi Kaltim dan Nasional selama beberapa tahun terakhir. Gambar 3.8 menunjukkan bahwa nilai indeks Kab. PPU selama tiga tahun terakhir menunjukkan *trend* menurun, meskipun pada tahun 2022 lebih tinggi daripada nilai indeks Provinsi Kaltim. Kab. PPU memiliki nilai indeks yang lebih rendah dari nilai indeks Provinsi Kaltim pada tahun 2016, 2020, 2021 dan 2023. Nilai indeks



Kab. PPU jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional. Hal ini terjadi selama sembilan tahun berturut-turut. Nilai indeks kedalaman kemiskinan Kab. PPU tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.180. Nilai ini berbanding terbalik dengan nilai indeks Provinsi Kaltim yang justru menunjukkan posisi yang jauh lebih rendah yaitu sebesar 0.850. Nilai indeks Kab. PPU pada tahun tersebut menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah tersebut cukup tinggi. Analisis relativitas indeks kedalaman kemiskinan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.12.



Gambar 3. 12 Analisis Relativitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

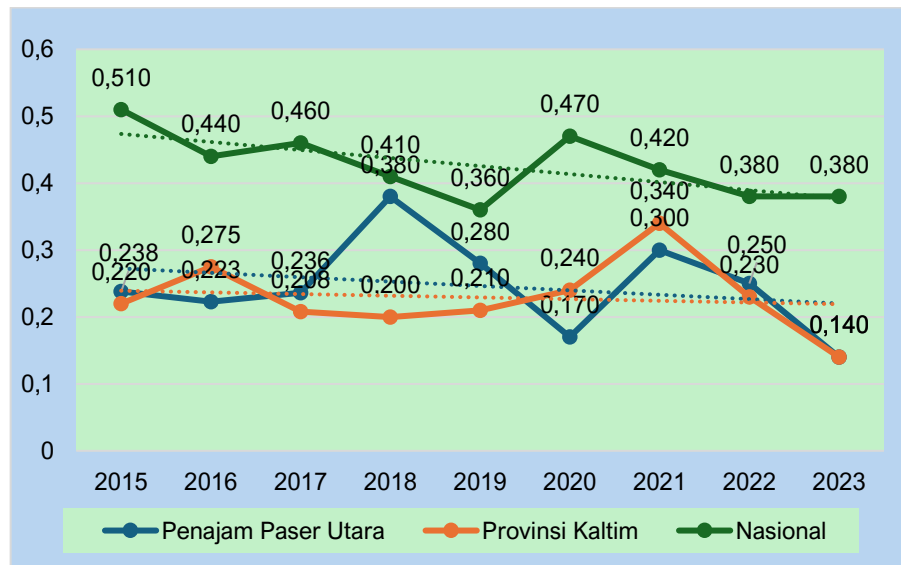
Pemerintah Kab PPU kemudian melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan pada periode berikutnya untuk menurunkan nilai indeks tersebut dan upaya ini memberikan hasil yang positif. Penurunan nilai indeks mulai terjadi pada tahun 2019 dan berlanjut pada tahun berikutnya. Nilai indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 karena dampak pandemi COVID-19. Hal ini juga terjadi di tingkat Provinsi Kaltim, meskipun di tingkat Nasional justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



Pertumbuhan ekonomi di Kab. PPU setelah terjadi pandemi COVID-19 cenderung membaik dan mengalami peningkatan sehingga memberikan dampak positif terhadap nilai indeks yang terus menurun pada tahun 2022 dan 2023. Perkembangan nilai indeks PPU yang memiliki trend menurun meskipun berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan baik. Program-program yang telah dilaksanakan tersebut tetap perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut, baik dari sisi anggaran, target sasaran dan pelaksanaan di lapangan. Proses evaluasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, baik dari Pemerintah Daerah maupun *stakeholder*. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kab. PPU dalam merancang program-program yang tepat sasaran pada tahun berikutnya.

3) Indeks Keparahan Kemiskinan

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat relativitas nilai indeks keparahan kemiskinan Kab. PPU terhadap Provinsi Kaltim dan Nasional selama beberapa tahun terakhir. Nilai indeks Kab. PPU selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend menurun, meskipun pada tahun 2022 lebih tinggi daripada nilai indeks Provinsi Kaltim. Kab. PPU memiliki nilai indeks yang lebih rendah dari nilai indeks Provinsi Kaltim pada tahun 2016, 2020 dan 2023. Analisis relativitas indeks keparahan kemiskinan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3. 13 Analisis Relativitas Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Gambar 3.13 menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan Kab. PPU pada tahun 2018 sebesar 0.380, dimana nilai ini hampir mendekati nilai indeks nasional sebesar 0.410 pada tahun tersebut. Nilai ini berbanding terbalik dengan nilai indeks Provinsi Kaltim yang justru jauh di bawah nilai indeks Kab. PPU yaitu sebesar 0.200. Nilai indeks yang diperoleh Kab. PPU pada tahun 2018 menggambarkan kondisi kemiskinan masyarakat yang cukup tinggi di wilayah tersebut.

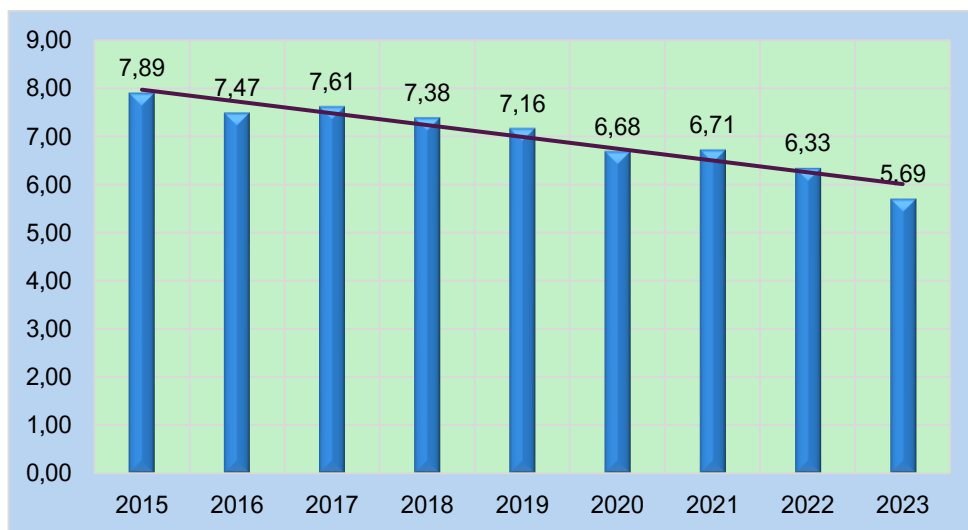
Penurunan nilai indeks kemiskinan terjadi di tahun 2019 dan 2020, meskipun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 karena dipengaruhi faktor pandemi COVID-19. Pemerintah Kab. PPU berhasil menekan nilai indeks keparahan kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya, bahkan nilai indeks Kab. PPU pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 0.140. Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan Kab. PPU cenderung mengalami penurunan dan selalu berada di bawah posisi nilai indeks tingkat nasional, meskipun berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir.



3.2.4. Analisis Efektivitas

1) Tingkat Kemiskinan

Analisis efektivitas bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan program yang dijalankan Pemerintah mampu menanggulangi atau mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Semakin efektif program yang dilaksanakan, maka tingkat kemiskinan akan menunjukkan trend yang semakin menurun. Gambar 3.14 menunjukkan analisis efektivitas tingkat kemiskinan Kab. PPU.



Gambar 3. 14 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%) Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Pelaksanaan program Pemerintah Daerah harus selaras dengan karakteristik kemiskinan yang akan ditanggulangi, sehingga pemberian bantuan atau kegiatan pemberdayaan bisa tepat sasaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan Pemerintah Kab PPU berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya *trend* penurunan tingkat kemiskinan selama sembilan tahun terakhir. Gambar 3.14 juga menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, hanya pada tahun 2021 saja terdapat kenaikan tingkat kemiskinan, yaitu dari sebesar 6,68% pada tahun 2020 menjadi 6,71% pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya dampak pandemi COVID-19 yang telah dimulai sejak tahun



2020. Taraf hidup masyarakat menurun karena banyak lapangan pekerjaan yang tutup, sementara tidak semua memiliki tabungan yang memadai untuk menanggulangi kondisi tersebut.

Berdasarkan data realisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. PPU tahun 2023, dapat diketahui beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat di wilayah tersebut. Beberapa program penanggulangan kemiskinan tersebut antara lain: pemberian akses pendidikan lanjutan bagi siswa putus sekolah, penanganan kedaruratan PPKS, pemenuhan hak dasar pangan melalui bantuan sosial, pemenuhan sarana air bersih untuk masyarakat, pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat kategori miskin, bantuan pengembangan usaha bagi petani/nelayan kecil, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan lain-lain. Setiap program yang dijalankan memiliki indikator capaian masing-masing, sehingga dapat dievaluasi tingkat capaian realisasi di akhir periode. Trend tingkat kemiskinan yang terus menurun menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan Pemerintah Daerah semakin efektif.

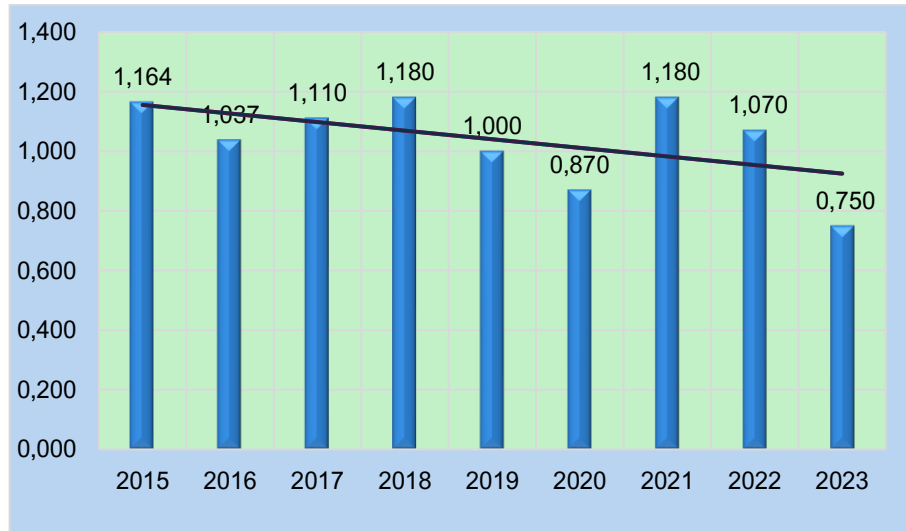
Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan selama dua tahun terakhir. Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 adalah sebesar 6,33% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,69%. Kondisi tersebut secara keseluruhan menggambarkan bahwa efektifitas penurunan tingkat kemiskinan sejalan dengan efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kab. PPU.

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Analisis efektifitas bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan program yang dijalankan Pemerintah mampu menanggulangi atau mengurangi indeks kedalaman kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Semakin efektif program yang dilaksanakan, maka *trend* indeks kedalaman



kemiskinan akan semakin menurun untuk wilayah tersebut. Analisis efektivitas dapat dilihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3. 15 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. PPU Tahun 2015 - 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kab. PPU menunjukkan *trend* yang menurun selama beberapa tahun terakhir, meskipun masih mengalami fluktuasi. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2018 dan 2020 menjadi yang tertinggi selama sembilan tahun terakhir, yaitu sebesar 1.180. Nilai indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan selama dua tahun terakhir, dengan nilai indeks tahun 2023 menjadi yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.750.

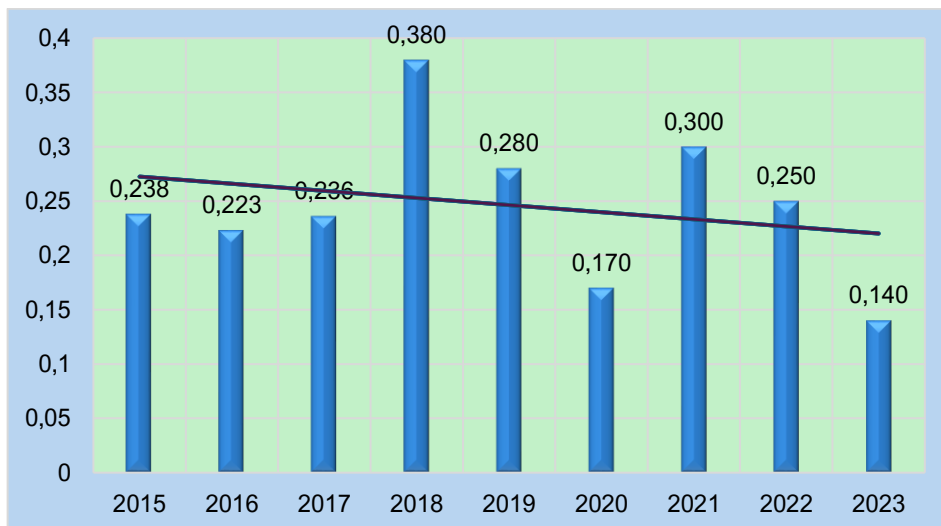
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa penurunan nilai indeks ini juga sejalan dengan kebijakan dan program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah Kab. PPU. Semakin efektif program yang dilaksanakan, maka semakin menurun nilai indeks tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan. Proses evaluasi perlu dilakukan dengan tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Program-program tersebut diharapkan



mampu memberikan dampak positif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tidak memperlebar jurang kemiskinan.

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Analisis efektivitas bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan program yang dijalankan Pemerintah mampu menanggulangi atau mengurangi indeks kedalaman kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Semakin efektif program yang dilaksanakan, maka trend indeks kedalaman kemiskinan akan semakin menurun untuk wilayah tersebut. Analisis efektivitas indeks keparahan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3. 16 Analisis Efektivitas Indeks Keparaharan Kemiskinan (Indeks) Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kab. PPU cenderung mengalami penurunan, meskipun berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Trend penurunan ini menunjukkan adanya keselarasan dengan tingkat efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kab. PPU. Program-program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat golongan tidak mampu di daerah tersebut. Pelaksanaan program ini selalu dievaluasi setiap tahun untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam merancang program



penanggulangan kemiskinan pada tahun berikutnya. Penurunan nilai indeks keparahan kemiskinan Kab. PPU yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai indeks sebesar 0.140. Nilai ini menunjukkan bahwa program-program yang telah dirancang dan dilaksanakan pada tahun tersebut telah berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan data Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kab. PPU tahun 2023, dapat diketahui bahwa program yang dirancang Pemerintah Daerah Kab. PPU dinilai telah mampu menjangkau dan memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat, khususnya yang belum memiliki kehidupan layak. Program ini tidak hanya dalam bentuk bantuan dana secara langsung, namun juga dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut. Pelaksanaan program yang juga melibatkan berbagai dinas/OPD terkait ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih maksimal. Keterlibatan tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan, tetapi juga dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan sehingga bisa turut serta memastikan bahwa program yang dijalankan berjalan efektif dan tepat sasaran.

3.3. Bidang Ketenagakerjaan

Analisis bidang ketenagakerjaan menggunakan satu indikator utama, yaitu: tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator utama yang terkait langsung dengan tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka biasanya berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan, artinya semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

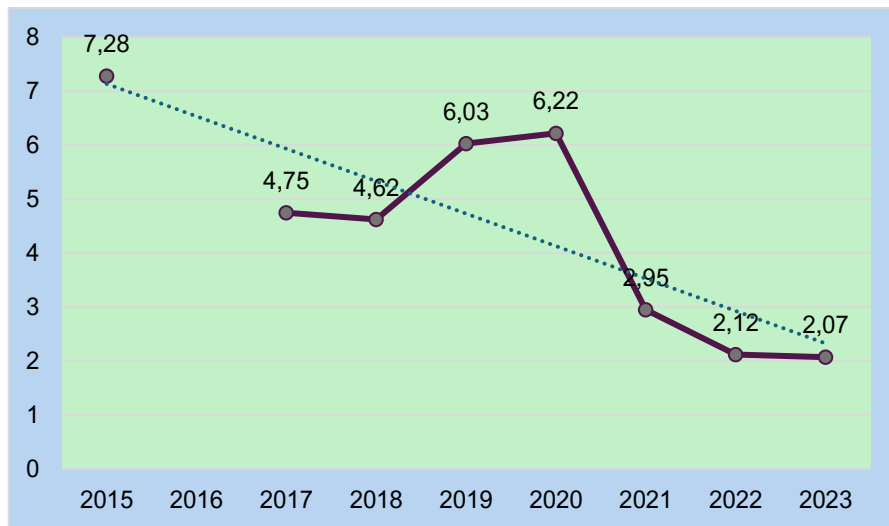
Berdasarkan ketersediaan data yang diperoleh, maka analisis yang dapat dilakukan hanya lima jenis, yaitu: perkembangan antar waktu, posisi relatif, relativitas, efektivitas dan prioritas bidang. Analisis ini dilakukan dari tahun 2014 sampai dengan 2023, terkecuali tahun 2016 karena BPS tidak



melakukan pendataan SAKERNAS sampai ke tingkat Kabupaten/Kota pada tahun tersebut.

3.3.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis perkembangan antar waktu tingkat pengangguran terbuka bertujuan untuk melihat pergerakan kenaikan dan penurunan selama beberapa periode sehingga dapat diidentifikasi penyebab serta solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Analisis perkembangan antar waktu tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3. 17 Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. PPU Tahun 2015 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Gambar 3.17 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi selama sembilan tahun terakhir terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7.28%. Angka ini menggambarkan tingginya persentase jumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan pada periode tersebut. Hal ini dipengaruhi kondisi sosial ekonomi Kab. PPU yang belum terlalu berkembang. Hal ini berbeda dengan kondisi pada dua tahun berikutnya karena terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kab. PPU. Tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020, meskipun tidak setinggi seperti yang terjadi pada tahun 2015. Kondisi tersebut disebabkan adanya pandemi COVID-19

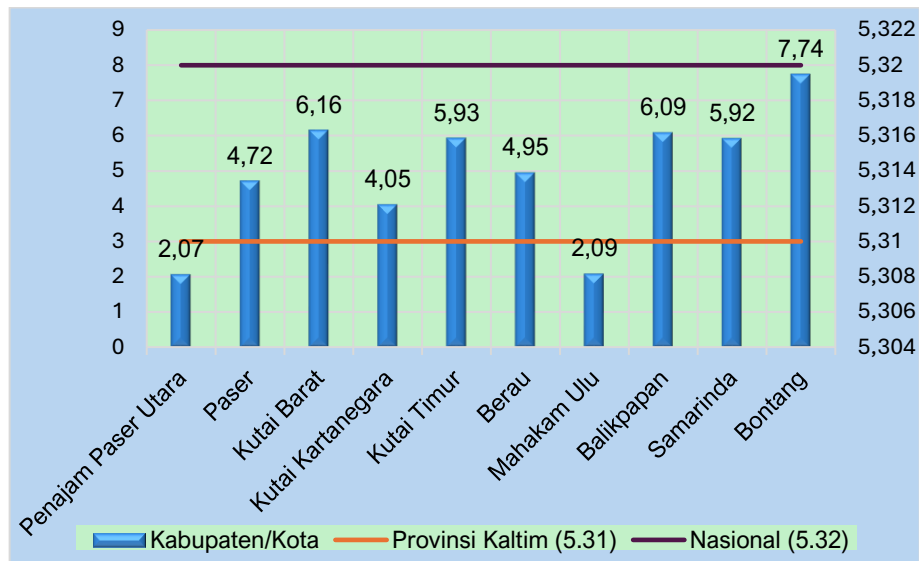


yang memberikan dampak ke semua sektor, termasuk sektor ekonomi. UMKM sebagai penggerak utama perekonomian di tingkat daerah juga terkena dampak dari pandemi tersebut. Banyak usaha yang harus tutup karena tidak ada pembeli dari produk yang dijual.

Tingkat pengangguran kembali menurun selama tiga tahun terakhir, dengan angka terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 2.07%. Penurunan ini dapat terjadi karena ada peran langsung dari Pemerintah Daerah Kab. PPU. Data realisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. PPU tahun 2023 menunjukkan bahwa beberapa program telah dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, seperti: bantuan permodalan dan fasilitas kepada UMK serta pelaksanaan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pencari kerja. Manfaat program ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Mereka memiliki kesempatan yang luas untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang layak, membuka lapangan pekerjaan baru, ataupun mengembangkan usaha yang sudah dimiliki. Adanya penurunan nilai indeks selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa program yang dijalankan saat ini telah mampu memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah Daerah Kab. PPU perlu melanjutkan berbagai program tersebut dan tetap melakukan evaluasi keberhasilan target capaian, sehingga diharapkan adanya penurunan kembali tingkat pengangguran terbuka di tahun berikutnya.

3.3.2. Analisis Posisi Relatif

Analisis posisi relatif bertujuan untuk mengetahui posisi tingkat pengangguran terbuka Kab. PPU jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tingkat provinsi dan nasional. Hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program dan target capaian yang tepat di periode berikutnya. Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat pada Gambar 3.18.



Gambar 3. 18 Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. PPU Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

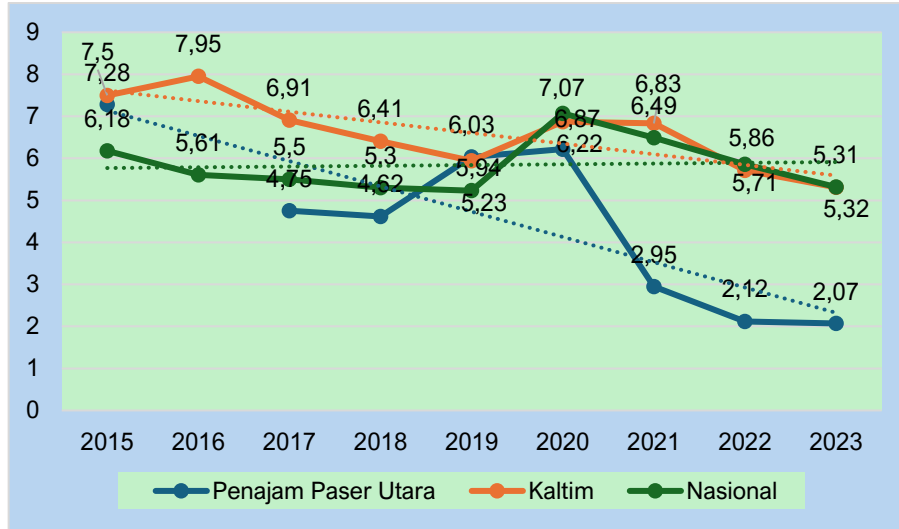
Gambar 3.18 menunjukkan bahwa Kab. PPU memiliki posisi tingkat pengangguran terbuka paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya pada tahun 2023, yaitu sebesar 2.07%. Posisi ini diikuti oleh Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Paser dan Berau yang berada dalam posisi lima teratas dengan tingkat pengangguran terbuka paling rendah di wilayah Provinsi Kaltim. Posisi tingkat pengangguran terbuka Kab. PPU juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kaltim dan Nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa Kab. PPU telah memiliki berbagai program untuk mengurangi tingkat pengangguran yang sudah berjalan dengan baik. Proses evaluasi harus tetap dilakukan terhadap pelaksanaan program sehingga target untuk terus menurunkan tingkat pengangguran dapat tercapai.

3.3.3. Analisis Relativitas

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat relativitas tingkat pengangguran terbuka Kab. PPU terhadap Provinsi Kaltim dan Nasional



selama beberapa tahun terakhir. Analisis Relativitas tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada Gambar 3.19.



Gambar 3. 19 Analisis Relativitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Tingkat pengangguran terbuka Kab. PPU pada 2015 berada pada posisi di bawah Provinsi Kaltim, namun berada di atas tingkat pengangguran terbuka nasional. Tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan trend penurunan, meskipun berfluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 membuat tingkat pengangguran terbuka Kab. PPU mengalami kenaikan, meskipun berada dibawah Provinsi Kaltim dan Nasional. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2021, dimana tingkat pengangguran terbuka yang sebelumnya berada pada posisi 6.22% pada tahun 2020, kemudian menjadi 2.95% pada tahun 2021.

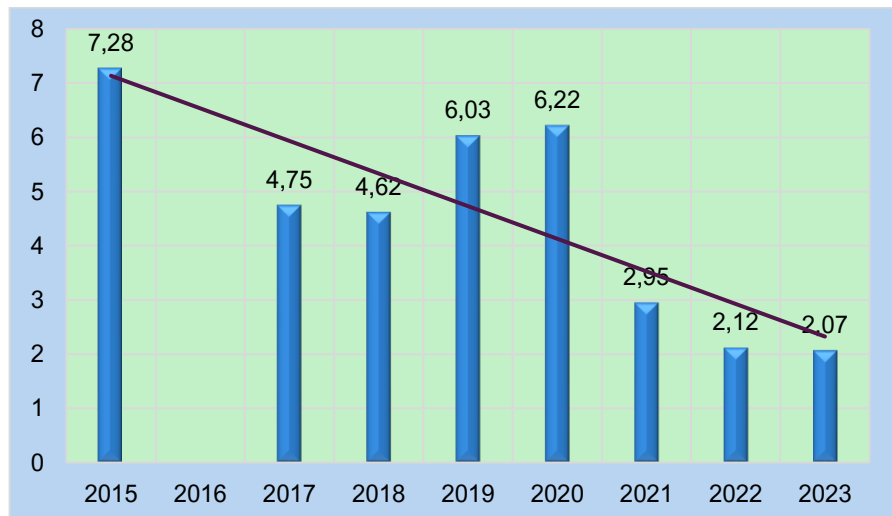
Tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 yang masih merupakan masa pandemi COVID-19 justru cukup tinggi di tingkat Provinsi Kaltim dan Nasional hingga mencapai angka 6.83% dan 6.49%. Kab. PPU tetap mempertahankan penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 dan 2023 dengan angka sebesar 2.12% dan 2.07%. Angka ini juga



masih berada dibawah Provinsi Kaltim dan Nasional. Penurunan tingkat pengangguran terbuka yang berhasil dilakukan oleh Kab. PPU ini tidak terlepas dari peran serta dan komitmen Pemerintah Daerah untuk merancang dan melaksanakan program-program yang bermanfaat serta tepat sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.3.4. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas bertujuan untuk mengetahui *trend* kenaikan atau penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kab. PPU selama beberapa tahun terakhir. Tren ini akan dilihat relevansinya dengan efektivitas pelaksanaan program dibidang ketenagakerjaan yang telah dirancang oleh Pemerintah Daerah Kab. PPU. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi trend penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kab. PPU, meskipun berfluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan 2023. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2015. Penurunan tingkat pengangguran terjadi pada tahun 2017 dan 2018, namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 dan 2020. Tingkat pengangguran tahun 2020 ini menjadi ketiga tertinggi selama sembilan tahun terakhir yaitu sebesar 6,22%. Peningkatan yang signifikan ini terjadi karena terjadi pandemi COVID -19. Masyarakat pekerja terkena dampak karena banyak lapangan pekerjaan yang tutup. Penurunan yang signifikan mulai terjadi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 hingga mencapai 2,07%. Analisis efektivitas tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada Gambar 3.20.



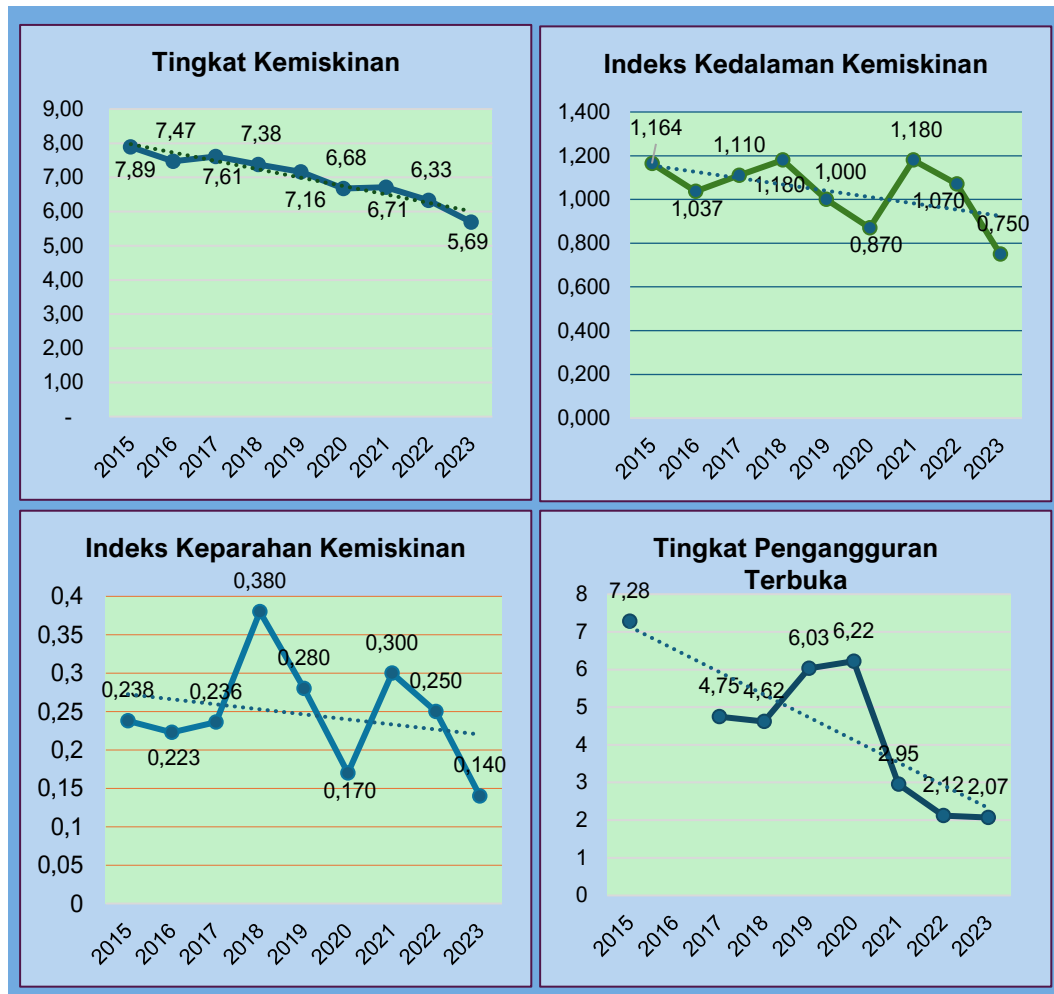
Gambar 3. 20 Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Adanya *trend* penurunan tingkat pengangguran terbuka ini, terutama di tiga tahun terakhir dapat diidentifikasi sebagai capaian efektivitas program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kab. PPU. Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ini dinilai telah berjalan dengan efektif, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan signifikan. Kinerja ini harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target penurunan tingkat pengangguran pada periode berikutnya dapat tercapai.

3.3.5. Analisis Prioritas Bidang

Analisis prioritas bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan berfokus pada perbandingan dan relevansi diantara empat indikator yaitu tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Analisis prioritas bidang bertujuan untuk melihat keterkaitan antar bidang sehingga bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan berdasarkan skala prioritas di wilayah tersebut. Analisis prioritas bidang dapat dilihat pada Gambar 3.21.



Gambar 3. 1 Analisis Prioritas Bidang Ketenagakerjaan Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Hasil analisis prioritas bidang menunjukkan bahwa secara trend, penurunan tingkat kemiskinan sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan, namun fluktuasi perkembangan untuk setiap indikator tersebut tidak selalu sama. Lebih lanjut, perkembangan trend ini juga dapat menggambarkan tingkat efektifitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kab. PPU dalam memperbaiki kondisi yang ada.

Program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kab. PPU bisa jadi berjalan efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun hal tersebut



belum tentu dapat mengurangi nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sebagai contoh, tingkat kemiskinan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,61% menjadi 7,38%. Hasil tersebut tidak berbanding lurus dengan indeks kedalaman kemiskinan yang justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1.110 menjadi 1.180 pada tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan, dimana nilainya justru meningkat dari 0.236 pada tahun sebelumnya menjadi 0.380 pada tahun 2018. Adapun penurunan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan berbanding lurus di dua tahun terakhir, yaitu 2022 dan 2023. Penurunan yang sama untuk ketiga indikator ini menggambarkan bahwa selama dua tahun terakhir, program penanggulangan kemiskinan telah berjalan cukup efektif. Keberlanjutan dari program tersebut perlu dilakukan sehingga diharapkan tidak menambah kesenjangan baru.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan juga dapat diketahui bahwa meskipun secara trend penurunan tingkat pengangguran berbanding lurus dengan tiga indikator kemiskinan, namun fluktuasinya tidak selalu sama. Sebagai contoh, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 6,22% menjadi 2,95%. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini tidak sebanding dengan tingkat kemiskinan yang justru meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,71% dari 6,68% pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan juga justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 0.870 menjadi 1.180 pada tahun 2021. Lebih lanjut, nilai indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan, yaitu dari 0.170 pada tahun sebelumnya menjadi 0.300 pada tahun 2021. Hal ini bisa terjadi karena pada tahun 2021 masih terjadi pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang/tidak



layak. Tingkat pengangguran pada tahun tersebut dapat berkurang karena masyarakat yang memulai pekerjaan wirausaha rumahan semakin meningkat dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya pada saat terjadi pandemi, meskipun pekerjaan tersebut masih belum bisa mengeluarkan mereka dari kondisi hidup yang kurang/tidak layak.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka berbanding lurus dengan tiga indikator tersebut pada dua tahun terakhir, yaitu 2022 dan 2023. Adapun tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 adalah sebesar 2,12% dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi sebesar 2,07%. Kondisi ini menggambarkan bahwa program-program dibidang ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengurangan tingkat pengangguran telah berjalan cukup efektif.

3.4. Bidang Kesehatan

Analisis bidang kesehatan menggunakan enam indikator, yaitu: angka kematian balita (AKB) per 1.000 KH, angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, prevalensi gizi kurang pada balita (%), penduduk dengan keluhan kesehatan (%), rasio bidan per 100.000 penduduk dan rasio dokter per 100.000 penduduk. **Pertama**, angka kematian balita (AKB) merupakan jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal sebelum mencapai umur lima tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. **Kedua**, angka kematian ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kematian ibu selama proses kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah persalinan, per 100.000 kelahiran hidup yang terjadi dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu. **Ketiga**, Penduduk dengan keluhan kesehatan (%) merupakan persentase penduduk suatu wilayah atau populasi yang melaporkan memiliki keluhan atau masalah kesehatan tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Keluhan kesehatan bisa bermacam-macam, mulai dari keluhan ringan seperti flu atau sakit kepala hingga keluhan yang lebih serius seperti penyakit kronis atau gangguan mental.



Keempat, prevalensi gizi kurang pada balita (%) merupakan persentase balita di suatu populasi yang mengalami masalah gizi kurang. Ini mencakup balita yang mengalami kekurangan gizi kronis (stunting), kekurangan gizi akut (wasting), dan/atau kekurangan gizi akut berat (*severe acute malnutrition*). Kelima, rasio bidan per 100.000 penduduk adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai ketersediaan tenaga kesehatan bidan dalam suatu populasi. Ini menggambarkan jumlah bidan yang tersedia dalam suatu wilayah dalam kaitannya dengan jumlah penduduknya. Keenam, rasio dokter per 100.000 penduduk adalah ukuran yang menggambarkan jumlah dokter yang tersedia dalam suatu wilayah dalam kaitannya dengan jumlah penduduknya. Ini adalah indikator penting dalam mengevaluasi ketersediaan layanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap perawatan medis.

Berdasarkan ketersediaan data yang diperoleh, maka analisis yang dapat dilakukan untuk menganalisis indikator angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, prevalensi gizi kurang pada balita (%), rasio bidan per 100.000 penduduk dan rasio dokter per 100.000 penduduk hanya empat jenis, yaitu: perkembangan antar waktu, posisi relatif, relativitas dan efektivitas. Khusus indikator angka kematian balita (AKB) per 1.000 KH, hanya bisa dilakukan analisis posisi relatif.

3.4.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu

1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

Data perkembangan antar waktu angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH bersumber dari data BPS Kab. PPU. Analisis perkembangan antar waktu angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH dapat dilihat pada Gambar 3.22.



Gambar 3. 22 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. PPU Tahun 2021 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

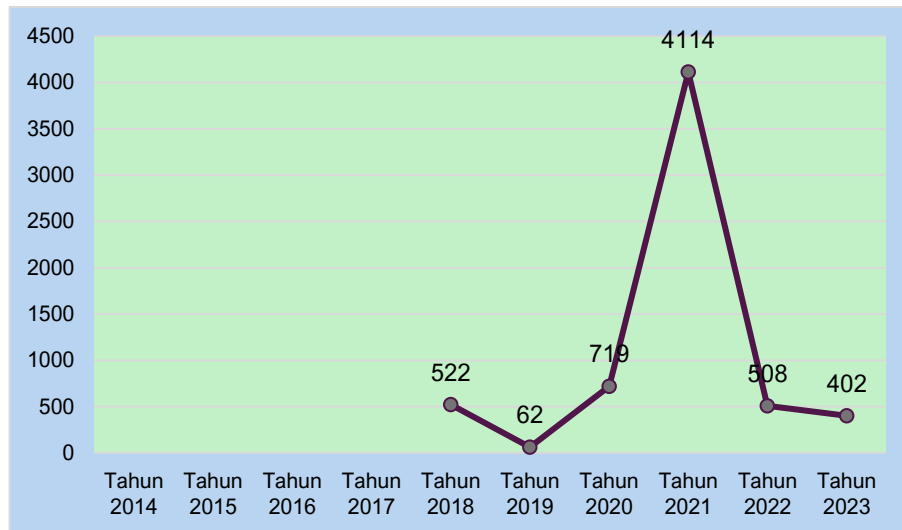
Angka Kematian Ibu (AKI) sangatlah penting karena merupakan indikator sensitif yang menunjukkan kualitas kesehatan suatu wilayah/daerah. AKI menggambarkan hasil interaksi dari berbagai aspek, baik aspek klinis (kualitas dan kuantitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan), aspek sistem layanan (kesehatan sistem jaminan kesehatan, system informasi rujukan) maupun aspek-aspek non kesehatan (budaya, pendidikan, akses menuju tempat layanan kesehatan). Analisis perkembangan antar waktu AKI di Kab. tidak bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan data pembandingan antar waktu. Data yang berhasil dikumpulkan hanya 2 tahun yaitu tahun 2021 dan 2022. Kendatipun demikian, gambar 3.18 di atas menunjukkan penurunan nilai AKI yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021, jumlah AKI sebanyak 15 kasus per 100.000 KH menurun sebanyak 10 kasus menjadi 5 kasus di tahun 2022.

2) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita

Perkembangan prevalensi gizi kurang pada balita selama beberapa tahun terakhir menunjukkan grafik fluktuatif. Adapun analisis



perkembangan antar waktu prevalensi gizi kurang pada balita dapat dilihat pada Gambar 3.23.



Gambar 3. 23 Analisis Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Balita Gizi Kurang (Kasus) Kab. PPU Tahun 2018 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Analisis perkembangan antar waktu gizi kurang pada balita dilakukan dengan menggunakan persatuan kasus karena adanya kesulitan memperoleh data rasio. Keterbatasan ini akan mengurangi efektivitas perbandingan perkembangan antar waktu karena sedikit mengabaikan variabel jumlah penduduk tiap periode/ waktu. Angka gizi kurang pada balita pada tahun 2018 mencapai 522 kasus dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 62 kasus. Tahun 2020 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 719 kasus dan semakin melonjak hingga 4.114 kasus di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 yang menjadi kasus tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Status gizi kurang pada balita mengalami penurunan signifikan sebanyak 3.606 kasus pada tahun 2022 dan terus menurun hingga tahun 2023 dengan tersisa 402 kasus.

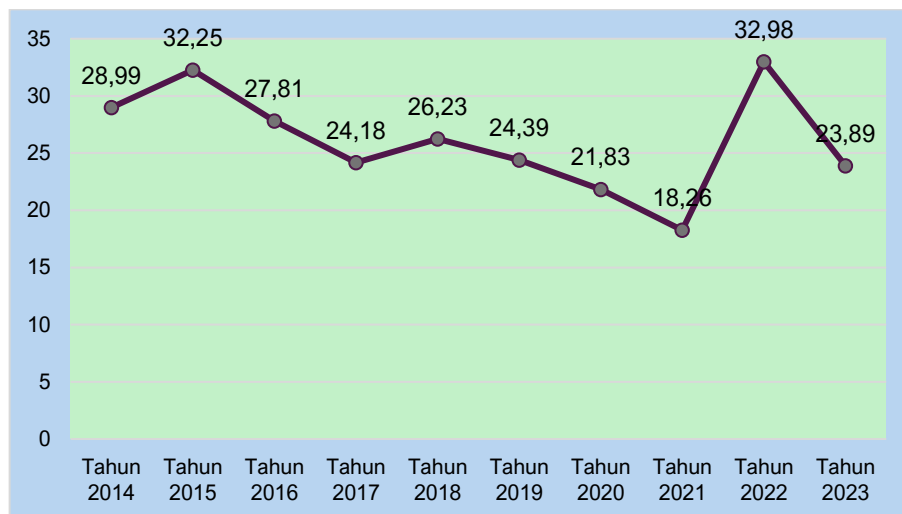
Kendatipun jumlah kasus prevalensi gizi kurang pada balita mengalami tren penurunan, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya mengalami fluktuasi bahkan lonjakan yang ekstrim. Angka fluktuasi tersebut



sangat dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kab. PPU yang mengalami dampak dari setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain faktor tersebut, jumlah kasus prevalensi gizi kurang pada balita juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan **akses terhadap perawatan kesehatan, kualitas layanan kesehatan, akses terhadap nutrisi yang baik dan faktor lingkungan lainnya** setiap wilayah.

3) Penduduk dengan Keluhan Kesehatan

Perkembangan rasio penduduk dengan keluhan kesehatan menunjukkan tren penurunan meskipun di beberapa tahun tertentu mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir. Analisis perkembangan antar waktu rasio penduduk dengan keluhan kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.24.



Gambar 3. 24 Analisis Perkembangan Antar Waktu Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

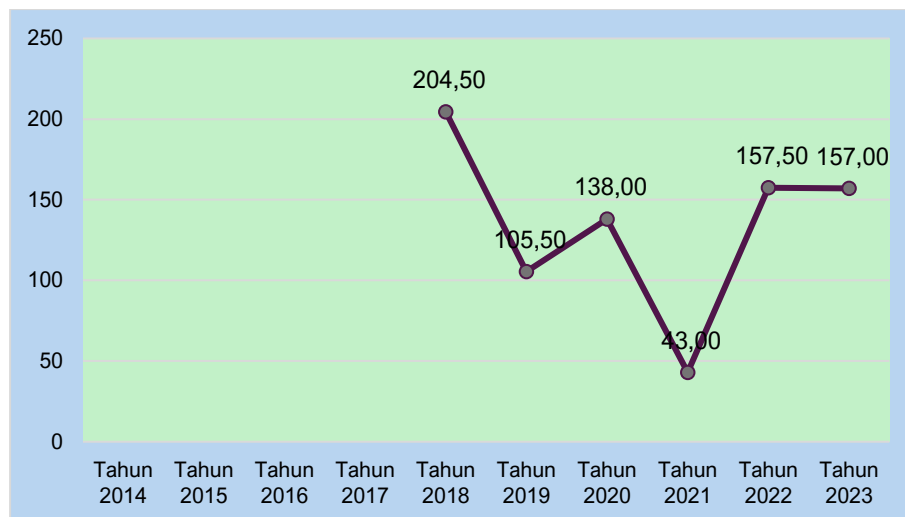
Angka penduduk dengan keluhan kesehatan Kab. PPU cukup fluktuatif pada 10 tahun terakhir. Setelah sempat menyentuh angka 28,99 di tahun 2014 dan meningkat di tahun 2015 menjadi 32,25. Tahun 2016 sampai 2020 berangsur-angsur mengalami penurunan hingga pada posisi



paling rendah di tahun 2021 yaitu sebesar 18.26. Pada tahun berikutnya (tahun 2022) angka penduduk dengan keluhan kesehatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 32,98 dan sekaligus menjadi angka tertinggi selama satu dekade terakhir. Kondisi ini diduga disebabkan oleh pengaruh cuaca yang tidak menentu, malaria dan demam berdarah sehingga berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Namun demikian, di tahun 2023, angka penduduk dengan keluhan kesehatan mulai berkurang berada diangka 23.89. Nilai ini menggambarkan bahwa program-program penanggulangan keluhan kesehatan yang dijalankan Pemerintah Daerah berkontribusi terhadap pebaikan taraf kesehatan masyarakat.

4) Rasio Bidan per 100.000 Penduduk

Data perkembangan antar waktu rasio bidan per 100.000 penduduk bersumber dari data BPS Kab PPU. Analisis perkembangan antar waktu rasio bidan per 100.000 penduduk ditunjukkan pada Gambar 3.25.



Gambar 3. 25 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidan per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2018 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

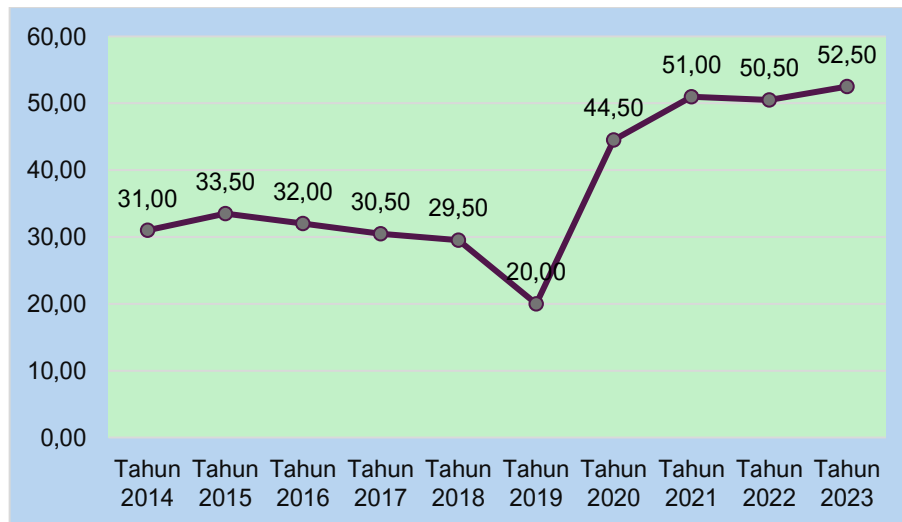
Perkembangan rasio bidan Kab. PPU dalam sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 cenderung menurun. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 204,50



per 100.000 penduduk dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 43,00. Meskipun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan, namun belum bisa menyamai angka tertinggi di tahun 2018. Hingga akhir tahun 2023, rasio bidan per 100.000 penduduk berada diangka 157,00 yang berarti setiap bidan harus melayani ± 637 orang penduduk. Pemerintah Daerah Kab. PPU telah menyiapkan berbagai program untuk membantu masyarakat. Berbagai program penanggulangan kekurangan rasio bidan telah berjalan dengan baik. Salah satu program yang dilakukan pemerintah seperti penerimaan jumlah bidan yang masif, pelatihan bidan professional dan pengurangan kelahiran di ibu hamil di rumah dan dukun kampung.

5) Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Perkembangan antar waktu rasio dokter per 100.000 penduduk selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Adapun analisis perkembangan antar waktu rasio dokter per 100.000 penduduk dapat dilihat pada Gambar 3.26.



Gambar 3. 26 Analisis Perkembangan Antar Waktu Dokter Per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Perkembangan antar waktu rasio dokter Kab. PPU sejak tahun 2014 sampai tahun 2023 menunjukkan tren yang baik. Pada tahun 2014, rasio

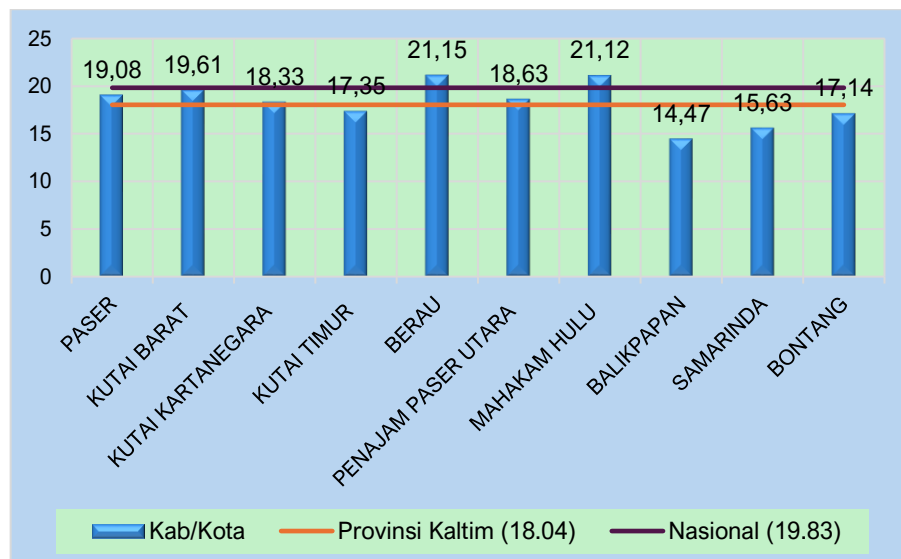


dokter per 100.000 penduduk sebesar 31.00% yang artinya setiap dokter harus melayani ± 3.226 orang penduduk. Tahun 2015, rasio dokter meningkat 2.50% dari tahun 2014 dan kemudian mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut hingga tahun 2019 terjadi nilai rasio paling rendah yaitu sebesar 20.00%. Pada tahun 2020 kembali meningkat drastis dan cenderung naik secara bertahap hingga tahun 2023. Tahun 2023, menjadi capaian terbaik selama 10 tahun terakhir dengan angka 52,50 atau setiap 1 dokter melayani ± 1.905 orang penduduk. Meskipun di tahun-tahun terakhir tercatat membaik, Pemerintah Kab. PPU sangat menyadari bahwa saat ini masih kurang memenuhi standar yang dibutuhkan dan terus berusaha menambah jumlah dokter dengan mengajukan formasi penerimaan ke pemerintah pusat.

3.4.2. Analisis Posisi Relatif

1) Angka Kematian Balita (AKB)

Analisis posisi relatif bertujuan untuk mengetahui posisi AKB Kab. PPU jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tingkat provinsi dan nasional. Hasil analisis posisi relatif dapat dilihat pada Gambar 3.27.



Gambar 3. 27 Analisis Posisi Relatif Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 KH Kab. PPU Tahun 2020

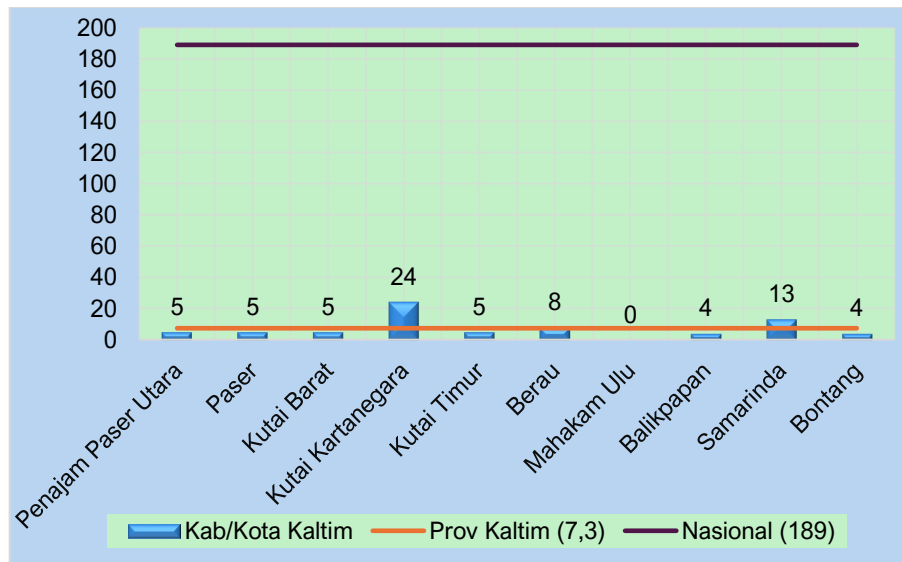
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



AKB Kab. PPU berada di posisi keempat terendah setelah Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Kutai Timur. Jika dibandingkan dengan AKB Provinsi Kaltim sebesar 18,04, maka Kab. PPU masih berada di atas nilai tersebut. Berdasarkan gambar 3.18 juga dapat diketahui bahwa AKB Kab. PPU masih berada di bawah AKB Nasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa AKB Kab. PPU cukup tinggi pada tahun 2020, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi berbagai penyebab tingginya AKB di wilayah tersebut. Hasil identifikasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program-program bidang kesehatan, khususnya untuk mengurangi tingkat AKB di Kab. PPU.

2) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

Analisis posisi relatif AKI bertujuan untuk mengetahui posisi AKI Kab. PPU jika dibandingkan dengan Kab/kota lainnya, tingkat provinsi dan nasional. Gambar 3.28 menunjukkan analisis posisi relatif AKI pada tahun 2023.



Gambar 3. 28 Analisis Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Kab. PPU Tahun 2022

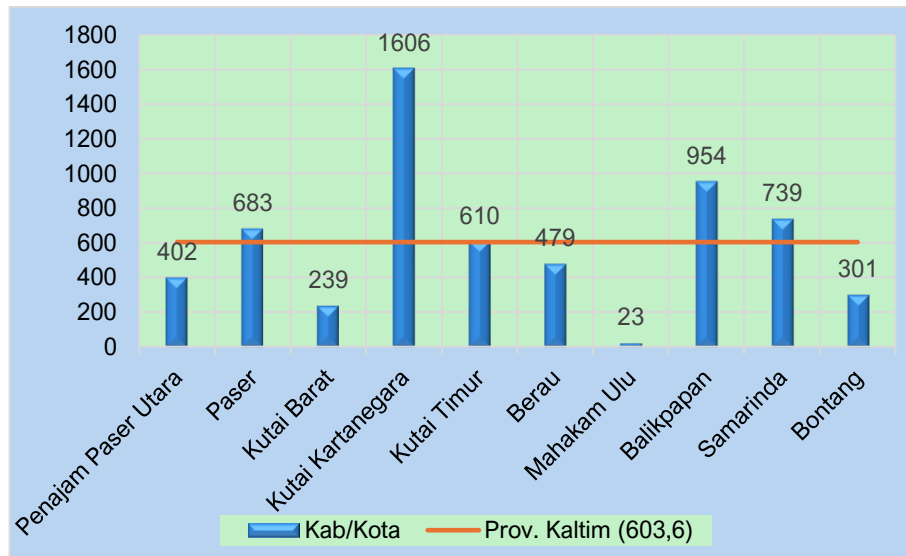
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2023.



Analisis posisi relatif AKI per 100.000 KH Kab. PPU untuk tahun 2022 masih berada di bawah angka nasional dan angka rata-rata Prov. Kaltim. Rasio AKI Kab. PPU adalah sebesar 5 kasus per 100.000 penduduk, sementara Prov. Kaltim sebesar 7,3 kasus dan nasional sebesar 189 kasus. Jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya, Kab. PPU berada di urutan 4 sejajar dengan Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, dan Kab. Kutai Timur dengan 5 kasus. AKI terbanyak terjadi di Kab. Kutai Kartanegara dengan 24 kasus, Kota Samarinda dengan 13 kasus dan Kab. Berau dengan 8 kasus. Ketiga kab/kota tersebut juga berada di atas rata-rata AKI Prov. Kaltim. Sedangkan kab/kota lainnya berada di bawah Kab. PPU dengan masing-masing 4 kasus di Kota Balikpapan dan Kota Bontang serta 0 kasus di Kab. Mahakam Ulu. Dengan demikian, AKI Kab. PPU relatif lebih baik karena berada di bawah angka nasional, rata-rata prov. Kaltim dan beberapa kab/kota lainnya. Kendati demikian, perhatian penanganan kasus AKI harus tetap menjadi perhatian serius untuk menghindari kematian yang disebabkan oleh kematian ibu selama proses kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah persalinan.

3) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita

Analisis posisi relatif prevalensi balita gizi kurang bertujuan untuk mengetahui posisi prevalensi balita gizi kurang Kab. PPU jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya dan tingkat provinsi. Analisis posisi relatif belum dilakukan secara efektif karena hanya membandingkan dengan tingkat provinsi saja karena keterbatasan data nasional. Selain itu, perbandingan juga hanya berdasarkan jumlah kasus per wilayah bukan jumlah rasio, sehingga mengabaikan variabel jumlah penduduk masing-masing wilayah. Hasil analisis prevalensi balita gizi kurang Kab. PPU menunjukkan posisi yang baik dengan jumlah kasus berada di bawah nilai rata-rata Prov. Kaltim, yaitu sebesar 402 kasus berbanding 603,6 kasus. Analisis posisi relatif prevalensi balita gizi kurang secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.29.



Gambar 3. 29 Analisis Posisi Relatif Prevalensi Balita Gizi Kurang (Kasus) Kab. PPU Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

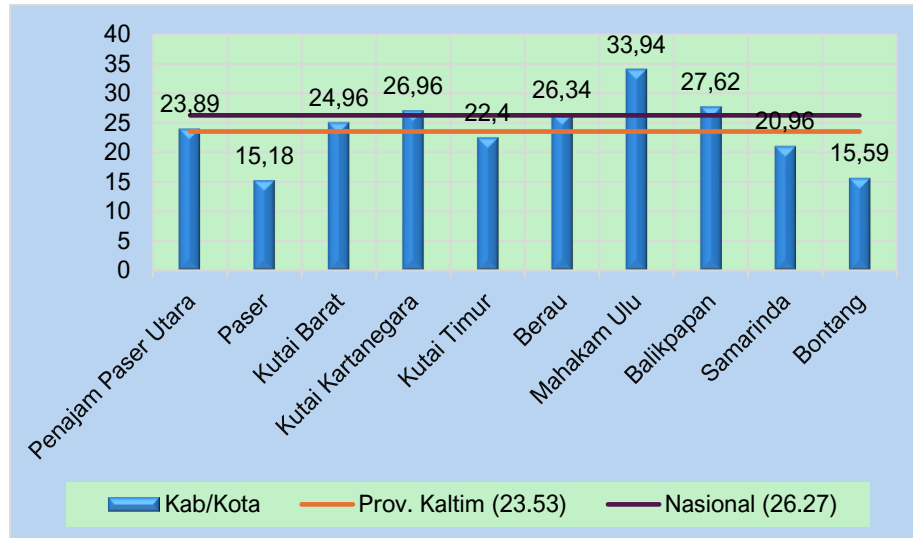
Berdasarkan Gambar 3.29 juga dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya maka Kab. PPU berada di urutan 4 di bawah Kota Bontang sebanyak 301 kasus, Kab. Kutai Barat sebanyak 239 kasus dan Mahakam Ulu sebanyak 23 kasus. Sedangkan kab/kota lainnya memiliki jumlah kasus gizi kurang pada balita di atas Kab. PPU seperti Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 1.606 kasus, Kota Balikpapan sebanyak 954 kasus, Kota Samarinda sebanyak 739 kasus, Kab. Paser sebanyak 683, Kab. Kutai Timur sebanyak 610 kasus dan Kab. Berau sebanyak 479 kasus. Dengan demikian, balita gizi kurang Kab. PPU relatif lebih baik karena berada di bawah angka prov. Kalimantan Timur dan beberapa kab/kota lainnya.

4) Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)

Analisis posisi relatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur posisi nilai penduduk dengan keluhan kesehatan Kab. PPU jika dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya, Provinsi Kaltim dan Nasional.



Analisis posisi relatif penduduk dengan keluhan kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.30.



Gambar 3. 30 Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. PPU Tahun 2023

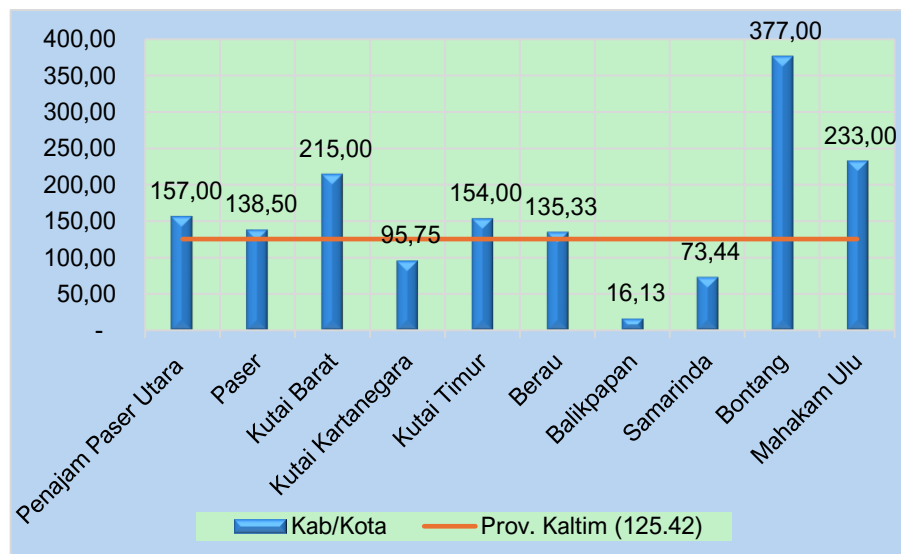
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Analisis posisi relatif angka penduduk dengan keluhan kesehatan Kab. PPU untuk tahun 2023 berada di bawah angka nasional sebesar 26.27% dan di atas angka Prov. Kaltim sebesar 23.53%. Jika dibandingkan dengan Kab/Kota Kalimantan Timur, Kab. PPU berada di urutan 5 di atas Kab. Paser sebesar 15,18%, Kota Bontang sebesar 15,59%, Kota Samarinda sebesar 20,96% dan Kab. Kutai Timur sebesar 22,40%. Sedangkan untuk kab/kota lainnya memiliki jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan lebih tinggi dari pada Kab. PPU seperti kab. Kutai Barat sebesar 24,96%, Kab. Berau sebesar 26,34%, Kab. Kutai Kartanegara sebesar 26,96%, Kota Balikpapan sebesar 27,62% dan Kab. Mahakam Ulu sebesar 33,94%. Ini berarti keluhan kesehatan di Kab. PPU masih relatif tinggi untuk tingkat provinsi sehingga membutuhkan perhatian lebih dan memicu kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan serta memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.



5) Rasio Bidan per 100.000 Penduduk

Analisis posisi relatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur posisi nilai rasio bidan per 100.000 penduduk Kab. PPU jika dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya, Prov. Kaltim. Analisis belum dilakukan secara efektif karena hanya membandingkan dengan tingkat provinsi saja karena keterbatasan data nasional. Analisis posisi relatif rasio bidan per 100.000 penduduk dapat dilihat pada Gambar 3.31.



Gambar 3. 31 Analisis Posisi Relatif Bidan Per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

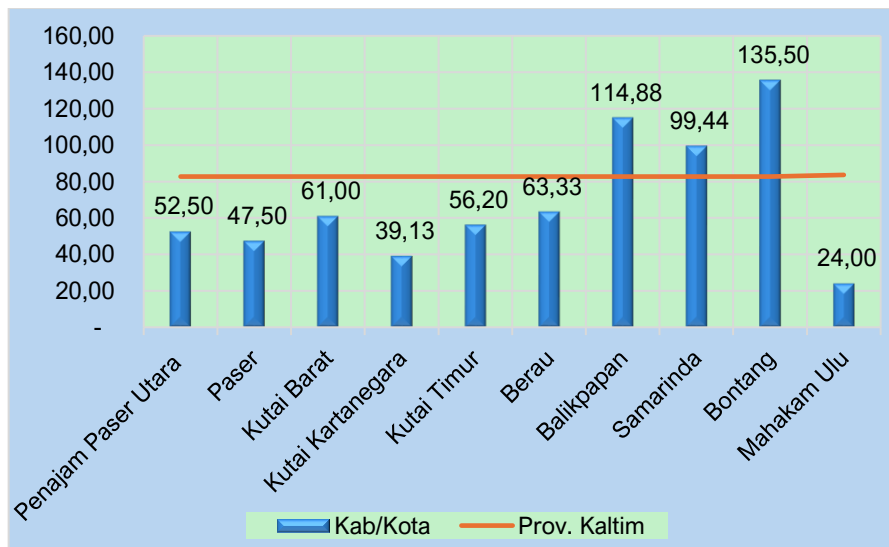
Analisis posisi relatif pada gambar 3.31 menunjukkan posisi relatif bidan per 100.000 penduduk Kab. PPU untuk tahun 2023 berada di atas angka Prov. Kaltim. Rasio bidan Kab. PPU adalah sebesar 157.00, sementara Provinsi Kaltim adalah sebesar 125,42. Jika dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya, Kab. PPU berada di urutan 4 dengan rasio bidan di atas Kota Balikpapan dengan nilai 16,13, Kota Samarinda dengan nilai 73,44, Kab. Kutai Kartanegara dengan nilai 95,75, Kab. Berau dengan nilai 135,33, Kab. Paser dengan nilai 138.50, Kab. Kutai Timur dengan nilai 154,00. Kab. PPU hanya berada di bawah Kab. Kutai Barat dengan nilai 215,00, Kab. Mahakam Ulu dengan nilai 233,00 dan Kota Botang dengan



nilai rasio tertinggi sebesar 377,00. Dengan demikian, rasio bidan di Kab. PPU relatif baik dengan mampu melampaui rasio Prov. Kalimantan Timur dan mampu bersaing dengan kab/kota lainnya.

6) Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Analisis posisi relatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur posisi nilai rasio dokter per 100.000 penduduk Kab. PPU jika dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya, Prov. Kaltim. Karena banyaknya keterbatasan data, khususnya data nasional maka analisis posisi relatif belum bisa dilakukan secara efektif. Analisis posisi relatif rasio dokter per 100.000 penduduk dapat dilihat pada Gambar 3.32.



Gambar 3. 32 Analisis Posisi Relatif Dokter Per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Analisis posisi relatif dokter per 100.000 penduduk Kab. PPU untuk tahun 2023 berada di bawah angka Prov. Kaltim. Rasio dokter Kab. PPU adalah sebesar 52.50, sementara Provinsi Kaltim adalah sebesar 82,75. Jika dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya, Kab. PPU juga berada di urutan 7 rasio dokter tertinggi atau urutan 4 terendah. Kab. PPU hanya lebih baik atas 3 kab/kota lainnya yaitu Kab. Paser dengan nilai 47,50, Kab. Kutai Kartanegara dengan nilai 39,13 dan Kab. Mahakam Ulu dengan nilai 24,00.

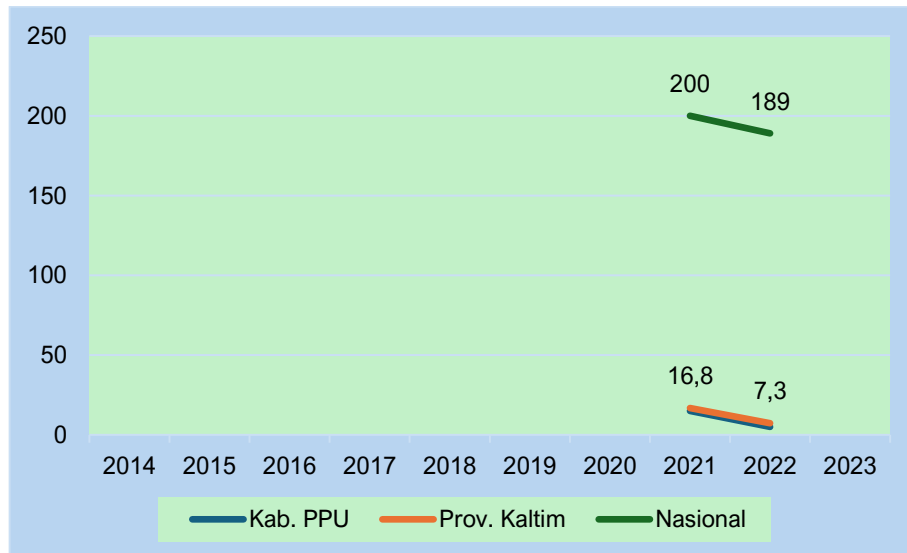


Dengan demikian, rasio dokter di Kab. PPU relatif kecil jika dibandingkan dengan Prov. Kaltim dan kab/kota lainnya. Kondisi ini membutuhkan perhatian yang lebih mengingat dokter menjadi indikator penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

3.4.3. Analisis Relativitas

1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat relativitas nilai Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. PPU terhadap Prov. Kaltim dan Nasional selama beberapa tahun terakhir. Analisis relativitas AKI secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.33.



Gambar 3. 33 Analisis Relativitas Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

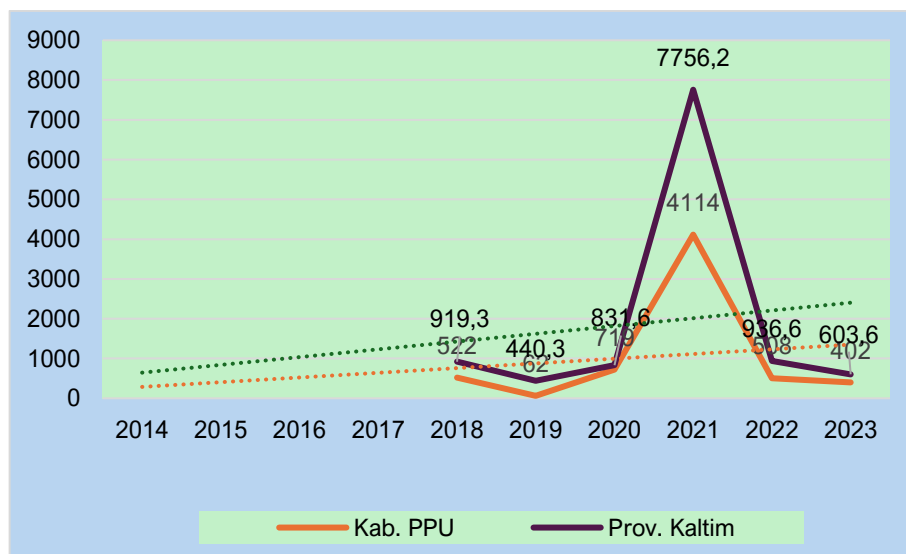
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Analisis AKI Kab. PPU terhadap Provinsi dan Nasional dilakukan hanya untuk tahun 2021 dan 2022. Masa amatan yang singkat dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh untuk tahun lainnya. Nilai AKI Kab. PPU menunjukkan penurunan dari tahun 2021 ke 2022. Pola penurunan ini juga terjadi pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.



2) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita (%)

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat relativitas nilai Prevalensi Balita Gizi Kurang Kab. PPU terhadap Prov. Kaltim dan Nasional selama beberapa tahun terakhir. Analisis relativitas prevalensi balita gizi kurang Kab. PPU dilakukan dari tahun 2018 sampai 2023 terhadap Provinsi Kalimantan Timur. Perbandingan tingkat nasional tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh. Nilai balita gizi kurang Kab. PPU relatif konsisten dari tahun 2018 ke tahun 2020 dan meningkat signifikan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 hingga 2023, angka balita gizi kurang kembali menurun. Pola dan proporsi perubahan yang terjadi pada Kab. PPU serupa dengan yang terjadi pada tingkat provinsi meskipun ada perbedaan nilai yang lebih tinggi pada tahun 2021. Analisis relativitas Prevalensi Balita Gizi Kurang secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.34.



Gambar 3. 34 Analisis Relativitas Balita Gizi Kurang (Kasus) Kab. PPU Tahun 2002 - 2020

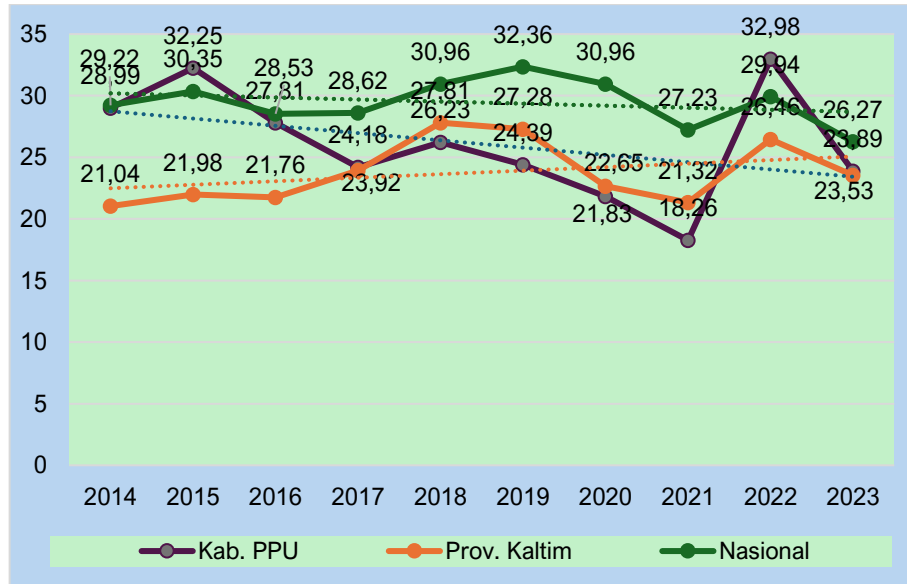
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3) Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat relativitas nilai Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Kab. PPU terhadap Prov. Kaltim dan



Nasional selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai tahun 2023. Analisis relativitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.35.



Gambar 3. 35 Analisis Relativitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

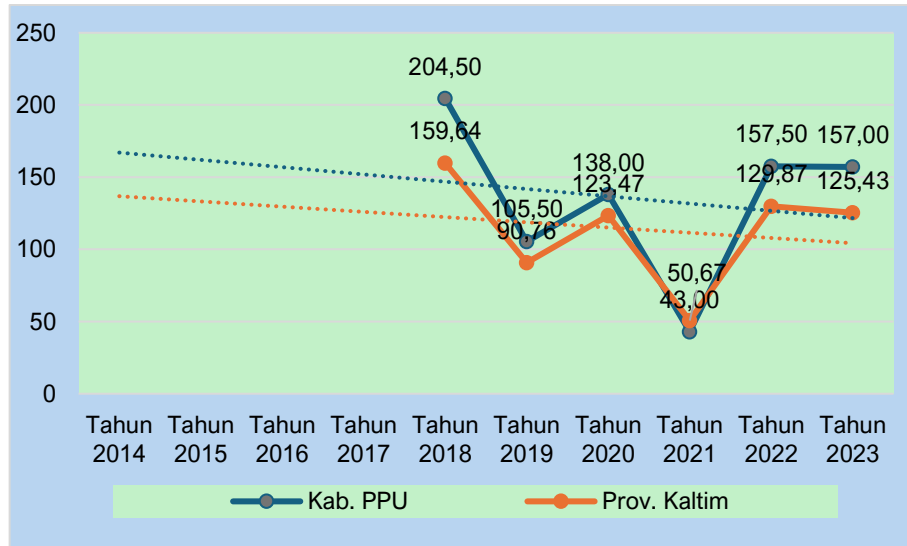
Nilai penduduk dengan keluhan Kab. PPU pada tahun 2014 berada diangka 28,99% dan sedikit meningkat di tahun 2015. Pola penurunan terjadi hingga tahun 2021 dengan angka 18,26%. Pada tahun 2022 kembali meningkat drastis dan menurun di tahun 2023. Pola perubahan yang terjadi di Kab. PPU berbeda dengan yang terjadi di tingkat Prov. Kaltim dan tingkat Nasional. Pola yang terjadi di tingkat Prov. Kaltim sejalan dengan yang terjadi di tingkat nasional. Angka penduduk dengan keluhan kesehatan dari 2014 sampai 2023 relatif stabil dan tidak terdapat perubahan grafik yang signifikan seperti yang terjadi di Kab. PPU tahun 2022.

4) Rasio Bidan per 100.000 Penduduk

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat relativitas nilai rasio bidan per 100.000 penduduk Kab. PPU terhadap Prov. Kaltim dan Nasional



selama beberapa tahun terakhir. Analisis relativitas rasio bidan per 100.000 penduduk secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.36.



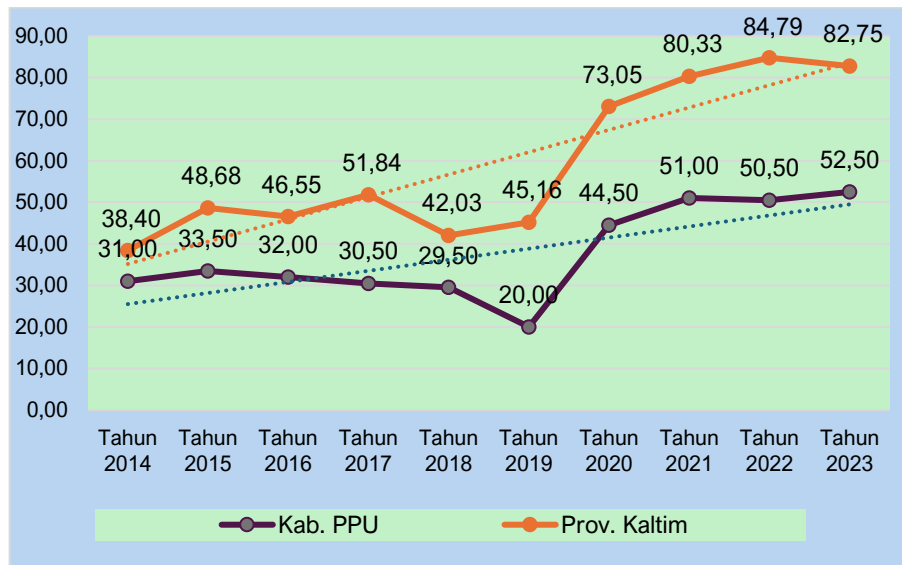
Gambar 3. 3 Analisis Relativitas Bidan Per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Analisis relativitas bidan per 100.000 penduduk Kab. PPU dilakukan dari tahun 2018 sampai 2023 terhadap Prov. Kaltim. Perbandingan tingkat nasional tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh. Nilai rasio bidan Kab. PPU mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan pola naik turun dan cenderung stabil ke tahun 2023. Pola dan proporsi perubahan yang terjadi pada Kab. PPU serupa dengan yang terjadi pada tingkat provinsi.

5) Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat relativitas nilai rasio dokter per 100.000 penduduk Kab. PPU terhadap Prov. Kaltim dan Nasional selama beberapa tahun terakhir. Analisis relativitas rasio dokter per 100.000 penduduk secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.37.



Gambar 3. 4 Analisis Relativitas Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

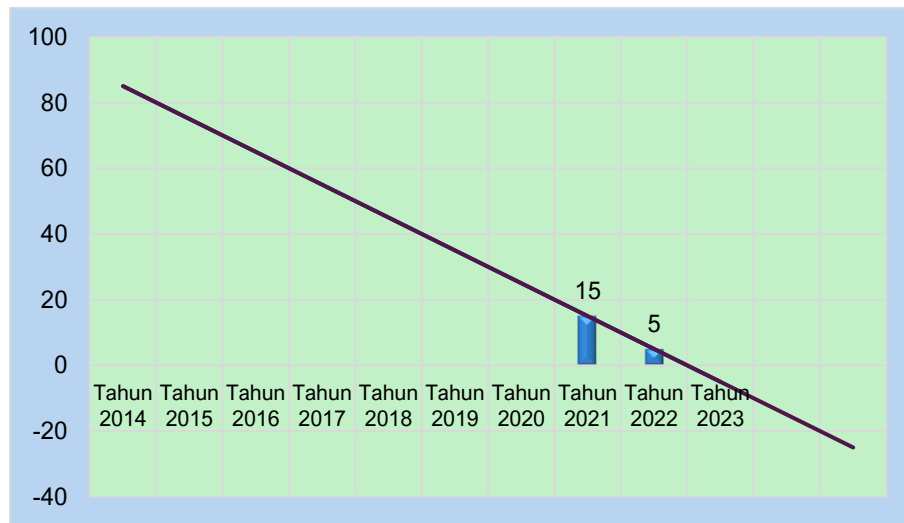
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Analisis relativitas dokter per 100.000 penduduk Kab. PPU dilakukan dari tahun 2018 sampai 2023 terhadap Prov. Kaltim. Perbandingan tingkat nasional tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh. Nilai rasio dokter Kab. PPU mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2023, meskipun pada tahun 2018 dan 2019 sempat turun. Pola dan proporsi perubahan yang terjadi pada Kab. PPU serupa dengan yang terjadi pada tingkat provinsi.

3.4.4. Analisis Efektivitas

1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Analisis efektivitas bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan program yang dijalankan pemerintah mampu menanggulangi atau mengurangi AKI yang terjadi di daerah tersebut. Semakin efektif program yang dilaksanakan, maka tren AKI akan semakin menurun. Analisis efektivitas AKI dapat dilihat pada Gambar 3.38.



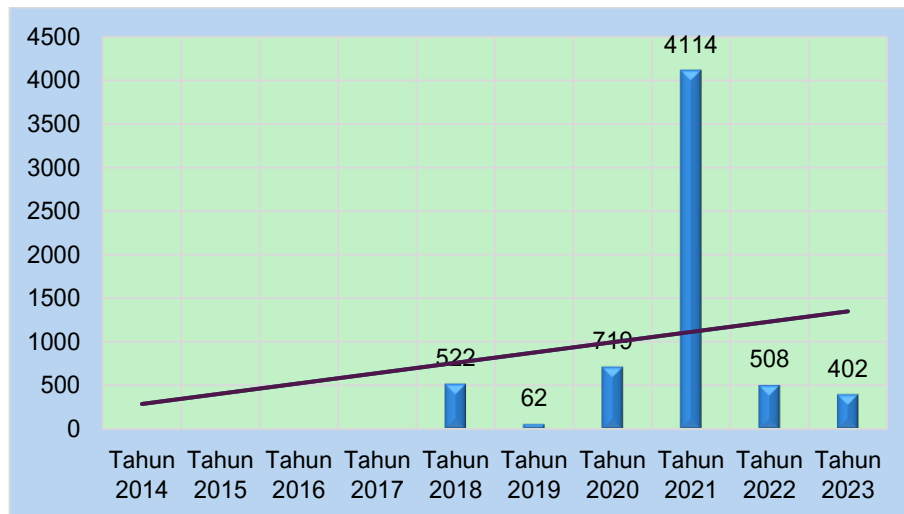
Gambar 3. 38 Analisis Efektifitas Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Gambar 3.38 hanya menunjukkan nilai AKI Kab. PPU dari tahun 2021 dan 2022. Analisis efektifitas AKI belum bisa dilakukan secara maksimal karena tidak terdapat data yang cukup sebagai data pembandingan. Nilai efektifitas AKI Kab. PPU pada tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan. Pola yang terbentuk mengindikasikan tren menurun untuk tahun berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan/program-program kesehatan pemerintah daerah berdampak pada perbaikan indikator AKI yang dilaksanakan selama ini mulai efektif.

2) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita

Analisis efektifitas bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan program yang dijalankan pemerintah mampu menanggulangi atau mengurangi prevalensi balita gizi kurang yang terjadi di daerah tersebut. Semakin efektif program yang dilaksanakan, maka tren prevalensi balita gizi kurang akan semakin menurun. Analisis efektifitas prevalensi balita gizi kurang dapat dilihat pada Gambar 3.39.



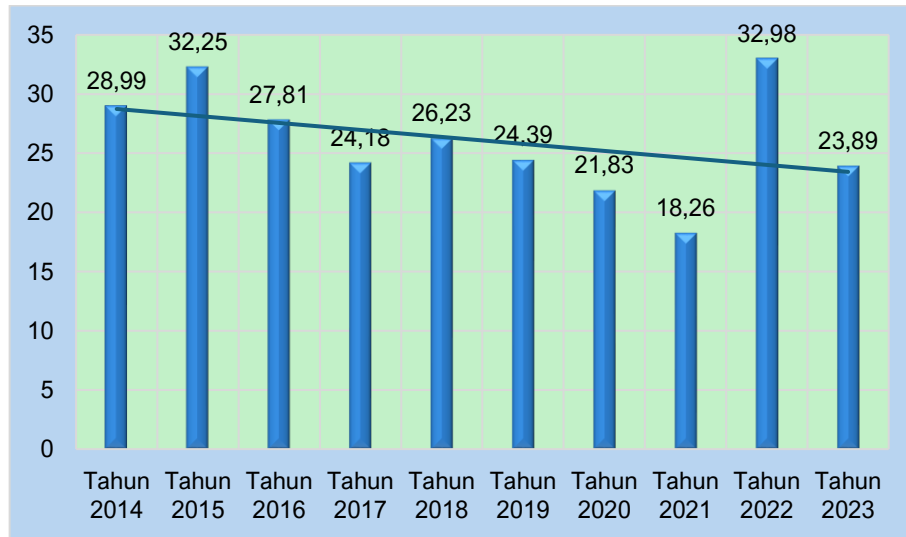
Gambar 3. 39 Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Gizi Kurang (Kasus) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Gambar 3.39 menunjukkan nilai prevalensi balita gizi kurang Kab. PPU dari tahun 2018 sampai 2023. Indikator gizi kurang pada balita akan mengarah pada kondisi ketahanan pangan dalam upaya perbaikan gizi keluarga. Tahun 2018 ke tahun 2019, jumlah kasus gizi kurang mengalami penurunan dan kemudian kembali meningkat drastis hingga tahun 2021. Meskipun garis tren menunjukkan pola peningkatan, tapi tahun 2022 jumlah kasus gizi kurang kembali menurun hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa program yang mengarah kepada penurunan angka balita gizi kurang sudah mulai berjalan efektif.

3) Penduduk dengan Keluhan Kesehatan

Analisis efektivitas bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan program yang dijalankan pemerintah mampu menanggulangi atau mengurangi Penduduk dengan Keluhan Kesehatan yang terjadi di daerah tersebut. Semakin efektif program yang dilaksanakan, maka tren penduduk dengan keluhan kesehatan akan semakin menurun. Analisis efektivitas penduduk dengan keluhan kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.40.



Gambar 3. 40 Analisis Efektifitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

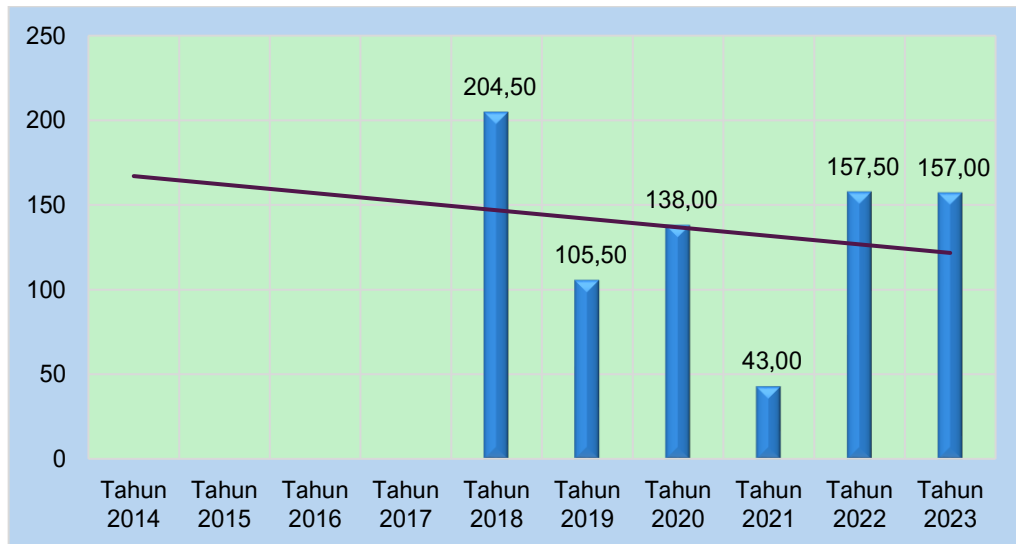
Gambar 3.40 menyajikan analisis efektivitas penduduk dengan keluhan Kesehatan Kab. PPU dari tahun 2014 sampai 2023. Secara kumulatif perkembangan penduduk dengan keluhan kesehatan selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan meskipun di tahun 2015 dan tahun 2022 mengalami peningkatan dari rata-rata tahun lainnya serta menjadikan tahun 2022 sebagai tahun dengan rasio tertinggi dari keseluruhan tahun amatan. Kendatipun pola pertumbuhan kumulatif menunjukkan tren yang menurun, angka 23,89% pada tahun 2023 masih tergolong tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan kesehatan pemerintah Kab. PPU cukup positif namun belum maksimal dalam mengurangi persentase jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan.

4) Rasio Bidan per 100.000 Penduduk

Analisis efektivitas bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan program yang dijalankan pemerintah mampu menanggulangi rasio bidan per 100.000 penduduk yang terjadi di daerah tersebut. Semakin efektif program yang dilaksanakan, maka tren rasio bidan per 100.000 penduduk



akan semakin baik. Analisis efektivitas rasio bidan per 100.000 penduduk dapat dilihat pada Gambar 3.41.



Gambar 3. 41 Analisis Efektifitas Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

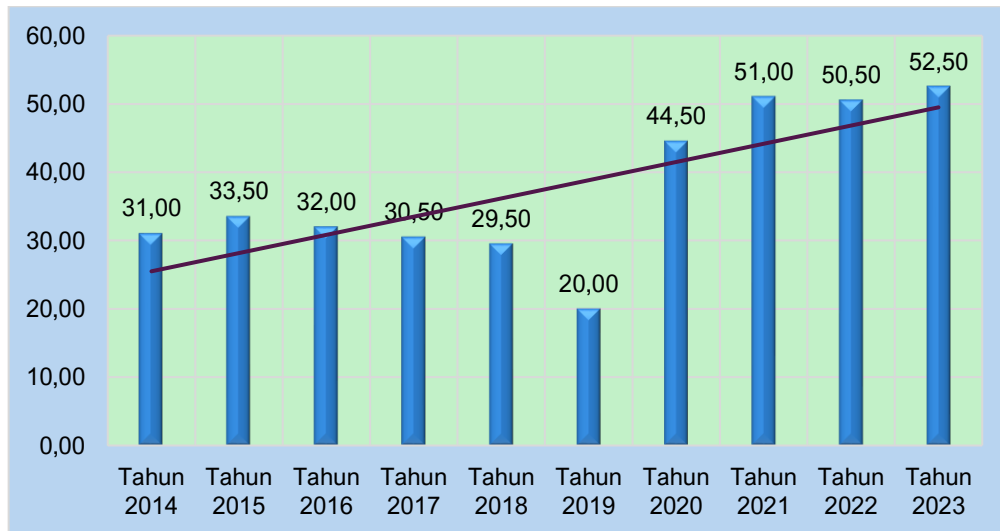
Gambar 3.41 menyajikan analisis efektivitas bidan per 100.000 penduduk di Kab. PPU dari tahun 2018 sampai 2023. Pola perkembangan rasio bidan selama 6 tahun mengalami fluktuatif dan secara kumulatif mengalami tren penurunan. Nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 204,50 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 43,00. Tren menurunnya rasio bidan terhadap jumlah penduduk dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi serius bagi kesehatan ibu dan anak terutama di daerah dengan tingkat kesehatan yang rendah dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.

5) Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Analisis efektivitas bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan program yang dijalankan pemerintah mampu menanggulangi rasio dokter per 100.000 penduduk yang terjadi di daerah tersebut. Semakin efektif program yang dilaksanakan, maka tren rasio dokter per 100.000 penduduk



akan semakin baik. Analisis efektivitas rasio dokter per 100.000 penduduk dapat dilihat pada Gambar 3.42.



Gambar 3. 42 Analisis Efektifitas Rasio Dokter per 1.000 Penduduk Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Gambar 3.42 menyajikan analisis efektivitas dokter per 100.000 penduduk di Kab. PPU dari 2014 sampai 2023. Pola perkembangan rasio dokter secara umum mengalami tren peningkatan meskipun diagram menunjukkan angka yang relatif berubah naik dan turun setiap tahunnya. Nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 52,50 dan terendah pada tahun 2019 sebesar 20,00. Hasil indikator ini mengindikasikan intervensi program-program pemerintah Kab. PPU dalam bidang Kesehatan menunjukkan hasil yang efektif.

3.5. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Undang-undang mengamanatkan Pemerintah untuk menyediakan Pendidikan bagi setiap warga negara. Anggaran Pendidikan merupakan prioritas pemerintah yang wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah. Lebih lanjut, *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-empat juga menjelaskan bahwa negara-negara secara global harus



memastikan penyediaan pendidikan yang inklusif dengan kualitas yang sama.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi untuk memberikan keterampilan dan mengembangkan bakat peserta didik agar mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pemerataan akses dan peningkatan kualitas Pendidikan sangat diperlukan dalam rangka menciptakan persaingan yang adil.

Untuk mengetahui tingkat pemerataan Pendidikan, terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Buta Huruf. Berdasarkan ketersediaan data yang diperoleh, maka analisis yang dapat dilakukan untuk menganalisis indikator Pendidikan hanya empat jenis, yaitu: analisis perkembangan antar waktu, analisis posisi relatif, analisis relativitas, analisis efektivitas, dan analisis prioritas bidang.

3.5.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI, SLTP/ MTs dan SLTA/ MA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang menunjukkan besaran jumlah siswa yang ditampung dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkat sekolah yang bersangkutan di Kab. PPU. APK merupakan ukuran yang menunjukkan Tingkat partisipasi penduduk dalam Pendidikan formal. Gambar 3.43 sampai Gambar 3.45 menunjukkan perkembangan angka partisipasi kasar untuk setiap jenjang Pendidikan.

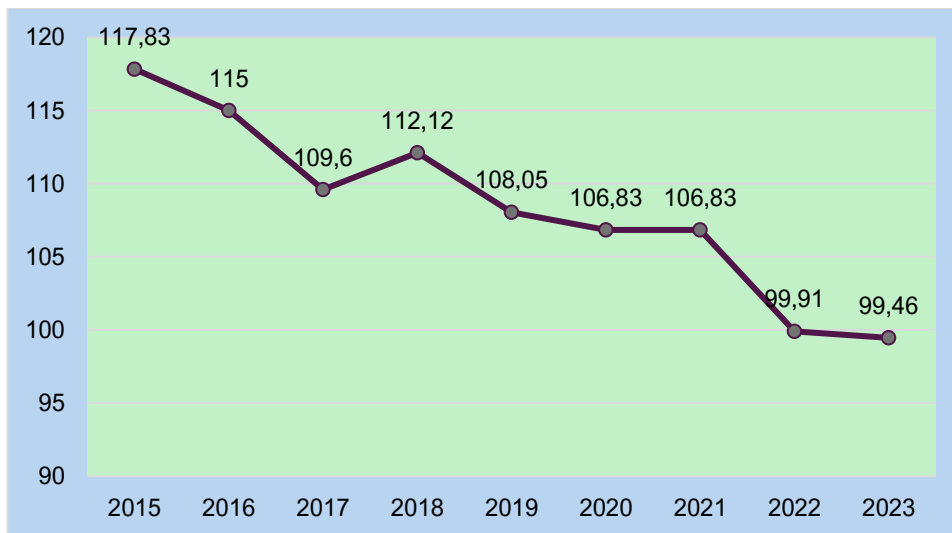
Gambar 3.43 menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar pada jenjang SD/ MI dari tahun 2015 sampai 2023 mengalami penurunan. Tahun 2015 nilai APK adalah 117.83 turun menjadi 99,46. Kenaikan nilai APK hanya terjadi pada tahun 2018. Hasil ini menunjukkan bahwa program-program Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kab. PPU belum mampu menaikkan Tingkat partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI.

Angka Partisipasi Kasar jenjang SLTP/ MTs mengalami perkembangan yang fluktuatif. Gambar 3.44 menunjukkan bahwa nilai APK



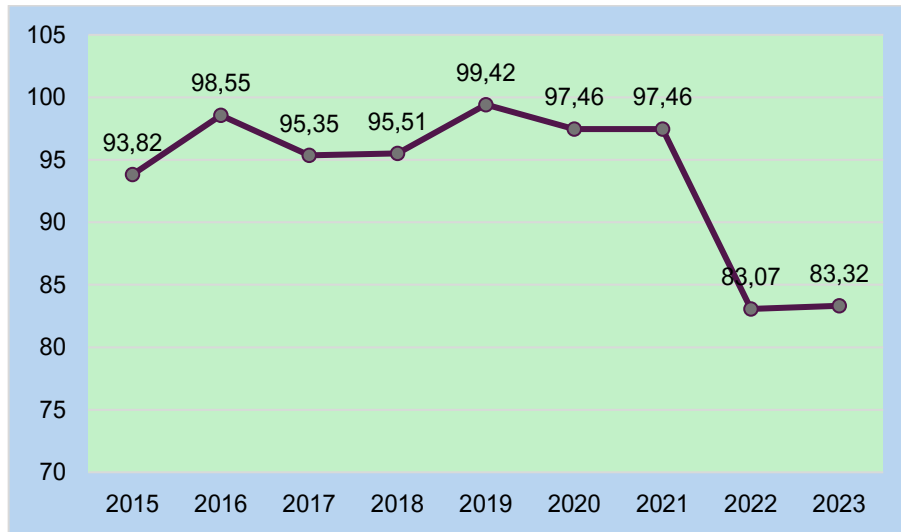
tahun 2015 sebesar 93,82 dan meningkat sebesar 98.55 pada tahun 2016. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 83,07. Hasil ini mengindikasikan bahwa harapan kab PPU untuk meningkatkan nilai APK belum terealisasi. Perkembangan angka partisipasi kasar pada jenjang SLTA/ MA pada Gambar 3.45 juga menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Tahun 2015 APK bernilai 74,6 kemudian meningkat sampai puncak tertinggi di tahun 2017 sebesar 95,67. Nilai APK terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 70,11. Namun demikian, terjadi kenaikan Kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 76,47.

Secara umum nilai APK pada semua jenjang pendidikan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa program-program pemerintah dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan masih belum efektif. Pemerintah perlu mengevaluasi dan mengembangkan program-program untuk meningkatkan angka partisipasi kasar di tahun-tahun berikutnya.



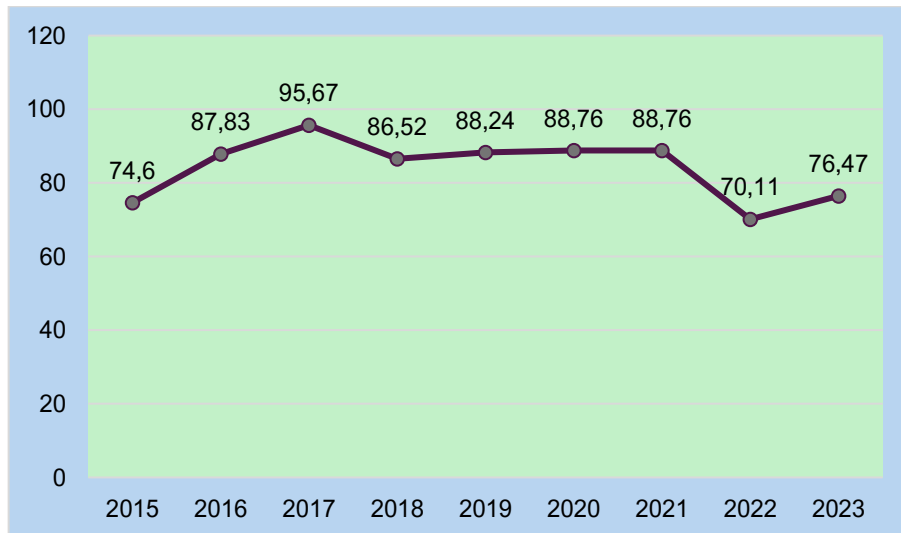
Gambar 3. 43 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 44 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/MTs kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 45 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/MA (%) Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

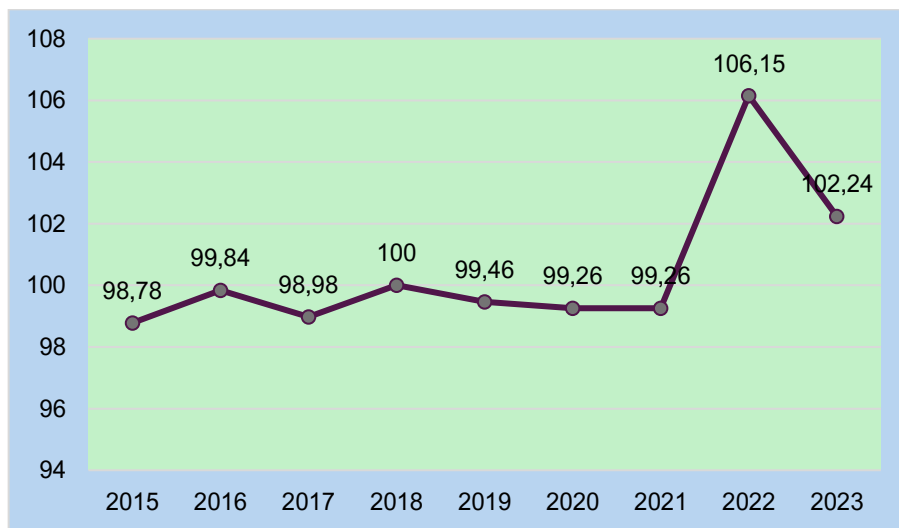
2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI, SLTP/ MTs dan SLTA/ MA

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan



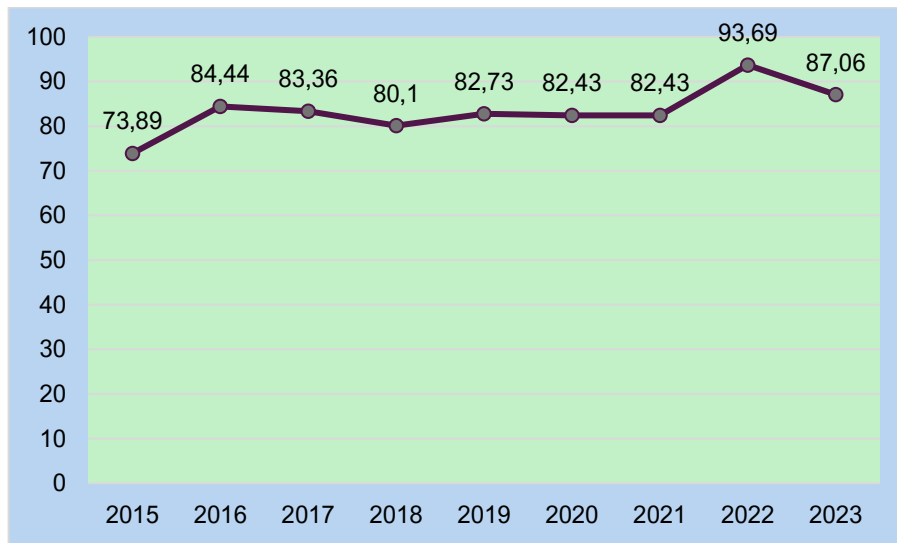
dengan penduduk usia yang sesuai. Angka APM ditunjukkan dalam persentase. Gambar 3.46 sampai Gambar 3.48 menunjukkan perkembangan angka partisipasi murni untuk setiap kelompok usia pendidikan.

Gambar 3.46 menunjukkan bahwa angka partisipasi murni pada jenjang SD/ MI dari tahun 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2015 nilai APM adalah 98,78 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 102,24. Kenaikan nilai APK tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 106,15. Namun demikian, nilai tersebut kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 102,24. Hasil dari indikator ini menunjukkan bahwa program-program Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kab. PPU mampu menaikkan Tingkat partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI.



Gambar 3. 46 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

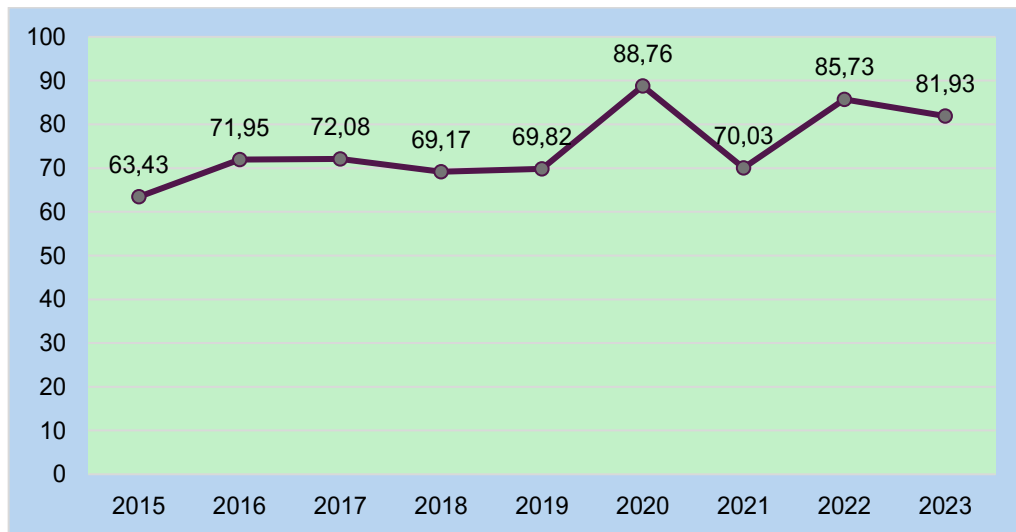


Gambar 3. 5 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/MTs Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Angka Partisipasi murni jenjang SLTP/MTs mengalami perkembangan yang meningkat. Gambar 3.47 menunjukkan bahwa nilai APM tahun 2015 sebesar 71,89 dan meningkat sebesar 87, 06 pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi tajam terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 93,69. Berdasarkan indikator APM mengindikasikan bahwa harapan kab PPU untuk meningkatkan nilai APM telah tercapai.

Perkembangan angka partisipasi murni pada jenjang SLTA/MA menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif (Gambar 3.48). Tahun 2015 APM bernilai 63,43 kemudian meningkat sampai puncak tertinggi di tahun 2020 sebesar 88,76. Setelah tahun 2020 nilai APM menurun tajam di tahun 2021 dan kemudian meningkat di atas angka 80.



Gambar 3. 68 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

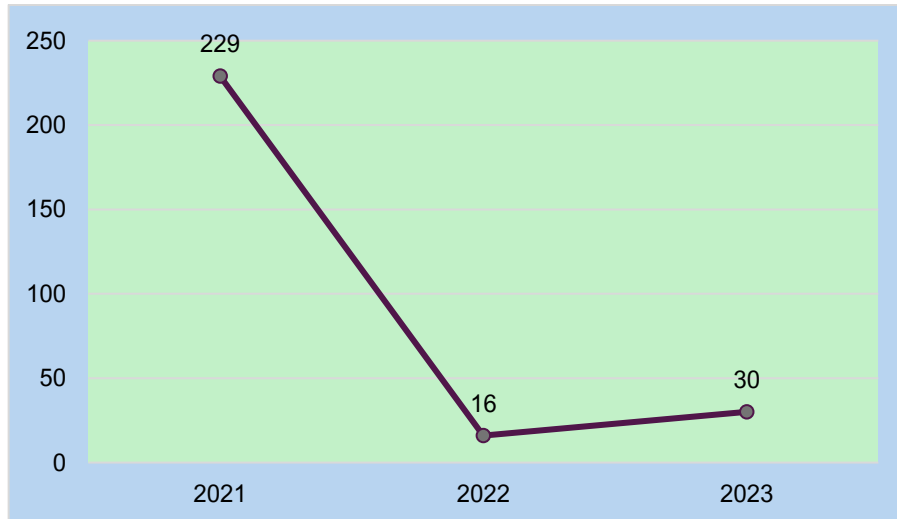
Secara umum nilai APM pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan indikator APM mengindikasikan bahwa program-program pemerintah kab. PPU dalam meningkatkan keikutsertaan Masyarakat dalam Pendidikan cukup efektif. Pemerintah perlu mempertahankan dan mengembangkan program-program untuk meningkatkan angka partisipasi murni di tahun-tahun mendatang.

3) Jumlah Putus Sekolah SD/ MI, SLTP/ MTs dan SLTA/ MA

Jumlah putus sekolah pada tiap jenjang SD/ MI, SLTP/ MTs dan SLTA/ MA menunjukkan angka yang sangat Baik. Pada usia 7-12 tahun, penurunan jumlah putus sekolah tahun 2022 bahkan mencapai di atas 90%. Walaupun terjadi peningkatan Kembali pada tahun 2023 sejumlah 30 siswa (Gambar 3.49). Pola yang sama juga terjadi pada jenjang SLTP/ MTs. Jumlah angka putus sekolah tahun 2021 adalah 224 siswa dan menurun sebesar 27 orang. Nilai penurunan tersebut sangat signifikan di atas 85%. Namun demikian, jumlah putus sekolah meningkat Kembali pada tahun 2023 sejumlah 31 siswa (Gambar 3.50). Pada tingkat SLTA/ MA, tidak ada

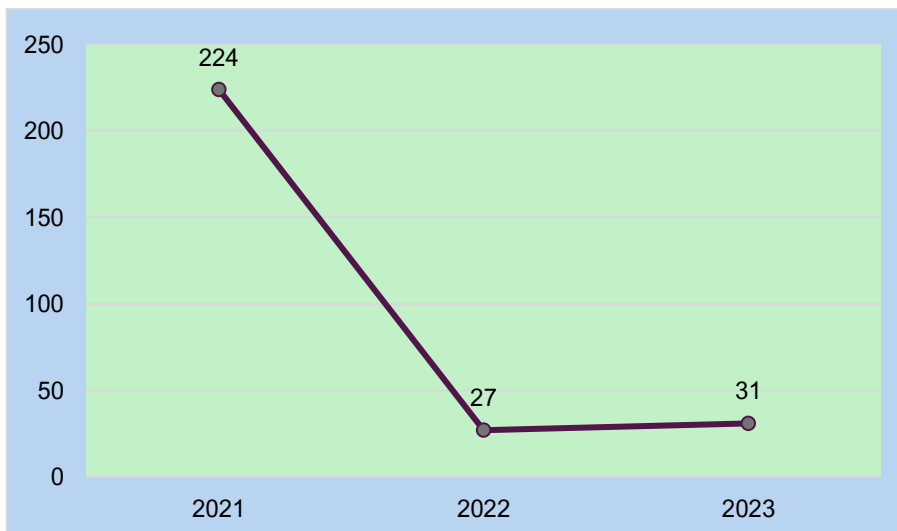


siswa yang mengalami putus sekolah baik pada tahun 2021 dan 2022 (Gambar 3.51).



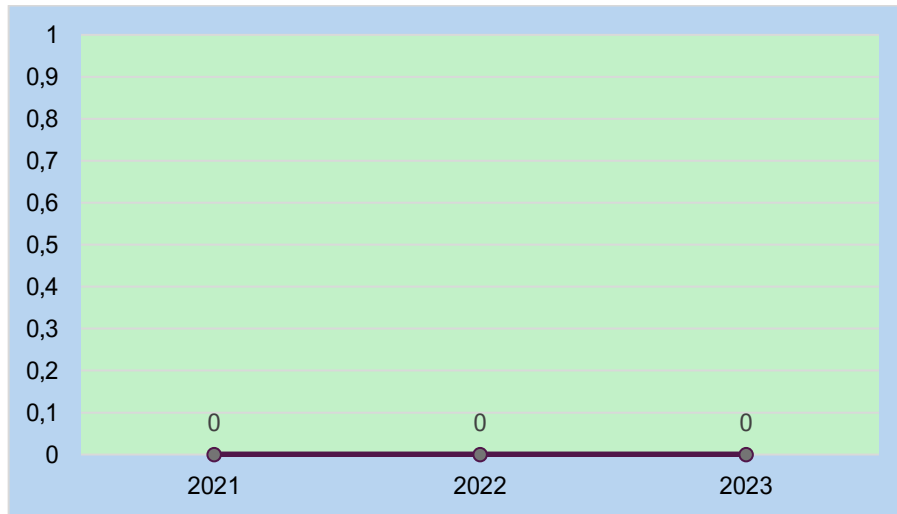
Gambar 3. 79 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun Kab. PPU Tahun 2021 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 50 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Putus Sekolah Usia 13-15 Tahun Kab. PPU Tahun 2021 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 51 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Putus Sekolah Usia 16-18 Tahun Kab. PPU Tahun 2021 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.5.2. Analisis Posisi Relatif

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA

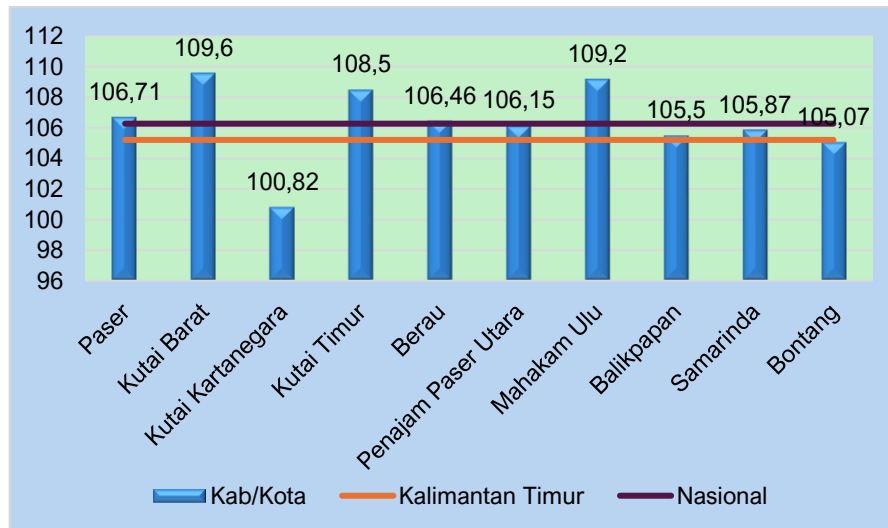
Perbandingan posisi relatif angka partisipasi kasar SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA Kab. PPU dengan kab/kota lain, provinsi dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 3.52 sampai 3.54. Gambar 3.52 menunjukkan posisi relatif angka partisipasi kasar pada jenjang SD/MI Kab. PPU dalam bandingannya dengan kab/kota lain, provinsi dan nasional. APK Kab. PPU lebih tinggi dibandingkan dengan Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda dan Bontang, tetapi lebih rendah dibandingkan Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Paser. APK Kab. PPU masih lebih tinggi dari APK provinsi dan hampir sama dengan APK Nasional.

Posisi relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SLTP/MTs Kab. PPU dibandingkan kab/kota, provinsi dan Nasional disajikan pada Gambar 3.53. Gambar tersebut menunjukkan bahwa APK Kab. PPU masih lebih tinggi dibandingkan Paser, Kutai Barat, Kutai timur, Berau, Balikpapan, Samarinda dan Bontang, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan



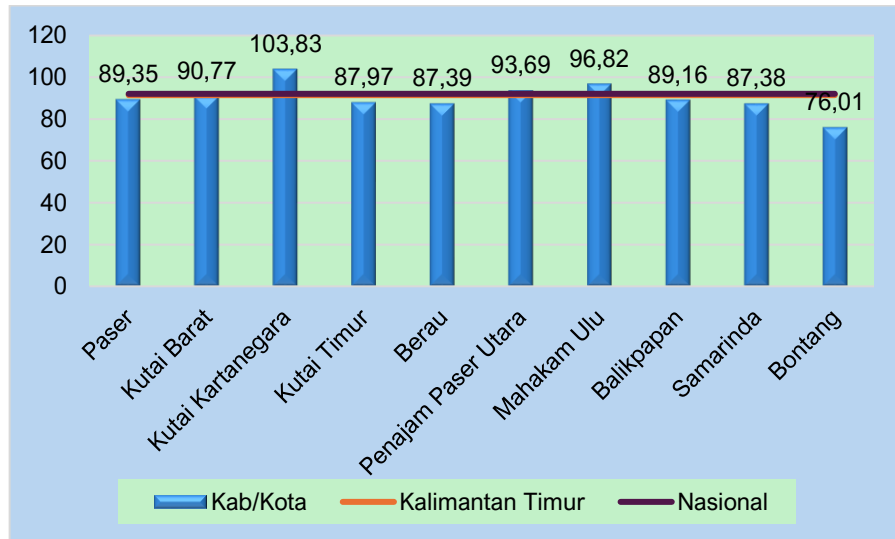
Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. Nilai APK PPU juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Posisi relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SLTA/MA tersaji pada Gambar 3.54. Gambar tersebut menunjukkan bahwa APK kab. PPU (85,73) masih lebih rendah dari Paser (96,19), Kutai Barat (93,9), Kutai Kartanegara (95,93), Kutai timur (104,83), Balikpapan (98,55) dan Samarinda (93,53). Namun Demikian, APK Kab. PPU masih lebih tinggi dari Mahakam Ulu (73,85) dan Bontang (81,14). Nilai APK PPU masih lebih rendah dari provinsi Kalimantan Timur 95,09, namun lebih tinggi dari APK Nasional (85,49).



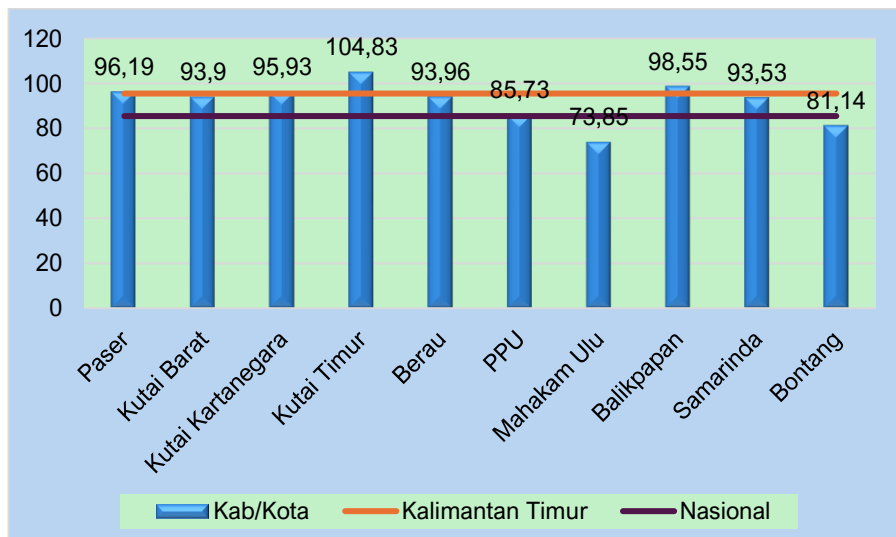
Gambar 3. 8 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kab. PPU Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 53 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs Kab. PPU Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 54 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTAMA Kab. PPU Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

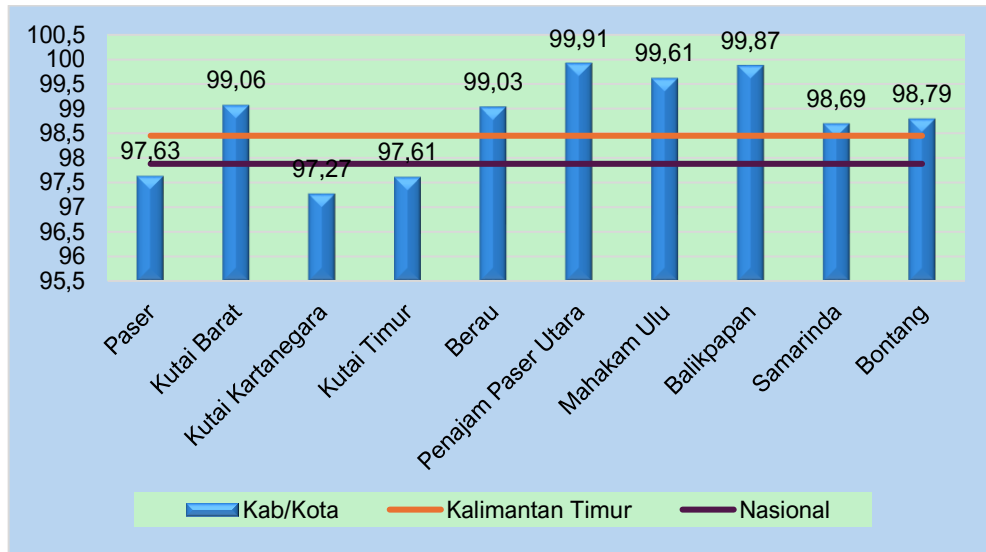


2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI, SLTP/ MTs dan SLTA/ MA

Perbandingan posisi relatif angka partisipasi murni SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/MA Kab. PPU dengan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 3.55 sampai Gambar 3.57. Gambar 3.55 menunjukkan posisi relatif angka partisipasi murni pada jenjang SD/MI Kab. PPU dalam bandingannya dengan kab/kota lain, provinsi, dan nasional. Kab PPU memiliki Nilai APM jenjang SD/MI tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur. APM (99,91) Kab. PPU juga masih lebih tinggi dari APM provinsi (98,45) dan Nasional (97,88).

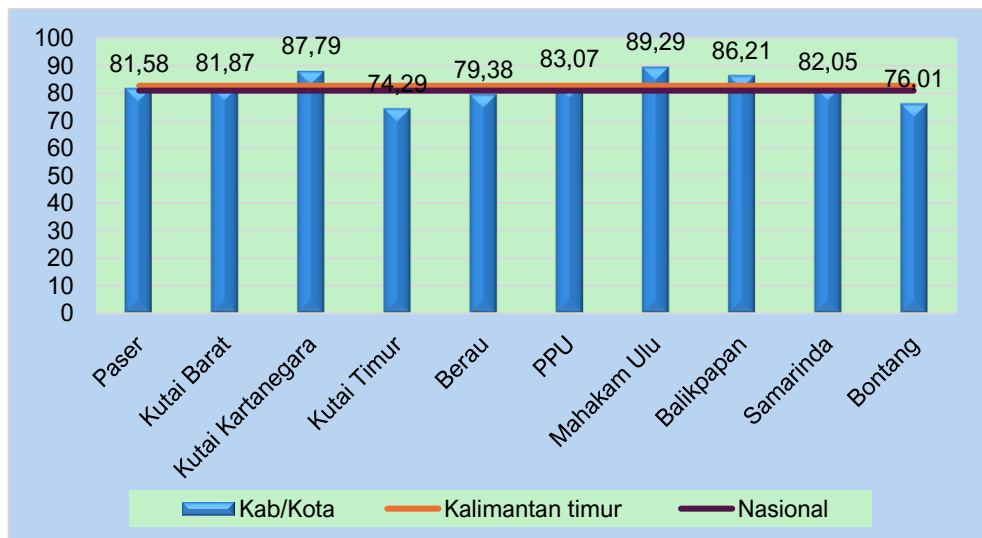
Posisi relatif angka partisipasi murni jenjang SLTP/MTs Kab. PPU dibandingkan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional disajikan pada Gambar 3.56. Gambar 3.52 menunjukkan bahwa APM Kab. PPU (83,07) masih lebih tinggi dibandingkan Paser (81,58), Kutai Barat (81,87), Kutai timur (74,29), Berau (79,38), samarinda (82,05) dan Bontang (76,01), namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Kutai Kartanegara (87,79), Mahakam Ulu (89,29) dan Balikpapan (86,21). Nilai APK PPU juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur (82,65) dan Nasional (80,89).

Posisi relatif angka partisipasi murni jenjang SLTA/MA tersaji pada Gambar 3.57. Gambar 3.57 menunjukkan bahwa APM Kab. PPU (70,11) masih lebih rendah dari Kutai Kartanegara (75,12), Kutai timur (71,25), dan Balikpapan (70,61). Namun Demikian, APM Kab. PPU masih lebih tinggi dari Paser (61,83), Kutai Barat (59,99), Mahakam Ulu (54,78), samarinda (66,39) dan Bontang (64,88). Nilai APM PPU masih lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Timur (69,1) dan Nasional (61,97).



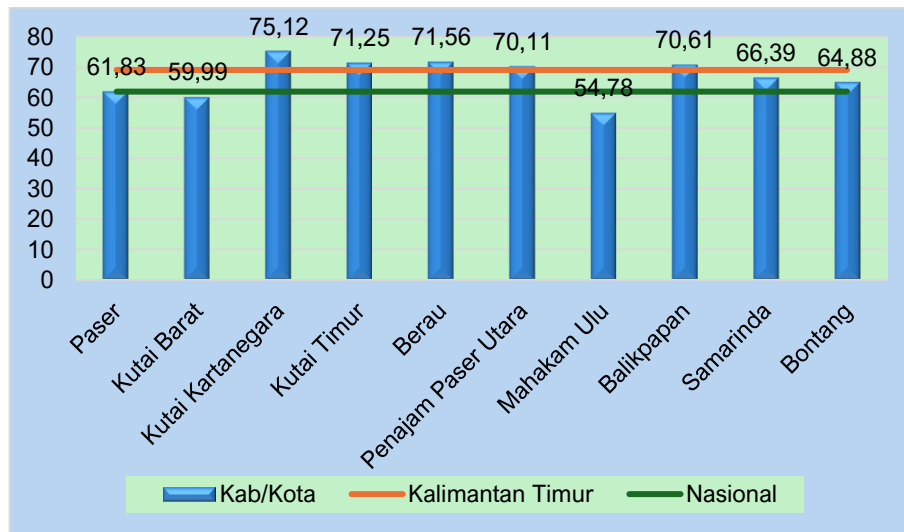
Gambar 3. 55 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kab. PPU Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 56 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs Kab. PPU Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 9 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.5.3. Analisis Relativitas

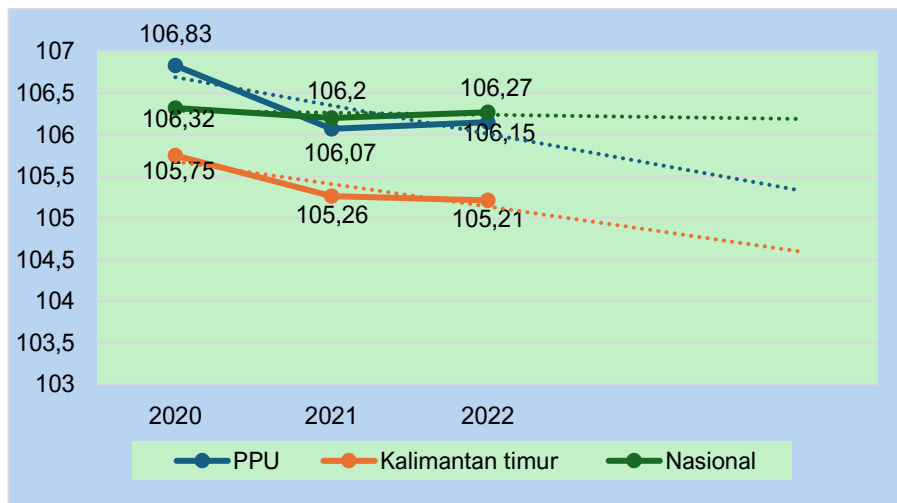
1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA

Analisis relativitas Angka Partisipasi Kasar (APK) Kab. PPU terhadap Provinsi dan Nasional dilakukan hanya untuk tahun 2020 sampai 2022. Penggunaan masa yang pendek dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh. Gambar 3.58 sampai Gambar 3.60. Gambar 3.58 menunjukkan relativitas APK SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA antara Kab PPU, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Pada Jenjang SD/MI, nilai APK Kab. PPU menunjukkan penurunan dari tahun 2020 ke 2021 dan sedikit meningkat pada tahun 2022. Pola penurunan ini terjadi baik pada Tingkat provinsi Kalimantan Timur juga pada Tingkat Nasional.

Gambar 3.59 menunjukkan relativitas angka partisipasi Kasar jenjang SMP/MTs antara Kab. PPU, Kalimantan timur dan Nasional. APK Kab. PPU mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan kemudian meurun pada tahun 2022. Meskipun memiliki pola penurunan, namun nilai APK kab. PPU masih di atas APK Kalimantan Timur dan Nasional. Analisis relativitas APK jenjang SMA/MA antara Kab. PPU, Kalimantan Timur dan Nasional

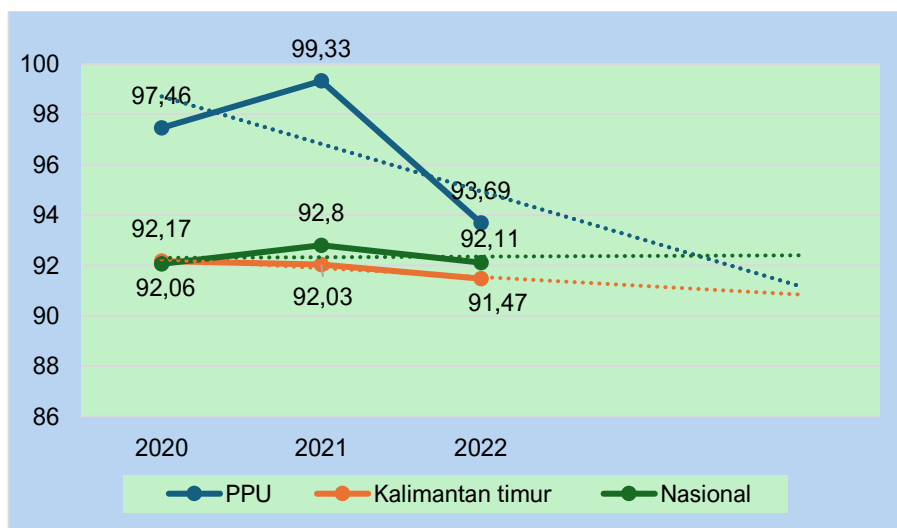


dapat terlihat pada Gambar 3.60. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang tetap dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Hasil analisis APK jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA menunjukkan adanya indikasi penurunan. Hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa penurunan tersebut merupakan ketidakmampuan intervensi program pemerintah daerah, karena tahun analisis adalah tahun kejadian wabah COVID-19.



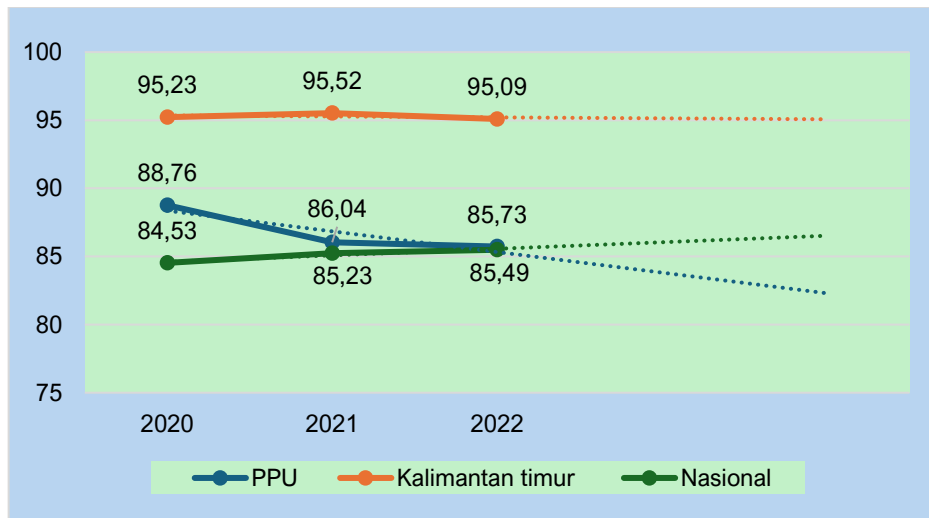
Gambar 3. 58 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 10 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 60 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

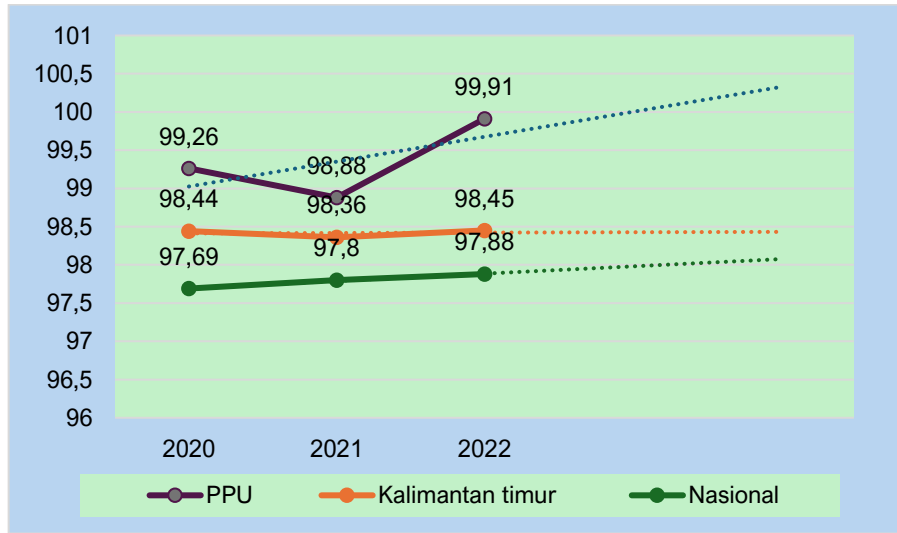
2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA

Analisis relativitas Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. PPU terhadap Provinsi dan Nasional juga dilakukan hanya untuk tahun 2020 sampai 2022. Gambar 3.61 sampai Gambar 3.63 menunjukkan relativitas APM SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA antara Kab. PPU, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Pada Jenjang SD/MI, nilai APM Kab. PPU menunjukkan penurunan dari tahun 2020 ke 2021 dan meningkat tajam pada tahun 2022 (Gambar 3.61). Pola kenaikan ini juga di Tingkat provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Namun demikian nilai APM Kab. PPU masih di atas Kalimantan Timur dan Nasional.

Gambar 3.62 menunjukkan relativitas angka partisipasi murni jenjang SLTP/MTs antara Kab. PPU, Kalimantan timur dan Nasional. APM Kab. PPU mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2022. Nilai APM Provinsi dan Nasional dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Nilai APM Kab. PPU masih lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional baik tahun 2020, 2021 dan 2022. Analisis relativitas APM

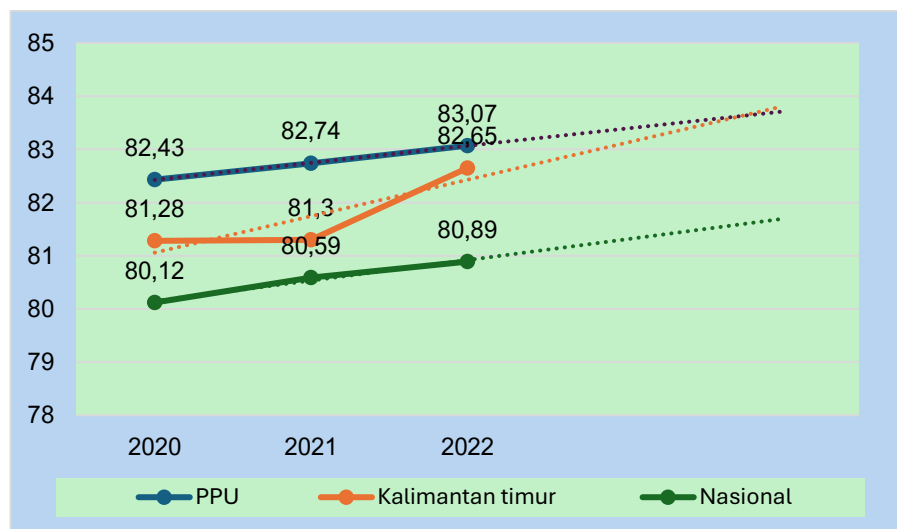


jenjang SLTA/MA antara Kab. PPU, Kalimantan Timur dan Nasional dapat terlihat pada gambar 3.63. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang tetap dari tahun 2020 sampai 2022. Pola tersebut juga terjadi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Angka APM Kab. PPU masih di atas Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.



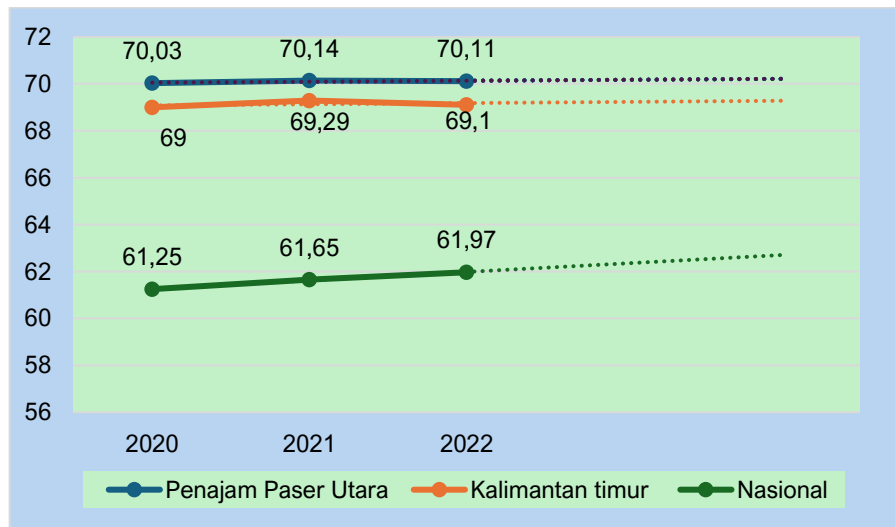
Gambar 3. 61 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 62 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



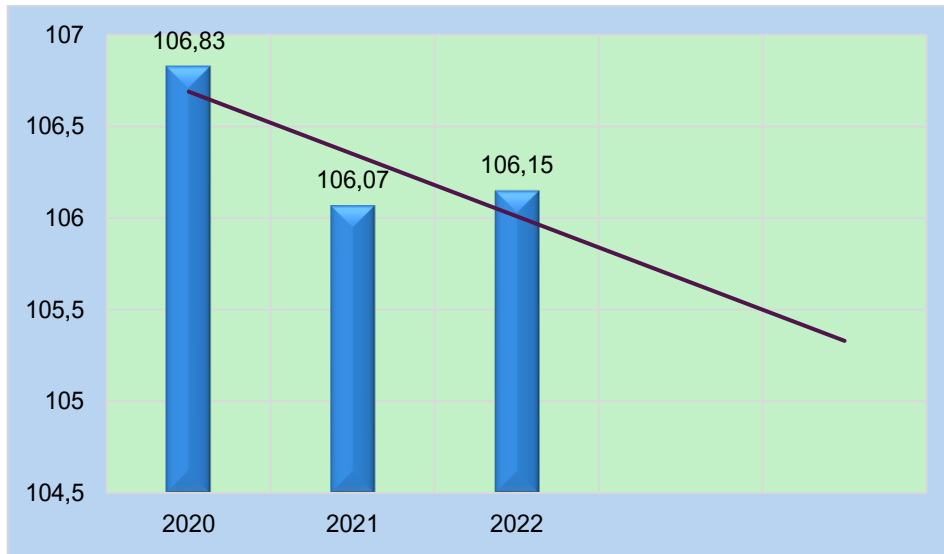
Gambar 3. 63 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/ MA Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.5.4. Analisis Efektivitas

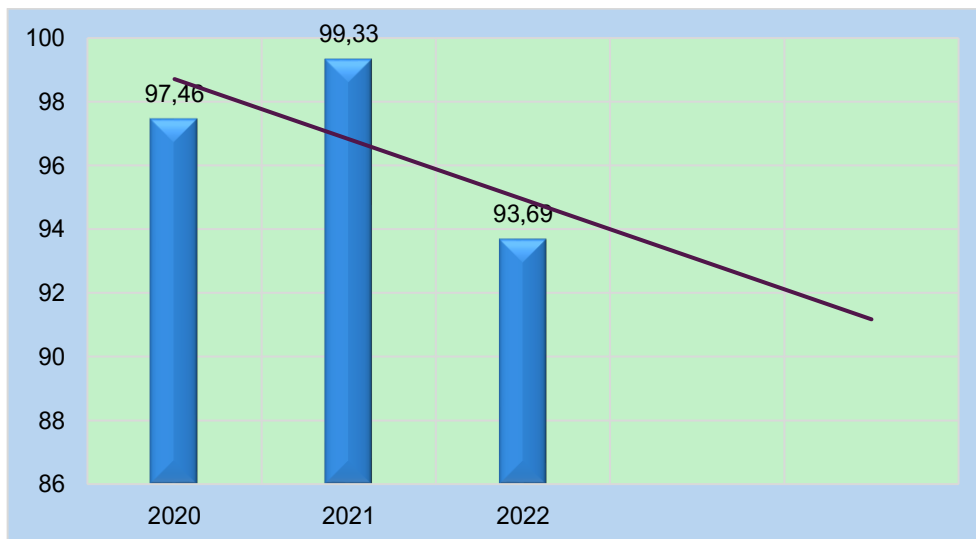
1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA

Analisis Efektivitas bertujuan untuk melihat keefektifan program pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kab. PPU. Gambar 3.64 sampai Gambar 3.66 menunjukkan analisis efektivitas angka APK pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA. Secara keseluruhan APK pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA memiliki pola yang menurun. Hasil ini mengindikasikan intervensi program-program pendidikan belum mampu meningkatkan APK apalagi dalam kondisi COVID-19.



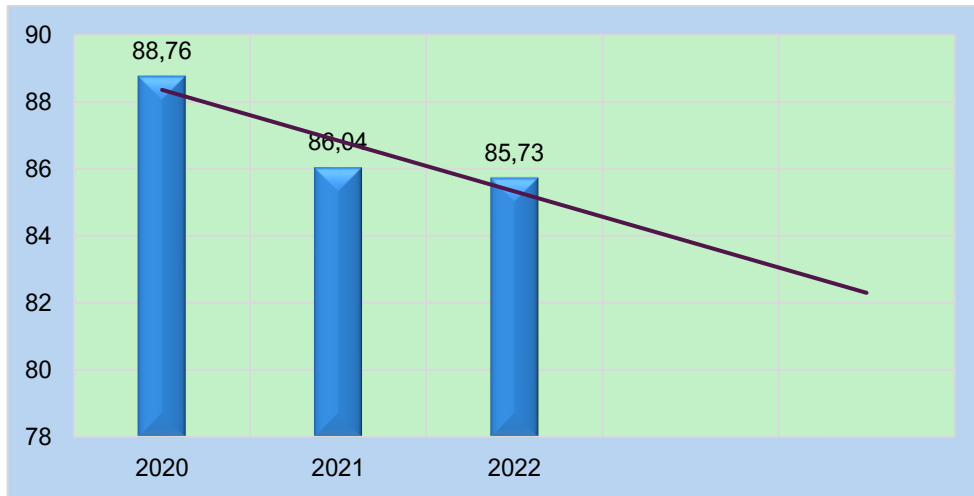
Gambar 3. 64 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 65 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

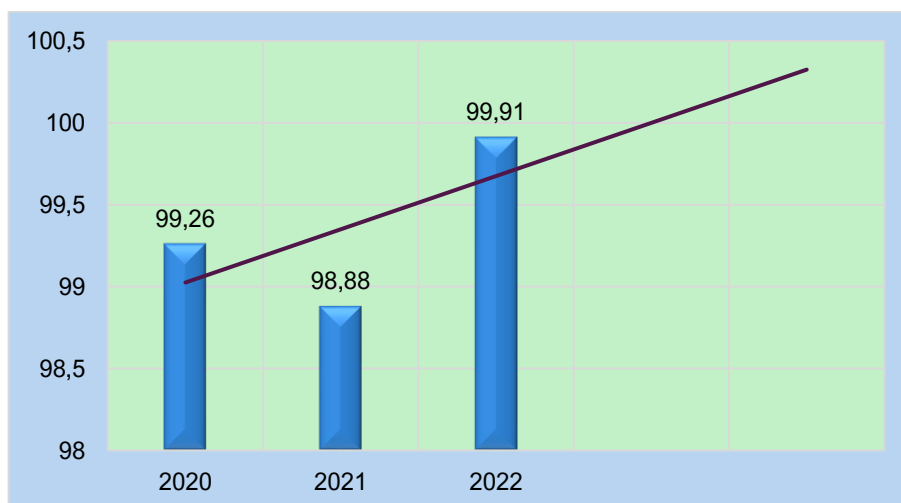


Gambar 3. 66 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

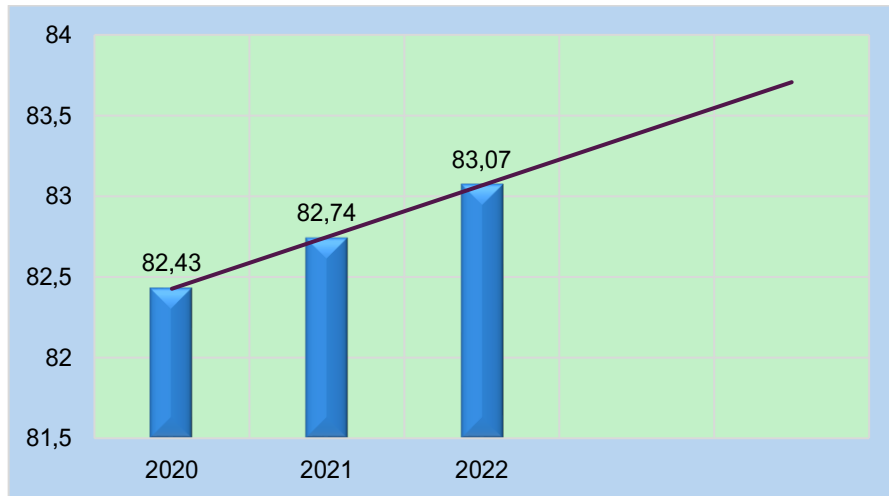
2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA disajikan pada Gambar 3.67 sampai Gambar 3.69. Secara keseluruhan APM pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA memiliki pola yang meningkat. Hasil indikator ini mengindikasikan intervensi program-program pendidikan Kab. PPU telah mampu meningkatkan APM, apalagi dalam kondisi COVID-19.



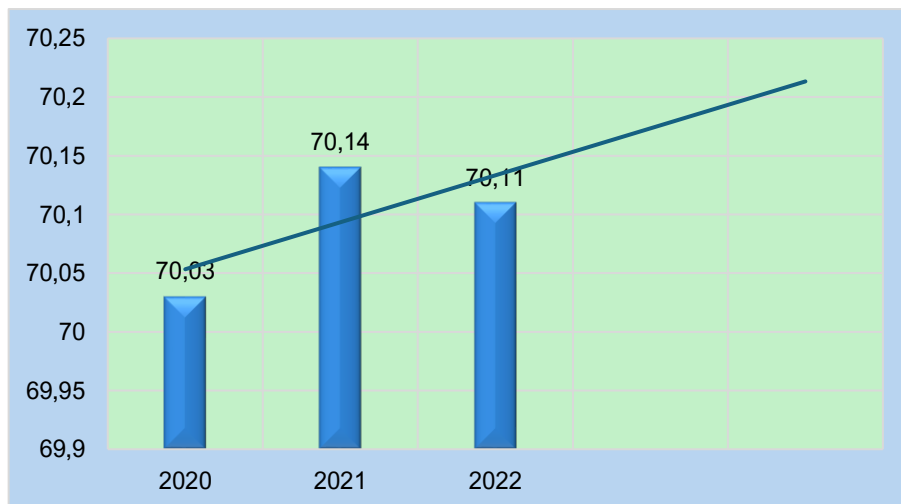
Gambar 3. 117 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 68 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

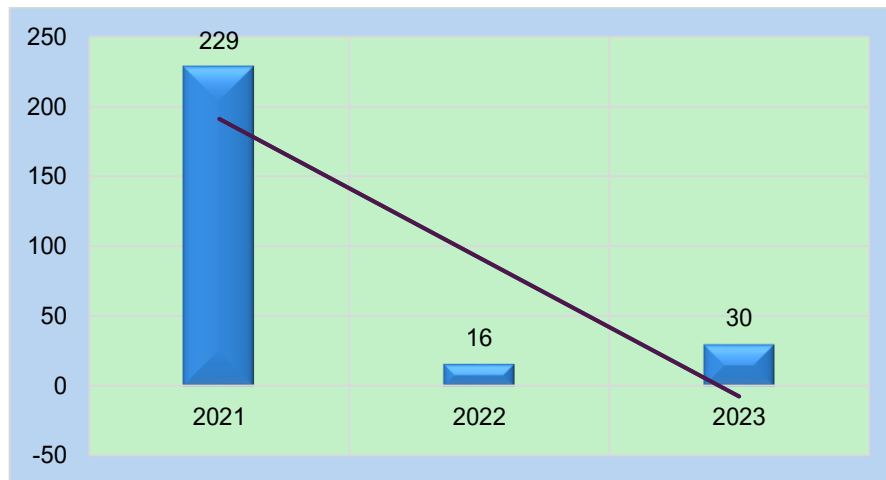


Gambar 3. 12 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA Kab. PPU Tahun 2020 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

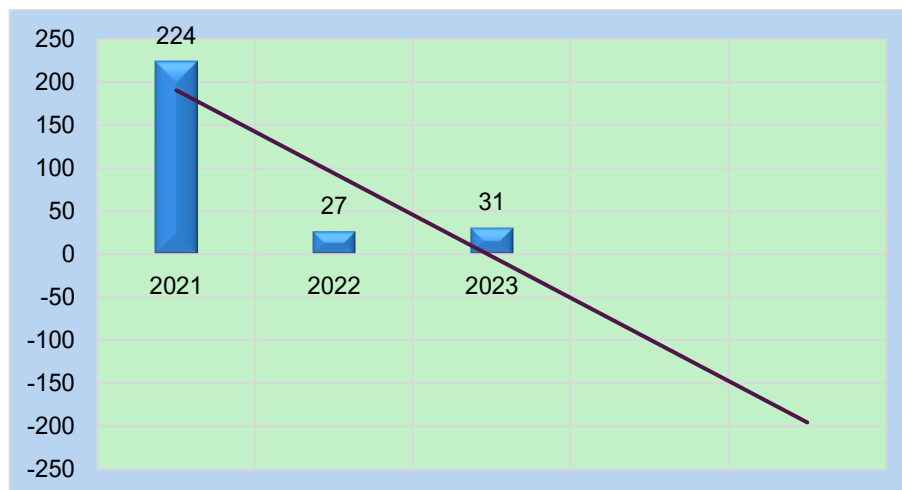
3) Jumlah Putus Sekolah SD/ MI, SLTP/ MTs dan SLTA/ MA

Analisis Efektivitas jumlah putus sekolah pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun disajikan pada Gambar 3.70 dan Gambar 3.71. Khusus jumlah putus sekolah usia 16-18 tahun tidak dapat digambarkan karena keterbatasan data.



Gambar 3. 70 Analisis Efektivitas Jumlah Putus Sekolah Usia 7-12 tahun Kab. PPU Tahun 2021 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



Gambar 3. 131 Analisis Efektivitas Jumlah Putus Sekolah Usia 13-15 Tahun Kab. PPU Tahun 2021 - 2023

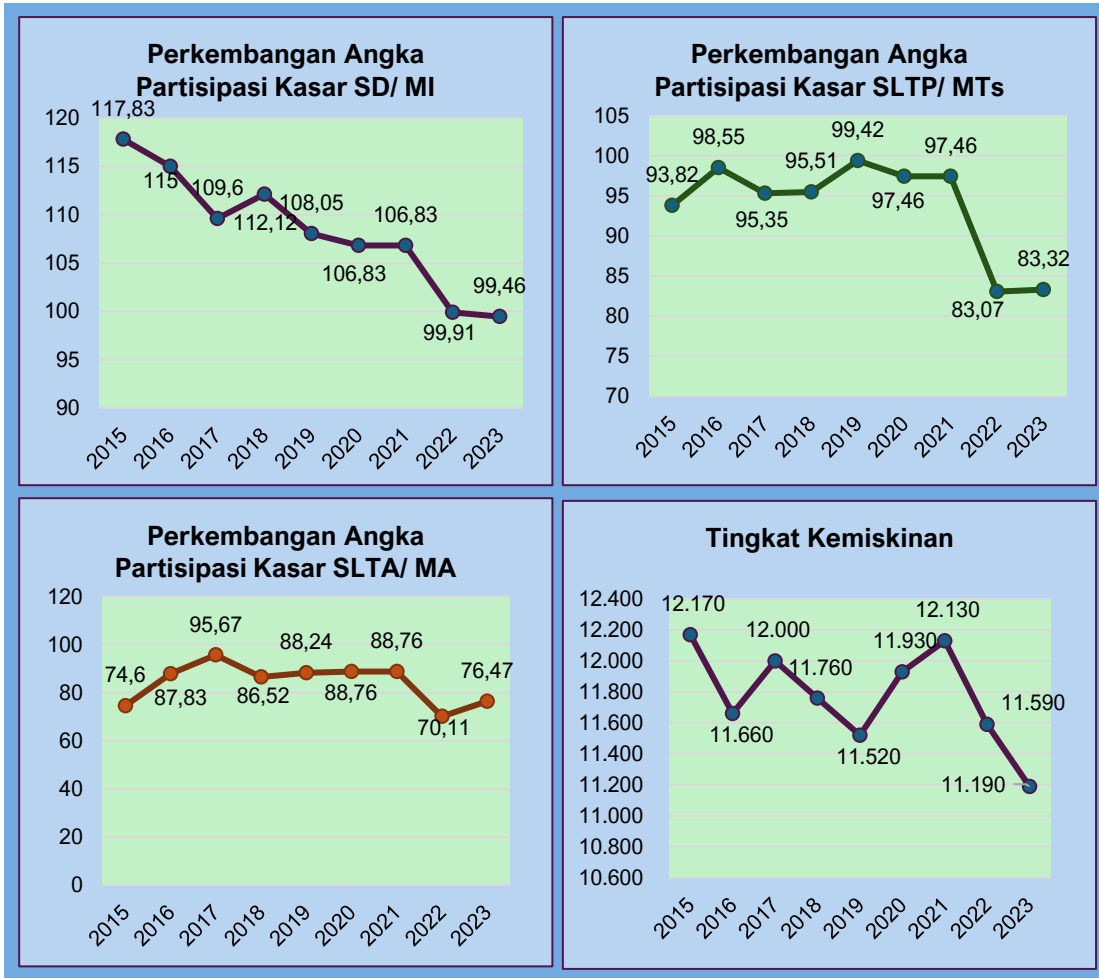
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Secara keseluruhan jumlah putus sekolah usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun memiliki pola yang menurun. Hasil indikator ini mengindikasikan intervensi program-program pendidikan kab. PPU telah mampu menekan angka putus sekolah.



3.5.5. Analisis Prioritas Bidang

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) terhadap Tingkat kemiskinan



Gambar 3. 72 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan (APK terhadap Tingkat Kemiskinan) Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

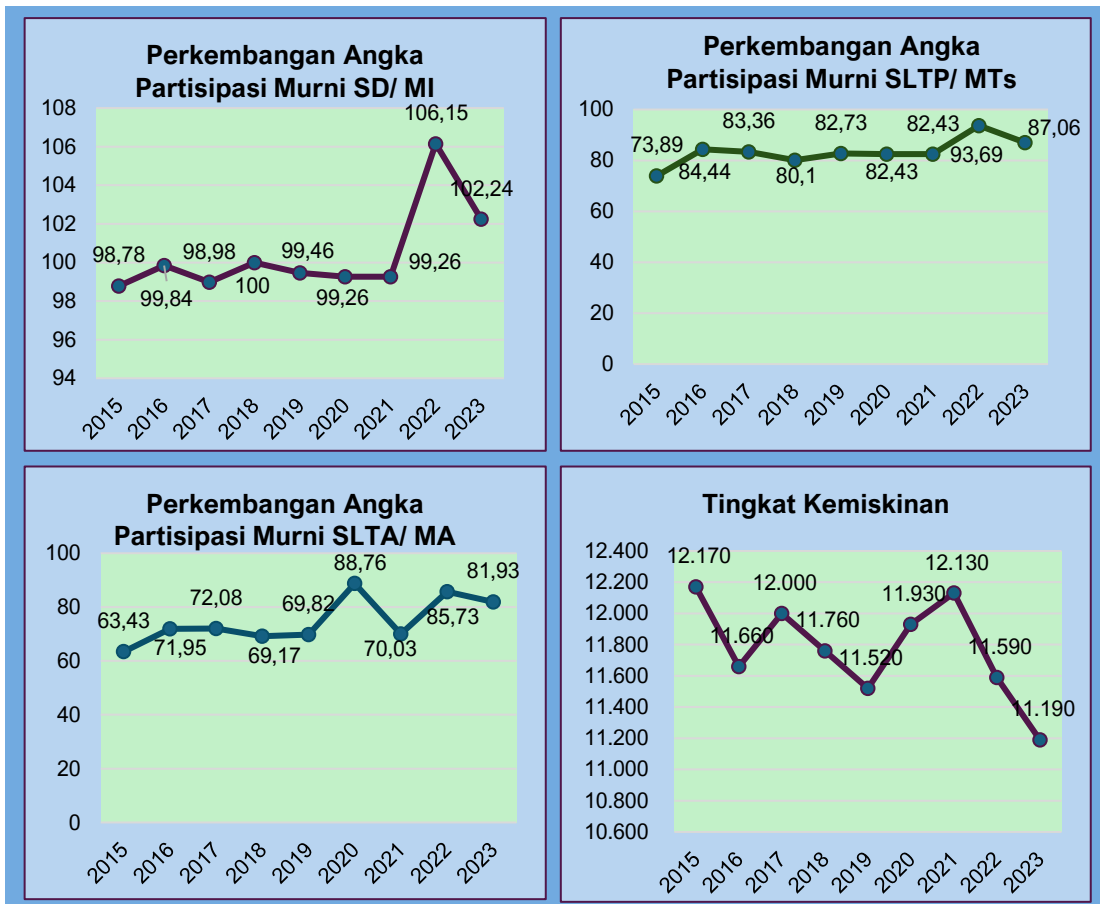
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Pola Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA memiliki pola yang sama dengan kemiskinan (Gambar 3.72). Ketika APK SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA tahun 2021 tinggi, Tingkat kemiskinan kab. PPU juga berada pada posisi yang tinggi. Pada tahun 2022 dan 2023 nilai APK SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA menurun, nilai tingkat kemiskinan juga menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai APK pada tiap jenjang bukan merupakan penyebab menurunnya tingkat kemiskinan.



Oleh karena itu, intervensi di indikator APK tidak menjadi prioritas Kab. PPU.

2) Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Tingkat kemiskinan



Gambar 3. 7314 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan (APM) terhadap Tingkat Kemiskinan) Kab. PPU Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Gambar 3.73 menunjukkan bahwa pergerakan APM pada tiap jenjang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung ke arah peningkatan. Intervensi ini mengindikasikan bahwa peningkatan APM sejalan dengan penurunan Tingkat kemiskinan. Dari ketiga jenjang Pendidikan, Pemerintah Kab. PPU perlu memfokuskan intervensinya pada jenjang SMA/ MA karena nilai APM masih berkisar 81,93 pada tahun 2023. Artinya, masih terdapat 18,07 umur Usia SMA yang belum mengenyam



Pendidikan. Fokus intervensi ini dapat dilakukan dengan indikator pendukung seperti Jarak sekolah, rasio siswa/ kelas, Jumlah sekolah. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah sekolah atau ruang kelas.

3) Jumlah Putus Sekolah terhadap Tingkat kemiskinan



Gambar 3. 154 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan (Jumlah Putus Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan) Kab. PPU Tahun 2015 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Gambar 3.74 menunjukkan tentang intervensi bidang pendidikan yaitu jumlah putus sekolah pada kemiskinan. Gambar tersebut hanya menyajikan data pada jenjang SD/MI dan SLTP/MTs karena data SLTA/MA tidak tersedia. Jumlah putus sekolah dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami



trend penurunan hal ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Intervensi ini mengindikasikan bahwa peningkatan penurunan jumlah putus sekolah sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pemerintah Kab. PPU dapat melakukan intervensi untuk menekan jumlah putus sekolah.

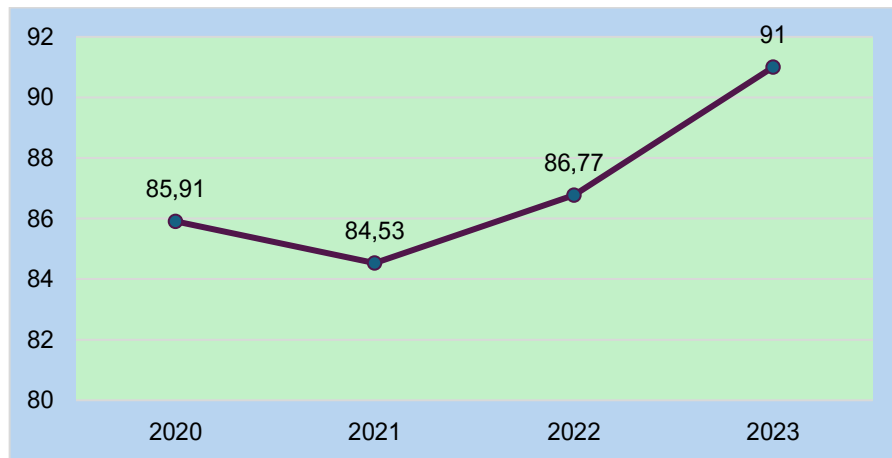
3.6. Bidang Infrastruktur Dasar

Terdapat dua indikator infrastruktur dasar yang digunakan untuk menganalisis kondisi kemiskinan di Kab. PPU yaitu Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%). Terbatasnya indikator yang digunakan disebabkan oleh kurangnya ketersediaan data dalam kajian ini. Analisis bidang infrastruktur dasar ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, hanya terdapat tiga analisis yang dapat dilakukan yaitu perkembangan antar waktu, efektivitas dan prioritas bidang. Analisis lain tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data. Kedua, tahun observasi hanya 4 tahun yaitu tahun 2020 - 2023.

3.6.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu

1) Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Gambar 3.75 menunjukkan perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kab. PPU. Berdasarkan grafik diketahui bahwa terjadi tren peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Bahkan pada tahun 2023 jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi layak di atas 90%. Hal ini didorong oleh program pemerintah Kab PPU untuk memberikan bantuan sanitasi bagi masyarakat miskin.

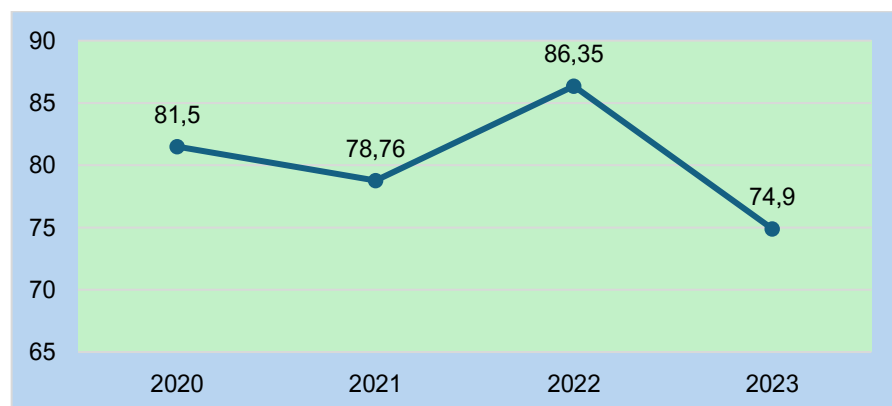


Gambar 3. 75 Analisis Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah tangga dengan Sanitasi Layak Kab. PPU Tahun 2020 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

2) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum

Perkembangan proporsi rumah tangga dengan akses air minum mengalami fluktuasi (Gambar 3.76). Besaran proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan angka di atas 85% dan menurun tajam pada tahun 2023 di kisaran 75%. Selama tahun 2023 pemerintah Kab. PPU membuat kegiatan seperti bantuan sarana air bersih (tandon), Pembangunan jaringan pipa air minum, perbaikan SPAM dan pengadaan water meter. Namun demikian kegiatan-kegiatan tersebut belum mampu untuk mempertahankan proporsi akses air minum tahun 2022.



Gambar 3. 76 Analisis Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah tangga dengan Sanitasi Layak Kab. PPU Tahun 2020 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



3.6.2. Analisis Posisi Relatif

Analisis Posisi relatif Kab. PPU dalam bandingannya dengan kab/kota di Kalimantan Timur, provinsi dan nasional tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data yang tersedia. Data kota dan kabupaten lain, provinsi dan nasional tidak tersedia.

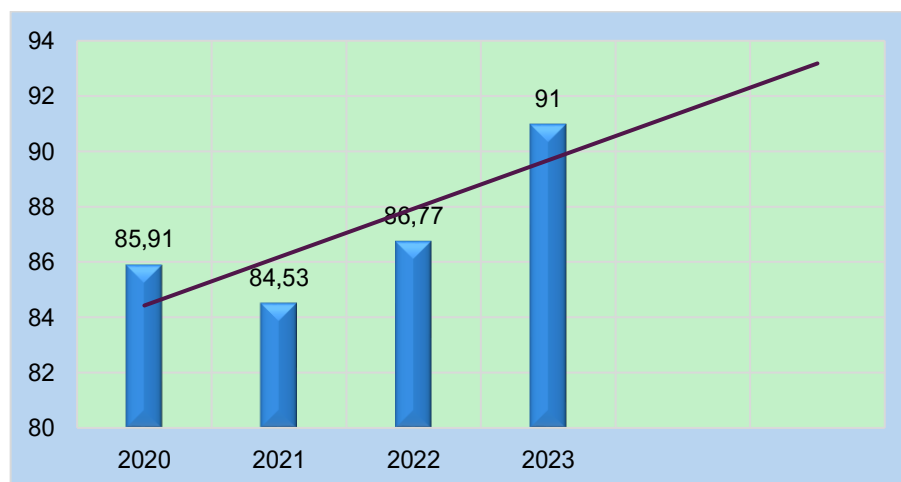
3.6.3. Analisis Relativitas

Analisis relativitas Kab. PPU dalam bandingannya dengan provinsi dan nasional untuk periode 2015-2023 tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data yang tersedia di provinsi dan nasional tidak tersedia.

3.6.4. Analisis Efektivitas

1) Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Analisis Efektivitas proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak disajikan pada Gambar 3.77. Secara keseluruhan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak mengalami peningkatan. Hasil mengindikasikan intervensi program-program pendidikan di Kab. PPU telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat/rumah tangga.



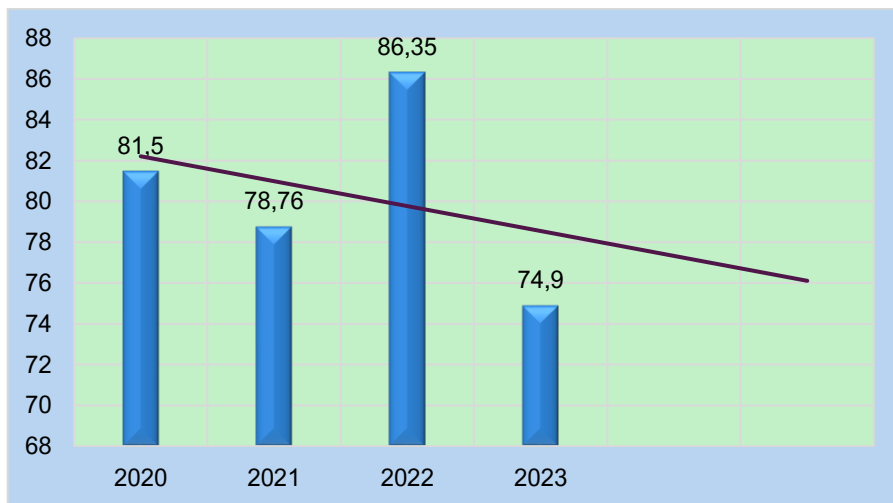
Gambar 3. 77 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kab. PPU Tahun 2020 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



2) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum

Gambar 3.78 menunjukkan analisis efektivitas proporsi rumah tangga dengan akses air minum. Secara keseluruhan Proporsi rumah tangga dengan akses air minum mengalami penurunan. Hasil indikator ini mengindikasikan intervensi program-program pendidikan kab. PPU belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat/rumah tangga.

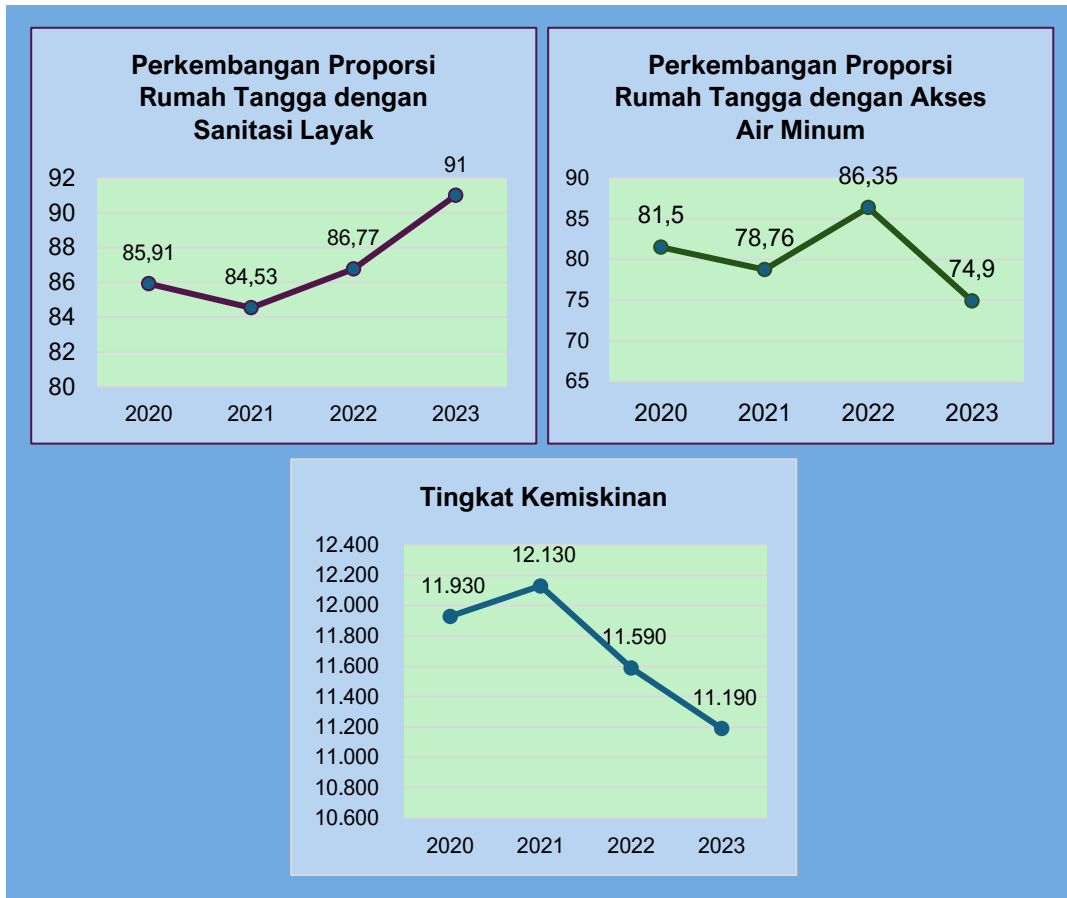


Gambar 3. 78 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Kab. PPU Tahun 2020 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.6.5. Analisis Prioritas Bidang

Gambar 3.79 menunjukkan tentang intervensi bidang infrastruktur dasar yaitu perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dan perkembangan proporsi rumah tangga dengan akses air minum jumlah putus sekolah pada kemiskinan. Jumlah perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak tahun 2020 sampai 2023 mengalami trend peningkatan. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses air minum mengalami perkembangan yang fluktuatif. Perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak sejalan dengan tingkat kemiskinan. Peningkatan proporsi tersebut menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah Kab. PPU dapat meningkatkan intervensi pada perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak untuk menurunkan tingkat kemiskinan.



Gambar 3. 79 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar Kab. PPU Tahun 2020 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.7. Bidang Ketahanan Pangan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Definisi ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Ketahanan pangan memiliki peran yang sangat penting. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan, terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan yaitu harga



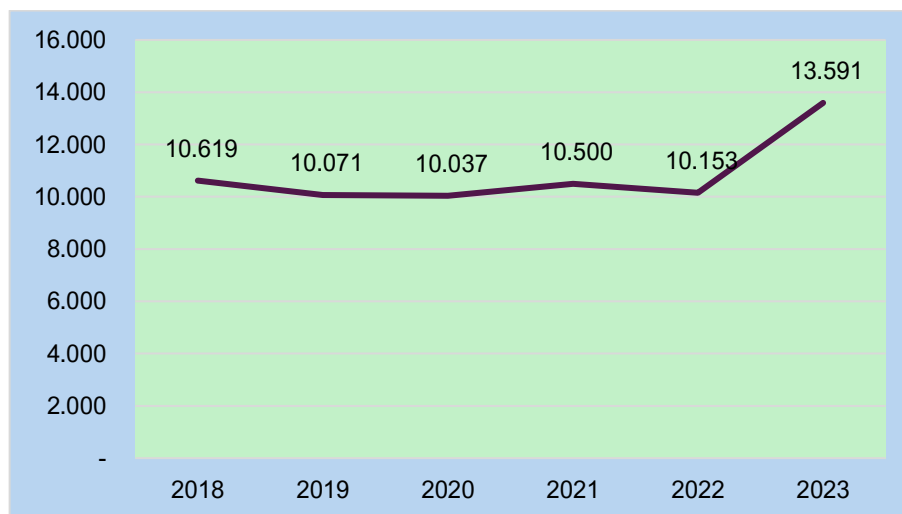
beras, harga kebutuhan pokok, luas panen dan produksi padi, pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan empat indikator tersebut berdasarkan ketersediaan data yang diperoleh. Keempat indikator tersebut dianalisis menggunakan metode: perkembangan antar waktu, posisi relatif, relativitas, efektivitas dan prioritas bidang.

3.7.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu

1) Harga Beras

Gambar 3.80 menunjukkan perkembangan harga beras Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 sampai tahun 2023. Perkembangan harga beras di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi dengan harga tertinggi mencapai sebesar Rp 13.591 pada tahun 2023 dan harga terendah sebesar Rp10.037 di tahun 2020.



Gambar 3. 80 Analisis Perkembangan Antar Waktu Harga Beras (Rp) Kab. PPU Tahun 2018 - 2023

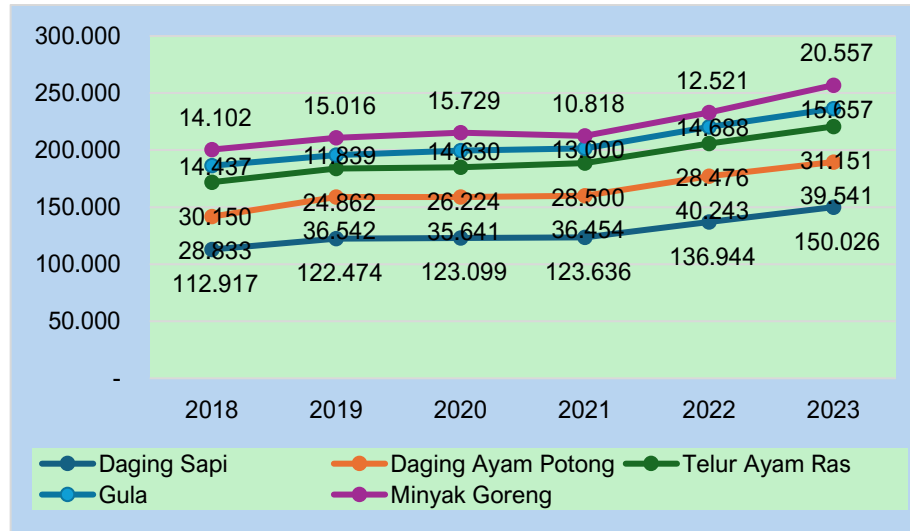
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

2) Harga Kebutuhan Pokok Utama

Gambar 3.81 menunjukkan perkembangan harga kebutuhan pokok Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2018 sampai tahun 2023.



Indikator harga kebutuhan pokok ini terdiri dari: harga daging sapi, daging ayam potong, telur ayam ras, gula, dan minyak goreng.



Gambar 3. 81 Analisis Perkembangan Antar Waktu Harga Kebutuhan Pokok Utama Kab. PPU Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

Indikator pertama pada perkembangan harga daging sapi di Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat tanpa dengan mengalami fluktuasi dengan harga tertinggi mencapai sebesar Rp 150.026 pada tahun 2023 dan harga terendah sebesar Rp 112.917 di tahun 2018. Indikator kedua pada perkembangan harga daging ayam potong di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi dengan harga tertinggi mencapai sebesar Rp 40.243 pada tahun 2022 dan harga terendah sebesar Rp 28.833 di tahun 2018. Selanjutnya indikator ketiga yaitu perkembangan harga telur ayam ras di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi dengan harga tertinggi mencapai sebesar Rp 31.151 pada tahun 2023 dan harga terendah sebesar Rp 24.862 di tahun 2019. Lalu indikator keempat pada perkembangan harga gula di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi dengan harga tertinggi mencapai sebesar Rp 15.657 pada tahun 2023 dan harga terendah sebesar Rp 11.839 di tahun 2019. Indikator terakhir yaitu perkembangan harga minyak di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi dengan harga

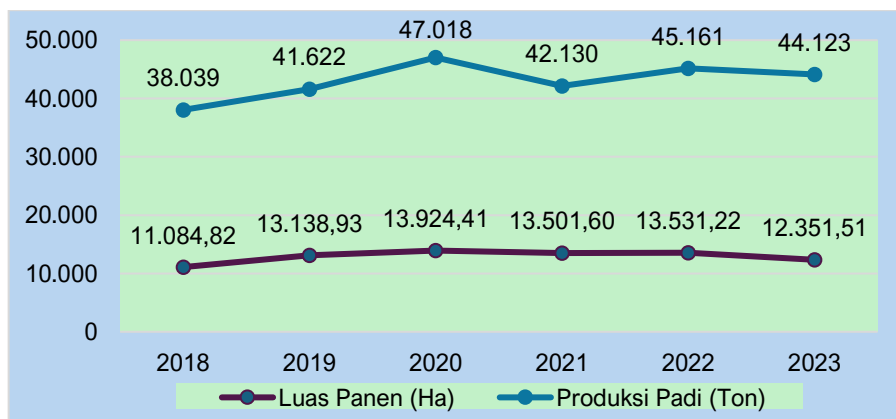


tertinggi mencapai sebesar Rp20.557 pada tahun 2023 dan harga terendah sebesar Rp10.818 di tahun 2021.

3) Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton)

Gambar 3.82 menunjukkan perkembangan luas panen (Ha) dan produksi padi (Ton) Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Luas panen di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan panen terluas pada tahun 2020 seluas 13.924,41 Ha dan panen terendah pada tahun 2018 seluas 11.084,82 Ha. Fluktuasi luas panen ini terjadi karena adanya pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang berakibat pula pada banyaknya jumlah produksi padi dan ketersediaan pangan. Selain itu, luas panen juga dipengaruhi oleh curah hujan yang tidak merata.

Produksi padi di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan produksi padi terbanyak pada tahun 2020 seluas 47.018 Ton dan produksi padi terendah pada tahun 2018 seluas 38.039 Ton. Fluktuasi produksi padi ini berbanding lurus dengan luasnya panen padi yang juga mengalami fluktuasi. Terjadinya penurunan tersebut mencerminkan bahwa perlu adanya perhatian pada produktivitas padi untuk memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 3. 162 Analisis Perkembangan Antar Waktu Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton) Kab. PPU Tahun 2018-2023

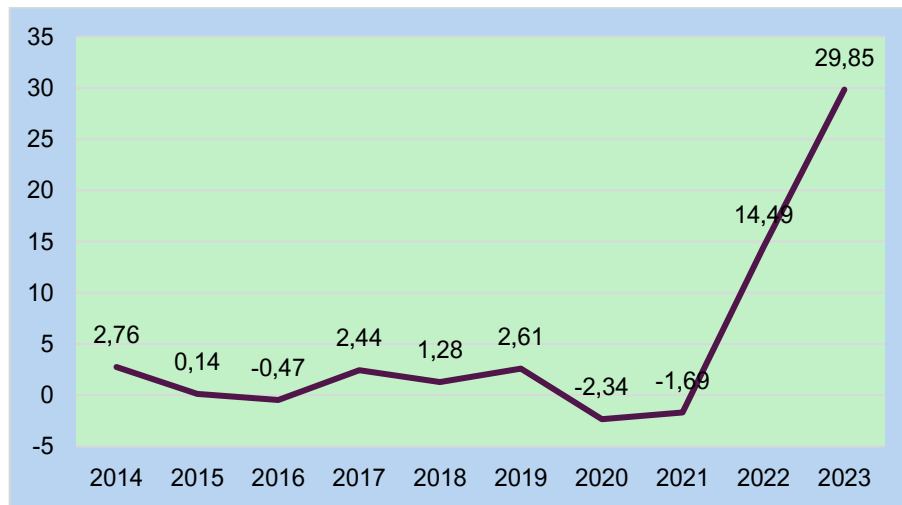
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.



4) Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 3.83 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi (%) di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 sampai 2023. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami fluktuasi, akan tetapi sejak tahun 2022 meningkat tajam hingga tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 29,85% di tahun 2023. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 sebesar -2,34%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi COVID-19.

Tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 disebabkan peningkatan kegiatan perdagangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam (3) tiga tahun terakhir, kembalinya aktivitas perekonomian pasca pandemi. Peningkatan kegiatan perdagangan ini ditandai dengan penambahan jumlah pasar pada tahun 2022 yaitu 1 pasar di Kecamatan Sepaku dan 1 Pasar di Kecamatan Penajam. Hal ini membuat kategori perdagangan berkontribusi dalam kisaran 8-10% pada PDRD. Selain itu, terdapat adanya perkembangan kategori konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 meningkat signifikan mencapai 89,82% yang berdampak pada perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan kategori konstruksi berkaitan erat dengan meningkatnya progres proyek pembangunan di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.



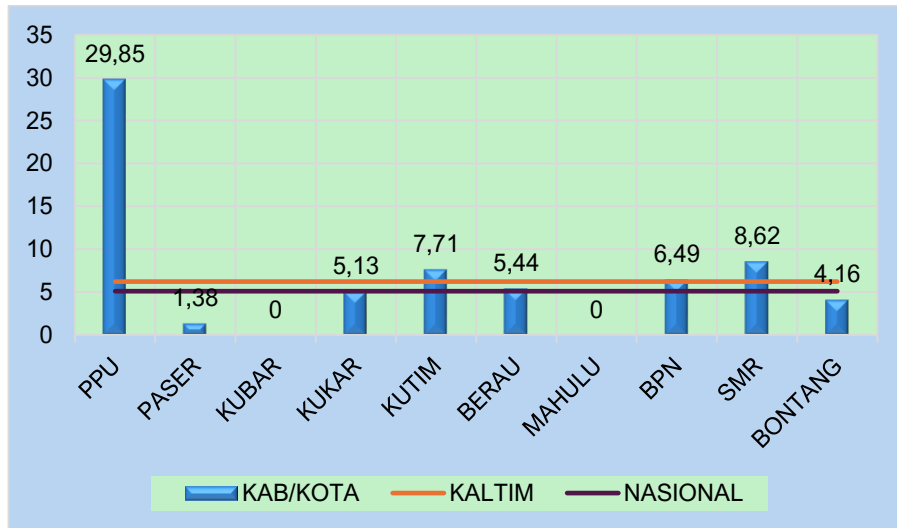
Gambar 3. 83 Analisis Perkembangan Antar Waktu Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.7.2. Analisis Posisi Relatif

Analisis posisi relatif dilakukan hanya pada indikator pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk indikator harga beras, harga kebutuhan pokok utama, luas panen dan produksi padi tidak dilakukan karena tidak relevan dan data pembandingan tidak tersedia.

Gambar 3.84 menunjukkan posisi relatif pertumbuhan ekonomi (%) Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023. tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 sebesar 29,85% berada di posisi tertinggi di antara seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 berada lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kaltim yang hanya sebesar 5,1% dan juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,22%.



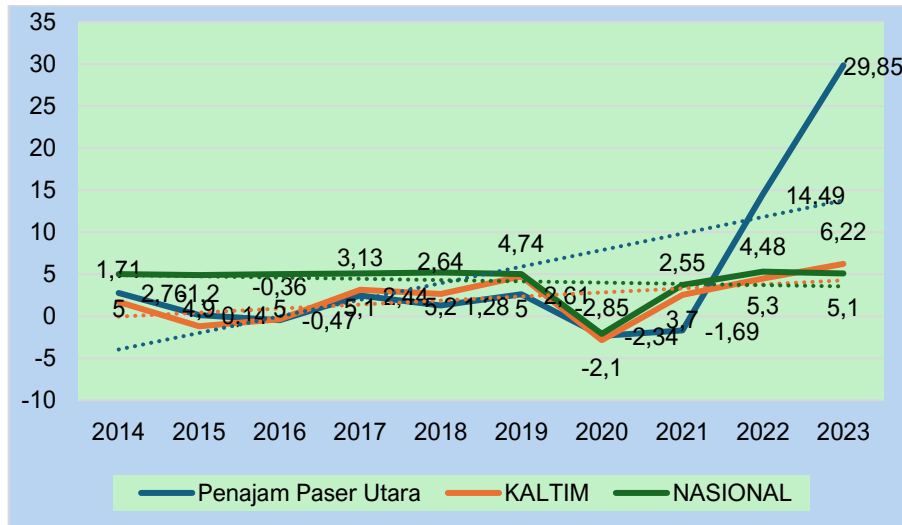
Gambar 3. 84 Analisis Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. PPU Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.7.3. Analisis Relativitas

Analisis relativitas dilakukan hanya pada indikator pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk indikator harga beras, harga kebutuhan pokok utama, luas panen dan produksi padi tidak dilakukan karena tidak relevan dan data pembandingan tidak tersedia.

Gambar 3.85 menunjukkan relevansi pertumbuhan ekonomi (%) di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014 sampai 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam 2 tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kaltim dan Nasional. Hal ini disebabkan oleh kembalinya aktivitas perekonomian pasca pandemi yang berdampak pada peningkatan kegiatan perdagangan dan perkembangan kategori konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan adanya pembangunan di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.



Gambar 3. 175 Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.7.4. Analisis Efektivitas

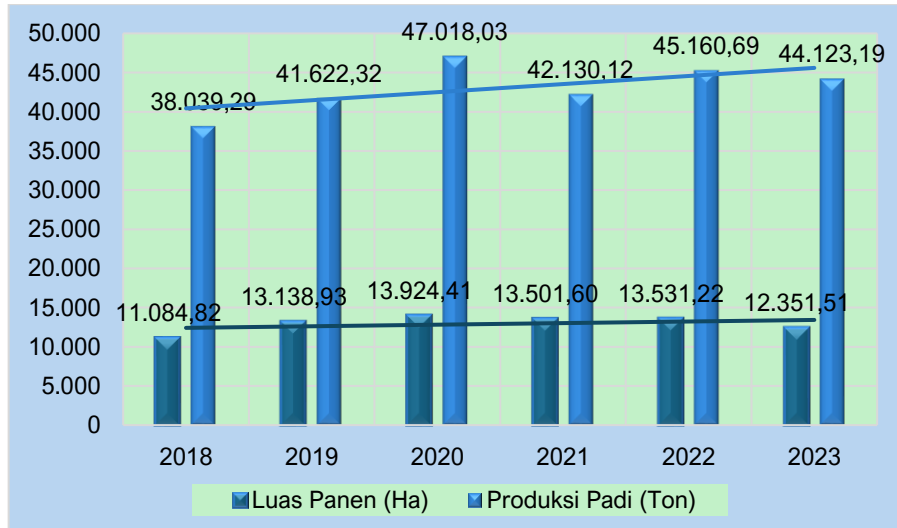
Analisis efektivitas bidang ketahanan pangan dilakukan pada 2 (dua) indikator yaitu indikator luas panen dan produksi padi, dan indikator pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk indikator harga beras dan harga kebutuhan pokok utama tidak dilakukan karena bersifat makro dan hampir tidak efektif untuk dapat diintervensi sesuai dengan perkembangan harga yang telah terjadi.

1) Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton)

Gambar 3.86 menunjukkan efektivitas perkembangan luas panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton) di Kabupaten Penajam Paser Utara selama 6 (enam) tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai 2023. Luas panen di Kabupaten Penajam Paser Utara mencerminkan trend yang hampir stabil dengan sedikit fluktuasi. Penurunan luas panen seluas 440,81 Ha terjadi pada tahun 2021 lalu terjadi peningkatan sedikit yaitu 29,62 Ha di tahun 2022 dan terakhir luas panen menurun kembali sebanyak 1.179,71 di tahun 2023. Produksi padi di Kabupaten Penajam Paser Utara mencerminkan trend yang cenderung meningkat dengan sedikit fluktuasi. Penurunan



produksi padi sebanyak 4.887,91 Ton terjadi pada tahun 2021, lalu terjadi peningkatan sebanyak 3.030,57 Ton padi pada tahun 2022, lalu menurun kembali sebanyak 1.037,6 Ton padi pada tahun 2023.

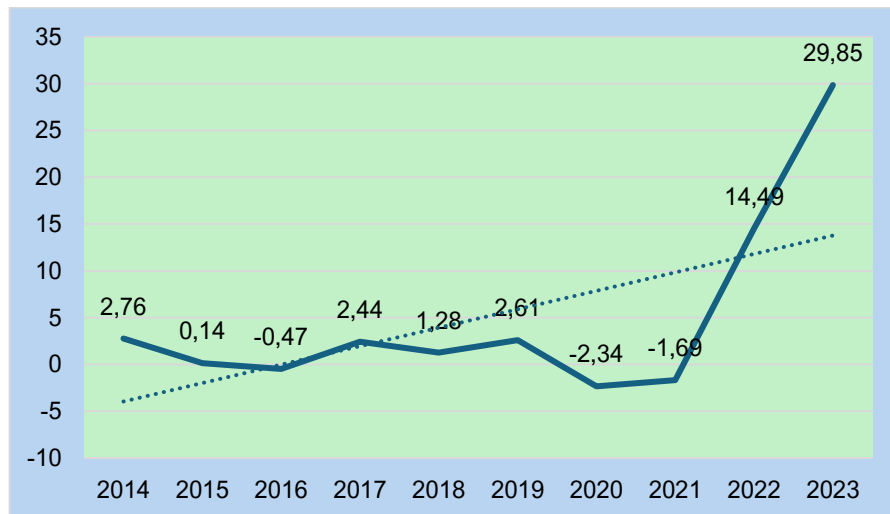


Gambar 3. 186 Analisis Efektivitas Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton) Kab. PPU Tahun 2018 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

2) Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 3.87 menunjukkan efektivitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014 sampai 2023. Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Penajam Paser Utara selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang meningkat sebanyak 16,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu disusul dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi kedua yang terjadi pada tahun 2023 yang meningkat sebanyak 15,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

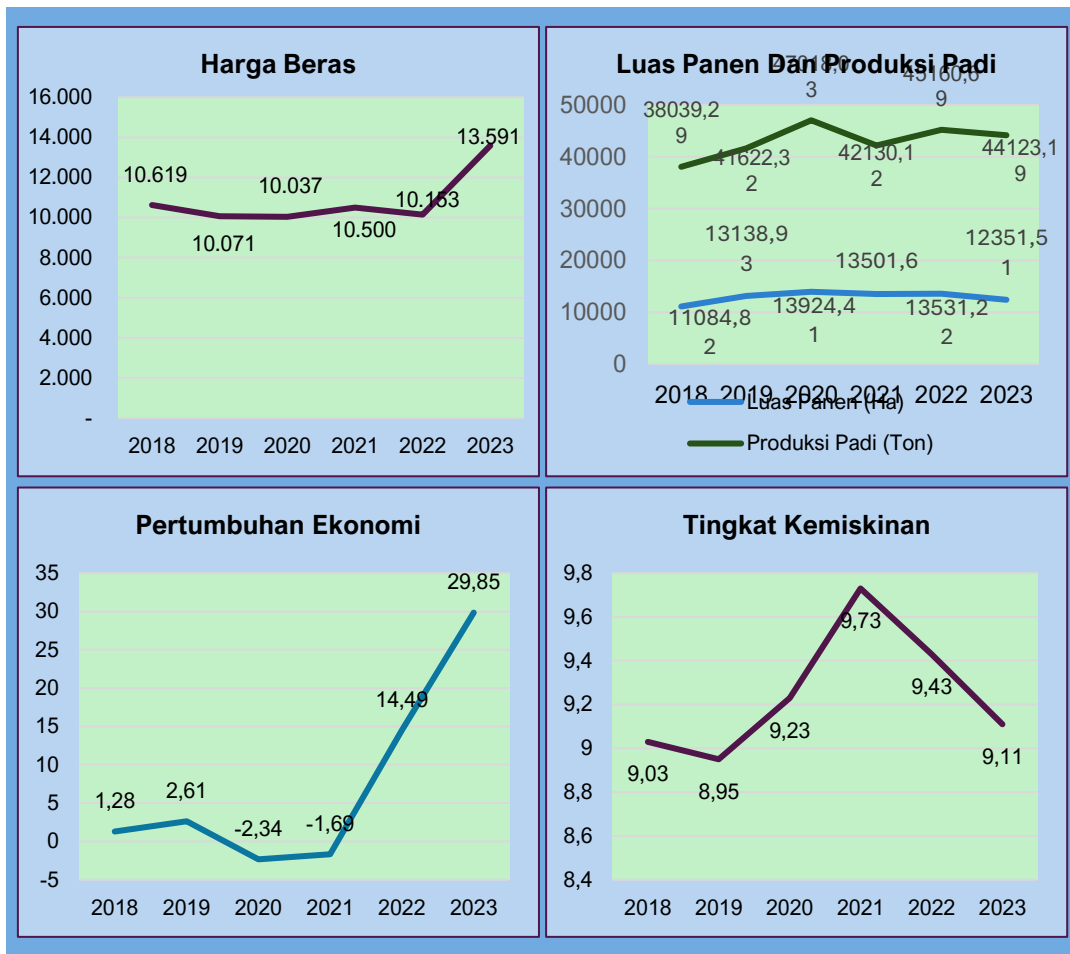


Gambar 3. 87 Analisis Efektivitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. PPU Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.7.5. Analisis Prioritas Bidang

Penurunan tingkat kemiskinan akan menjadi sulit jika harga beras dan harga kebutuhan pokok utama terus mengalami peningkatan. Harga beras akan mengalami peningkatan jika kuantitas kebutuhan akan beras tidak terpenuhi dan pasokan beras menjadi langka. Sehingga luas panen dan produksi padi harus diperhatikan guna meningkatkan produktivitas padi sehingga harga beras dapat stabil dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat membantu mengentaskan kemiskinan karena perputaran ekonomi yang ditunjang dengan pembangunan konstruksi yang akan menunjang infrastruktur dan penyerapan sumber daya manusia. Terlihat pada perbandingan Gambar 3.88 bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir yang sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kab. PPU.



Gambar 3. 19 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan Kab. PPU Tahun 2018 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.8. Capaian Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Daerah Kab. PPU telah merancang program-program penanggulangan kemiskinan untuk Tahun Anggaran 2023. Proses pelaksanaan program ini melibatkan berbagai OPD terkait. Setiap program yang dirancang akan diukur tingkat capaiannya dengan menggunakan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator sasaran penanggulangan kemiskinan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4.



Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Disdikpora	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18 Orang	39.600.000	81%	3 Kecamatan (Penajam, Sepaku dan Babulu)
Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah PPKS yang mendapat bantuan makanan	88 Orang	33.113.110	93%	4 Kecamatan (12 Kelurahan/ Desa)
Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan reunifikasi	67 Orang	56.116.825	91%	3 Kecamatan (Penajam, Waru dan Babulu)



OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5	153.351.935	101%	1. 5 LKSA pada : Kel. Gunung Seteleng; Kel. Nenang; Kel. Petung; Desa Girmukti; Desa Rawa Mulia 2. 52 Puskesmas pada 4 Kecamatan (52 Desa/Kelurahan kecuali nenang dan gunung intan)
Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Yang di Data	13114	56.351.195	92%	4 Kecamatan (54 Desa/ Kelurahan)



OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah Keluarga yang mendapat pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	4869	414.199.237	94%	4 Kecamatan
Dinas Sosial			Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah Masyarakat yang menerima bantuan PKH	4869	-		4 Kecamatan
Dinas Sosial			Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah Masyarakat yang menerima bantuan BPNT	8438	-		4 Kecamatan
Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	762	471.155.167	46%	4 Kecamatan
Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial kesejahteraan	314 KPM	755.969.230	98%	Desa babulu laut 202 unit; Desa labangka barat 90 unit; Kelurahan nenang 22 unit



OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				keluarga kewenangan Kabupaten/Kota				
Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatkan Pendapatan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Keluarga			Kec. Penajam (Penajam, Gn. Seteleng, Nenang, Nipah-Nipah, Riko) Kec. Waru (Waru, Sesulu) Kec. Babulu (Gn. Mulia)
Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah Penerima Beasiswa Program 1000 Sarjana	198 Orang	1.626.500.000	78%	Kabupaten Penajam Paser Utara
Dinas Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah Balita penderita Gizi Buruk/ Desa Rawan Pangan yang Tertangani	178 Balita	60.681.329	96%	Tersebar di 10 Wilayah kerja puskesmas mencakup 3 Kecamatan dan 31 Desa/Kelurahan : Kec. Sepaku 62



OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Balita Kec. Babulu 21 Balita Kec. Penajam 17 Balita
Dinas Ketahanan Pangan		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah KPM Rawan Pangan yang Tertangani	Tahap 1 : 10951 KPM/328,5 30 Kg Tahap 2 : 10.301 KPM / 103.010 kg			54 desa/keluarahan yang tersebar di 4 Kecamatan
Dinas Ketahanan Pangan		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah KPM Rawan Pangan yang Tertangani	989 KK/ 24.725Kg			Kec. Sepaku Kec. Babulu Kec. Penajam Kec. Waru
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunkan Beban Pengeluaran	Jumlah Orang yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	Pembayaran luran BPJS PBI APBD sampai Desember 2023 bagi 77.200 Jiwa	35.172.480.000	100%	Kec. Sepaku Kec. Babulu Kec. Penajam Kec. Waru



OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Kesehatan			Menurunkan Beban Pengeluaran		Pembayaran luran BPJS PBI s/d Desember bagi 42.806 Jiwa			Kec. Sepaku Kec. Babulu Kec. Penajam Kec Waru
Dinas PUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	16 Rumah Tangga	191.505.350	96%	Kelurahan Penajam 13 unit dan kelurahan Waru 1 unit
Dinas PUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	- Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun - Presentase Jumlah Penduduk yang terlayani air bersih	10 Liter/Detik	7.788.533.979	97%	Kecamatan Sepaku dan Kawasan Pantai Tanjung Jumalai
Dinas PUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Jumlah titik perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	9 titik	177.341.475	51%	Kecamatan Penajam



OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota						
Dinas PUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	6 Unit	4.687.914.198	100%	Seluruh WTP yang dikelola oleh PDAM
Dinas UMKM Perindag	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Jumlah UMK yang mendapat fasilitasi bantuan pengembangan usaha	Pemberian alat Pengolah Tempurung Kelapa (Mesin Pembuat Kancing)	82.830.825	83%	Kelurahan Kampung Baru
Dinas Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Meningkatkan Pendapatan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	17 Kelompok (15 kelompok pada kec	299.826.800	100%	Kec waru, babulu, penajam dan 2 kelompok di desa sesulu



OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	waru, babulu, penajam dan 2 kelompok di desa sesulu)			
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	22 Unit	731.139.600	98%	Desa Sesulu, Kelurahan Waru, Kelurahan Penajam, Kelurahan Sungai Parit, Kelurahan Gunung Seteleng, Desa Babulu Laut, Desa Gunung Intan, Kelurahan Petung
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman			Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan					Kelurahan Buluminung Kelurahan Lawe-Lawe Kelurahan



OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dan Pertanahan								Pemaluan Kelurahan Girimukti
SNVT Penyediaan Perumahan Kalimantan Timur		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan		160 Unit	-	100%	Kelurahan Sotek, Kelurahan Gunung Seteleng, Desa Binuang, Kelurahan Maridan, Desa Babulu Darat, Desa Gunung Mulia, Desa Rawa Mulia, Desa Sesulu, Desa Sebakung Jaya
DPUPR Bid. PERKIM Prov. Kaltim		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan		275 Unit	-	100%	Kelurahan Sepan, Kelurahan Sotek, Kelurahan Buluminung, Kelurahan Kampung Baru,



OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kelurahan Lawe-lawe, Kelurahan Nipah-Nipah, Kelurahan Sesulu, Kelurahan Tanjung Tengah Desa Girimukti, Kelurahan Pejala
Dinas Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Menurunkan Beban Pengeluaran	Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	7.995 Orang Pekerja Rentan	553.222.555	100%	Kab. Penajam Paser Utara (Semua Kecamatan/ Kelurahan/Desa)
Dinas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	Jumlah Calon Tenaga Kerja mendapat pelatihan kompetensi	99 Orang	650.390.583	84%	Kab. Penajam Paser Utara (Semua Kecamatan/



OPD Pelaksana	Program	Kegiatan	Tujuan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Tw IV			Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)
					Kinerja	Rp	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produktivitas Tenaga Kerja							Kelurahan/Desa)
Dinas Tenaga Kerja			Meningkatkan Pendapatan	Jumlah Calon Tenaga Kerja mendapat pelatihan kompetensi	18 Orang		100%	Kab. Penajam Paser Utara (Semua Kecamatan/ Kelurahan/Desa)

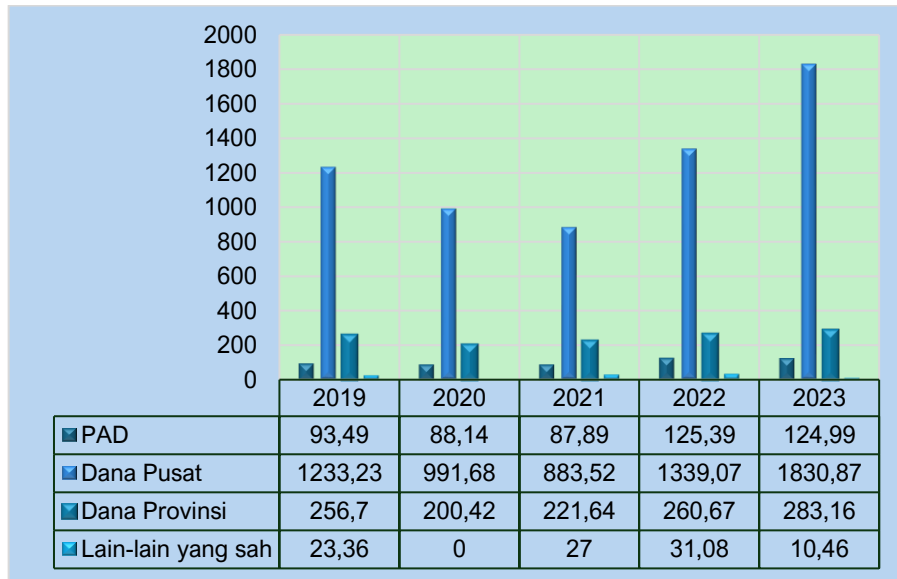


3.9. Tinjauan Anggaran Belanja Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Tinjauan anggaran penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk menganalisis alokasi dan pengelolaan anggaran belanja dalam berbagai sektor yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada perkembangan penerimaan daerah, belanja sectoral dan analisis efektivitas anggaran tersebut terhadap Tingkat kemiskinan.

3.9.1. Komposisi Pendapatan dan Belanja Daerah

Gambar 3.89 memperlihatkan komposisi penerimaan daerah Kab. PPU tahun 2019-2023. Perkembangan APBD Kab PPU mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021 dan kemudian meningkat pada tahun 2022 dan tahun 2023. Tahun 2023 Nilai Penerimaan Kab PPU adalah sebesar Rp 2.249,48 Milyar. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp 124,99 Milyar (5,56%), Transfer Pusat Rp1.830,87 Milyar (81%), Transfer provinsi sebesar Rp 283,16 Milyar (12,59%) dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 10,46 Milyar (0,46%). Data tersebut menunjukkan bahwa Kab. PPU masih sangat menggantungkan pendapatannya dari transfer pemerintah pusat dan provinsi. Peran pendapatan asli daerah dalam pembangunan Kab PPU masih belum signifikan, hanya berkisar 5,56%.

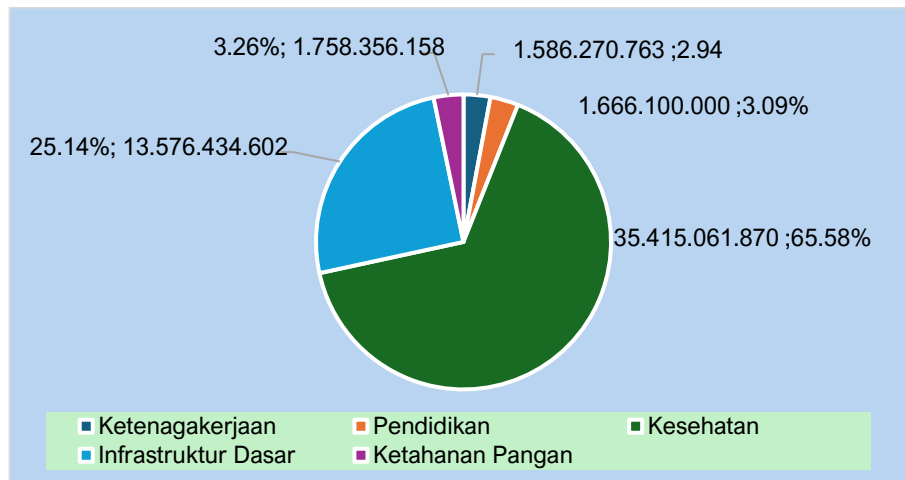


Gambar 3. 89 Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah Kab. PPU Tahun 2019 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.9.2. Komposisi Belanja Daerah

Gambar 3.90 menunjukkan distribusi belanja penanggulangan kemiskinan kab PPU pada tiap sektor. Selama tahun 2023 alokasi anggaran terbesar di sektor kesehatan yaitu sebesar Rp 35.415.061.860 yaitu sebesar 65,58%. Anggaran infrastruktur dasar sebesar 25,14%. Sedangkan anggaran pendidikan, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan berkisar 3%. Minimnya anggaran sektor pendidikan, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan masih perlu mendapat perhatian dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kab. PPU.

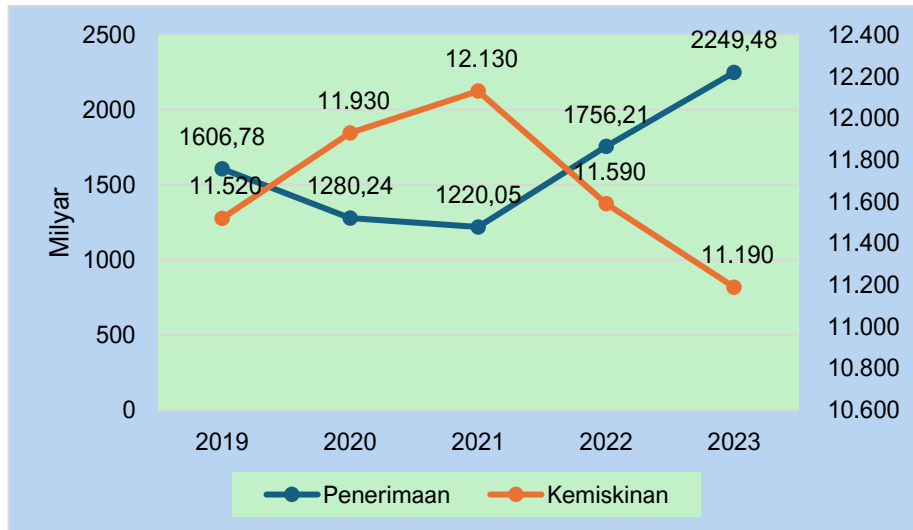


Gambar 3. 90 Distribusi Belanja Kab. PPU dalam Program Kemiskinan Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.10. Efektivitas Perkembangan APBD Kab PPU

Salah satu indikator untuk menganalisis efektivitas penanggulangan kemiskinan adalah dengan melihat efektivitas perkembangan APBD dengan Tingkat kemiskinan. Gambar 3.91 menunjukkan grafik pola perkembangan penerimaan dan tingkat kemiskinan di Kab PPU. Perkembangan Penerimaan Kab. PPU dari tahun 2019 mengalami fluktuatif, terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021 dan meningkat Kembali sampai tahun 2023. Pola perkembangan kurva tingkat kemiskinan mengalami kenaikan seiring penurunan penerimaan daerah. Sebaliknya, pola perkembangan kemiskinan mengalami penurunan seiring peningkatan penerimaan Kab PPU. Hal ini mengindikasikan perkembangan APBD cukup signifikan dalam mendukung tujuan pembangunan, khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan.



Gambar 3. 91 Efektivitas Perkembangan APBD terhadap Tingkat Kemiskinan Kab. PPU Tahun 2019 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab PPU, 2024.

3.11. Anggaran Belanja Bidang Kemiskinan

3.11.1. Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan

Rincian anggaran belanja sektor ketenagakerjaan bersumber dari data realisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. PPU Tahun Anggaran 2023. Adapun sumber pembiayaan dan total anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan Kab. PPU Tahun 2023

Sumber Pembiayaan		Total (Rp)	Persentase (%)
1	APBD	1.586.270.763	
Total Sektor		1.586.270.763	0,071
Total APBD		2.249.480.000.000	100

Sumber: Data diolah, 2024.

Seluruh sumber pembiayaan sektor ketenagakerjaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab PPU sebesar Rp 1.586.270.763 yang merupakan 0,071% dari total APBD Kab. PPU. Anggaran ini digunakan untuk membiayai **lima jenis program** tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.



Program pertama yaitu Perencanaan dan Pembangunan Industri yang dilaksanakan oleh Dinas UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. PPU. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok UMK Sentra (25 Pelaku Usaha) di Kelurahan Kampung Baru. Durasi pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 3 bulan dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah berupa 2 unit mesin pembuat kancing dan pelatihan bagi kelompok tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu saat ini masih dalam tahap pengadaan alat/mesin pembuat kancing.

Program kedua yaitu Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kab. PPU. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan pengembangan usaha industri rumahan bidang perikanan untuk Poklahsar di Kecamatan Waru, Babulu, Penajam dan 2 kelompok di Desa Sesulu. Kegiatan ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret 2023 untuk 15 kelompok dan tahap kedua pada bulan Juni 2023 untuk 2 kelompok dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah berupa peralatan alat pengolahan.

Program ketiga yaitu Hubungan Industrial yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. PPU. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan iuran BPJS ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan (kategori bukan penerima upah) dengan kategori miskin di Kab. PPU. Durasi pelaksanaan kegiatan adalah selama 10 bulan dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah berupa biaya iuran sebesar Rp16.800/orang/bulan. Adapun rincian jumlah penerima bantuan berdasarkan data P3KE dan usulan dari kelurahan/desa adalah sebagai berikut: 1) Kecamatan Babulu sebanyak 1.958 orang; 2) Kecamatan Penajam sebanyak 3.750 orang; 3) Kecamatan Waru sebanyak 759 orang; dan 4) Kecamatan Sepaku sebanyak 1.528 orang.



Program keempat yaitu Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. PPU. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan. Pertama, kegiatan pelatihan kompetensi sertifikasi yang ditujukan untuk masyarakat pencari kerja, diutamakan kategori miskin. Pelatihan ini terdiri atas: 1) Pelatihan Operator Welder di BPVP Samarinda sebanyak 8 orang (menggunakan data P3KE-Desil 1); 2) Pelatihan Operator Excavator di BPVP Samarinda sebanyak 8 orang (menggunakan data P3KE-Desil 1 sebanyak 3 orang dan data DTKS sebanyak 5 Orang); 3) Pelatihan Operator Forkclip di BLKI Balikpapan sebanyak 16 Orang (menggunakan data P3KE-Desil 1 sebanyak 7 orang dan data DTKS sebanyak 9 Orang). Durasi pelaksanaan kegiatan adalah selama enam minggu dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah berupa biaya kontribusi pelatihan serta uang saku dan biaya transportasi. Adapun kendala pelaksanaan yang dihadapi adalah capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 84% dikarenakan sebagian kegiatan pelatihan dilakukan dengan mekanisme *sharing-cost* biaya pelatihan dengan Balai Latihan Kerja. Kedua, kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang ditujukan untuk masyarakat pencari kerja. Pelatihan dan sertifikasi ini terdiri atas: 1) PPSDM Migas Cepu (Pelatihan Operator Pesawat Angkat, Angkut dan Juru Ikat Beban Unit Forklift sebanyak 1 Orang dan Pelatihan *Scaffolding* Level Operator sebanyak 1 Orang); dan 2) BPVP Serang (Pelatihan Operator Listrik Industri sebanyak 8 Orang dan Pelatihan Plate Welder GMAW 3G-UP PF sebanyak 8 Orang). Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah berupa biaya kontribusi pelatihan serta uang saku dan biaya transportasi.

3.11.2. Anggaran Belanja Sektor Pendidikan

Rincian anggaran belanja sektor pendidikan bersumber dari data realisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. PPU Tahun Anggaran



2023. Adapun sumber pembiayaan dan total anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Kab. PPU Tahun 2023

Sumber Pembiayaan		Total (Rp)	Persentase (%)
1	APBD	1.666.100.000	
Total Sektor		1.666.100.000	0,074
Total APBD		2.249.480.000.000	100

Sumber: Data diolah, 2024.

Seluruh sumber pembiayaan sektor pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. PPU sebesar Rp1.666.100.000 yang merupakan 0,074% dari total APBD Kab. PPU. Sektor pendidikan memiliki 2 (dua) program yang dilakukan oleh 2 (dua) OPD pelaksana. Program sektor Pendidikan yang pertama yaitu program pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Disdikpora di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Penajam, Sepaku, dan Babulu dengan sasaran penerima manfaat berupa peserta didik PKBM yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera) pada Dinas Sosial. Selanjutnya program sektor Pendidikan yang kedua yaitu program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan sasaran penerima manfaat berupa mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdata dalam DTKS. Terdapat kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya terdapat double penerima dengan beasiswa Provinsi.

3.11.3. Anggaran Belanja Sektor Kesehatan

Rincian anggaran belanja sektor kesehatan bersumber dari data realisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. PPU Tahun Anggaran 2023. Adapun sumber pembiayaan dan total anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7.



Tabel 3.7 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Kab. PPU Tahun 2023

Sumber Pembiayaan		Total (Rp)	Persentase (%)
1	APBD	35.415.061.870	
Total Sektor		35.415.061.870	1,574
Total APBD		2.249.480.000.000	100

Sumber: Data diolah, 2024.

Seluruh sumber pembiayaan sektor kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp35.451.061.870 yang merupakan 1,574% dari total APBD Kab. PPU. Pada sektor kesehatan, terdapat 3 (tiga) program yang dilakukan oleh 2 (dua) OPD pelaksana yaitu Dinas Sosial sebanyak 2 (dua) program dan Dinas Kesehatan sebanyak 1 (satu) program.

Dalam Sektor kesehatan, Dinas Sosial melakukan 2 (dua) program kesehatan. Program pertama yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu program rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi sosial dilaksanakan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Program rehabilitasi sosia yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial ini memiliki sasaran penerima manfaat berupa balita kurang gizi dan orang terlantar yang berasal dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara. Kendala dalam pelaksanaan program ini adalah perubahan nilai dan kualitas gizi penerima manfaat saat penghimpunan data untuk penyaluran yang memerlukan verifikasi dan validasi. Selanjutnya program kedua yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu program pemberdayaan sosial yang dilakukan pada 5 LKSA dan 52 PUSKESOS pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dinas Kesehatan dalam sektor kesehatan melakukan program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penerima manfaat dalam program ini yaitu masyarakat dengan bantuan berupa dibayarkannya iuran (PBI) BPJS Kelas



3 masing-masing individu. Program ini menemui kendala berupa penambahan peserta BPJS Pemda di 3 bulan terakhir yang cukup besar.

3.11.4. Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar

Rincian anggaran belanja sektor infrastruktur dasar bersumber dari data realisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. PPU Tahun Anggaran 2023. Adapun sumber pembiayaan dan total anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar Kab. PPU 2023

Sumber Pembiayaan		Total	Persentase (%)
1	APBD	13.576.434.602	
Total Sektor		13.576.434.602	0,604
Total APBD		2.249.480.000.000	100

Sumber: Data diolah, 2024.

Seluruh sumber pembiayaan sektor infrastruktur dasar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp13.576.434.602 yang merupakan 0,604% dari total APBD Kab. PPU. Anggaran ini digunakan untuk membiayai enam jenis program tahun 2023 yang bertujuan untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Program pertama yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. PPU. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberian Bantuan Sarana Air Bersih (Tandon). Sasaran manfaat program ini adalah 314 keluarga miskin, dengan rincian lokasi dan jumlah bantuan sebagai berikut: 1) Desa Babulu Laut sebanyak 202 unit; 2) Desa Labangka barat sebanyak 90 unit; dan 3) Kelurahan Nenang sebanyak 22 unit. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah berupa 1 buah tandon untuk satu keluarga.

Program kedua yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang (PUPR) Kab. PPU. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan bantuan pengadaan kloset untuk mendukung bantuan *septic tank* dan pipa pada kegiatan DAK 2022. Sasaran manfaat program ini adalah masyarakat miskin dan terdapat anggota keluarga yang terindikasi stunting, dengan rincian lokasi dan jumlah bantuan sebagai berikut: 1) Kelurahan Penajam sebanyak 13 unit; dan 2) Kelurahan Waru sebanyak 1 unit. Durasi pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 3 bulan dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah fasilitas akses sanitasi layak. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu perbedaan data di lapangan dengan data P3KE.

Program ketiga yaitu Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kab. PPU. Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan. Pertama, kegiatan pembangunan jaringan pipa air minum. Sasaran manfaat program ini adalah masyarakat wilayah sekitar Kecamatan Sepaku dan Kawasan Pantai Tanjung Julmai. Durasi pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 4 bulan dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah berupa terpasangnya jaringan perpipaan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu dalam hal keperluan ijin penempatan pipa dari BPJN Kaltim. Kedua, kegiatan perbaikan SPAM jaringan perpipaan yang dioptimalisasi. Sasaran manfaat program ini adalah masyarakat wilayah sekitar Kecamatan Penajam. Durasi pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 12 bulan dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah adanya perbaikan jaringan perpipaan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu terkait ijin balai sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Ketiga, kegiatan pengadaan *water meter* 1/2 Inch untuk Perumda Air Minum Danum Taka PPU dan PDAM Unit Babulu, Waru dan Sotek. Sasaran manfaat program ini adalah masyarakat wilayah sekitar seluruh WTP yang dikelola oleh PDAM. Kegiatan ini



dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah terlaksananya perbaikan kualitas produksi air minum. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu dalam hal proses produksi sebanyak 2,810 Unit dan kurangnya gudang penyimpanan.

Program keempat yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. PPU. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. Sasaran manfaat program ini adalah Masyarakat Miskin (9 rang penerima terdata pada P3KE) yang berlokasi di Desa Sesulu, Kelurahan Waru, Kelurahan Penajam, Kelurahan Sungai Parit, Kelurahan Gunung Seteleng, Desa Babulu Laut, Desa Gunung Intan dan Kelurahan Petung. Durasi pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 3 bulan dengan besaran manfaat yang diberikan untuk setiap penerima bantuan adalah perbaikan rumah senilai Rp 25.000.000. Selain kegiatan yang dibiayai oleh APBD, terdapat tiga kegiatan penanggulangan kemiskinan di sektor infrastruktur dasar yang dibiayai dari sumber dana lainnya.

Pertama, kegiatan yang sumber dananya dari CSR Pertamina yaitu pembangunan rumah baru layak huni. Sasaran manfaat program ini adalah masyarakat miskin (3 orang penerima terdata pada P3KE) yang berlokasi di Kelurahan Buluminung, Kelurahan Lawe-Lawe, Kelurahan Pemaluan, dan Kelurahan Girmukti. Besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah masing-masing KPM dibangun 1 Buah Rumah. Kedua, kegiatan yang sumber dananya dari APBN dan termasuk dalam program Pemerintah Pusat yaitu perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. Sasaran manfaat program ini adalah masyarakat miskin (26 orang penerima terdata pada P3KE) yang berlokasi di Kelurahan Sotek, Kelurahan Gunung Seteleng, Desa Binuang, Kelurahan Maridan, Desa Babulu Darat, Desa Gunung Mulia, Desa Rawa Mulia, Desa Sesulu dan



Desa Sebakung Jaya. Besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah berupa perbaikan rumah senilai Rp 20.000.000. Ketiga, kegiatan yang sumber dananya dari APBD Provinsi Kalimantan Timur yaitu perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. Sasaran manfaat program ini adalah masyarakat miskin (78 orang penerima terdata pada P3KE) yang berlokasi di Kelurahan Sepan, Kelurahan Sotek, Kelurahan Buluminung, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Lawe-lawe, Kelurahan Nipah-Nipah, Kelurahan Sesulu, Kelurahan Tanjung Tengah, Desa Girimukti dan Kelurahan Pejala. Besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan adalah berupa perbaikan rumah senilai Rp 25.000.000.

3.11.5. Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan

Rincian anggaran belanja sektor ketahanan pangan bersumber dari data realisasi program penanggulangan kemiskinan Kab. PPU Tahun Anggaran 2023. Adapun sumber pembiayaan dan total anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan Kab. PPU Tahun 2023

Sumber Pembiayaan		Total	Persentase (%)
1	APBD	1.758.356.158	
Total Sektor		1.758.356.158	0,078
Total APBD		2.249.480.000.000	100

Sumber: Data diolah, 2024.

Seluruh sumber pembiayaan sektor ketahanan pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp1.758.356.158 yang merupakan 0,078% dari total APBD Kab. PPU. Anggaran ini digunakan untuk membiayai tiga jenis program dengan rincian sembilan kegiatan pada tahun 2023.

Program pertama yaitu perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kab. PPU. Program ini dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota dengan tiga sub kegiatan. Sub kegiatan pertama yaitu pendataan fakir miskin



cakupan daerah kab/kota dilaksanakan di 54 Desa/Kelurahan dari 4 kecamatan. Sub kegiatan kedua yaitu pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota dilaksanakan di 4 kecamatan. Sub kegiatan ketiga yaitu fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan di 4 kecamatan selama 3 bulan. Sub kegiatan terakhir ini memberikan besaran manfaat sebesar Rp 150.000 per individu kategori miskin ekstrem.

Program kedua yaitu pemberdayaan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. PPU. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabu/kota dengan sasaran penerima manfaat yaitu wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). Durasi pelaksanaan kegiatan adalah selama 1 kali di di Kec. Penajam (Penajam, Gn. Seteleng, Nenang, Nipah-Nipah, Riko) Kec. Waru (Waru, Sesulu) Kec. Babulu (Gn. Mulia). Besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan sebesar Rp 3.000.000 per orang.

Program ketiga yaitu Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. PPU. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota. Sasaran penerima manfaat adalah 178 Balita Gizi Kurang/Buruk dengan rincian: Kec. Sepaku 62 Balita, Kec. Babulu 21 Balita, Kec. Penajam 17 Balita dengan besaran manfaat yang diberikan untuk penerima bantuan berupa beras 6,5 kg, gula 1,5 kg, kacang hijau 1,8 kg, kacang merah 1,75 kg, mentega 1,8 kg, minyak goreng 1,5 liter, telur ayam 2 piring dan tepung terigu 1,5 kg setiap balita. Kegiatan merata dan tersebar di 10 Wilayah kerja puskesmas mencakup 3 Kecamatan dan 31 Desa/Kelurahan: Kec. Sepaku 62 Balita, Kec. Babulu 21 Balita Kec. Penajam 17 Balita.



BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara membutuhkan percepatan karena kemiskinan masih cukup tinggi baik dari persentase maupun jumlahnya (absolut) serta laju penurunan yang lambat. Percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis dalam konteks kondisi umum daerah, termasuk kondisi makro ekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran), serta secara khusus mempertajam analisis kondisi kemiskinan dalam dimensi konsumsi maupun non konsumsi (multi dimensi). Isu strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga dirumuskan berdasarkan prioritas pembangunan nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Secara nasional, dalam RPJMN 2020-2024 terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini dikembangkan pemerintah dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus



bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi kebijakan untuk menurunkan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara tepat sasaran melalui:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat (misalnya: melalui bantuan sembako, *cash transfer*, dll);
- b. peningkatan pendapatan masyarakat miskin (misalnya: melalui pelatihan, bantuan alat ekonomi produktif, dll); dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (misalnya melalui perbaikan akses jalan, bedah rumah, perbaikan sanitasi, dll).

Selanjutnya, strategi penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 53/2020 Pasal 17 bahwa strategi dilakukan dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini lebih jelas dijelaskan pada Pasal 18 bahwa program terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas



kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan

- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Konteks penajaman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mempertimbangkan sebaran penduduk miskin ekstrem yang masih didominasi oleh penduduk miskin dan karakteristik kemiskinan dengan kelompok sasaran pengangguran, tenaga kerja buruh, dan pekerja serabutan. Tiga karakteristik kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga sektor informal kabupaten dan rumah tangga buruh kabupaten; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Isu-isu strategis kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara merepresentasikan kondisi akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi isu-isu tersebut penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara hendaknya diprioritaskan pada upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui peningkatan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), menciptakan peluang usaha



baru untuk mengurangi pengangguran, perbaikan prasarana dasar (jalan, kawasan kumuh, air minum dan sanitasi layak), serta menjamin kecukupan dan ketersediaan pangan. Secara rinci strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin utamanya pada kelompok petani, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses mutu layanan kesehatan yang merata serta penurunan angka kematian, kesakitan, *stunting*, dan kecacatan, serta peningkatan prasarana dasar (jalan, kawasan kumuh, dan air minum dan sanitasi layak).
2. Penguatan *sustainable livelihood* dalam kerangka mengurangi pengangguran dan menjaga kelompok rentan dari kehilangan pekerjaan melalui peningkatan kondisi yang baik (*enabling environment*) bagi masuknya investasi baru, pengembangan wirausaha baru melalui pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis sumber daya lokal dengan mempertimbangkan sasaran pemuda, perempuan dan kelompok rentan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, industri kreatif dan usaha kecil termasuk peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rumah tangga (ekonomi rumah tangga); serta peningkatan peran dan produktivitas UMKM.
3. Peningkatan ketersediaan dan kecukupan pangan melalui peningkatan produksi dan menjaga stabilitas harga, serta stimulan lumbung pangan bergizi pada daerah rawan pangan gizi dan pemberian bantuan sumber pangan lainnya.
4. Penguatan tata kelola dan koordinasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data penanggulangan kemiskinan, perbaikan program bantuan sosial berbasis individu dan rumah tangga serta program penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, contohnya Program



Pasar Malam untuk menggerakkan sektor UMKM masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Program sentra UMKM yang didukung pendampingan secara terpadu dan tersedianya mekanisme pemberdayaan terpadu masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya. Lebih lanjut, untuk mencapai terwujudnya hak-hak dasar, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan pada satu sektor saja, namun harus dilaksanakan pada berbagai sektor dan dalam rangka meningkatkan efektivitas program yang dilaksanakan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Tabel 4. 1. Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat miskin	Meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin	Fasilitasi jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, ibu hamil, dan balita Jaminan Kesehatan (PBI)
	Meningkatkan layanan Pendidikan dasar dan menengah bagi keluarga miskin	Fasilitasi pendidikan bagi siswa miskin
	Meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga miskin	Fasilitasi bantuan sarana prasarana perumahan
	Meningkatkan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan orang berkebutuhan khusus	Peningkatan pembinaan penyandang masalah sosial
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin	Meningkatkan kesempatan berusaha	Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan
		Peningkatan keterampilan dan dukungan sarana-prasarana termasuk pelatihan bersertifikat
		Fasilitasi sarana prasarana usaha ekonomi
		Jaminan Kesejahteraan Ketenagakerjaan pegawai informal/buruh
Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat miskin	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan masyarakat

Sumber: Data diolah, 2023.



Tabel 4.1 menunjukkan sasaran, strategi, dan arah kebijakan peanggulangan kemiskinan di Kab PPU. Sasaran penanggulangan kemiskinan terkait dengan meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat miskin, meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin, dan meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat miskin. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara memerlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
2. Meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah bagi keluarga miskin termasuk pemberian pelatihan ketrampilan (skills) bersertifikat.
3. Meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga miskin.
4. Meningkatkan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan orang berkebutuhan khusus.
5. Meningkatkan kesempatan berusaha.
6. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan pangan.
7. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
8. Meningkatkan kemampuan kelembagaan.

4.3 Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

4.3.1 Program Pengurangan Beban Pengeluaran Rakyat

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:

1. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
2. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa



(BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler.

3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

4.3.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
3. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

4.3.3 Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
2. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.



4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam pelaksanaannya program penanggulangan kemiskinan yang difasilitasi oleh pemerintah adakalanya dirasakan kurang memuaskan, ada keluhan terkait dengan perilaku, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yang dilakukan pegawai pemerintah, atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengembangkan dan mengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).



BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan didasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dirumuskan oleh perangkat daerah pelaksana program. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara fokus intervensi pada:

5.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Rakyat

Program pengurangan beban pengeluaran rakyat berfokus pada intervensi:

1. Program pengelolaan pendidikan dengan fokus intervensi pemberian akses pendidikan lanjutan bagi siswa putus sekolah/tidak melanjutkan sekolah dengan subsidi peserta Kejar Paket A/B/C melalui Pemberian subsidi peserta Kejar Paket A/B/C.
2. Program Rehabilitasi Sosial dengan fokus intervensi :
 - a. Penanganan kedaruratan khusus PPKS (orang terlantar/anak terlantar/disabilitas terlantar/lansia terlantar/ODGJ/Gelandangan Pengemis, termasuk penderita stunting/gizi buruk pada keluarga miskin) melalui Bantuan permakanan bagi PPKS (termasuk penderita busung lapar/gizi buruk, dll).
 - b. Penanganan kedaruratan khusus PPKS (orang terlantar/anak terlantar/disabilitas terlantar/lansia terlantar/ODGJ/Gelandangan Pengemis, termasuk penderita stunting/gizi buruk pada keluarga miskin) melalui fasilitasi pengantaran/ pengembalian orang terlantar ke keluarga.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan fokus intervensi:
 - a. Pendataan bagi warga miskin yang layak melalui Pengelolaan Data warga miskin yang layak.



- b. Proses verifikasi dan validasi warga miskin yang telah terdata dalam rangka memperoleh bantuan sosial melalui proses verifikasi dan validasi warga miskin yang telah terdata dalam rangka memperoleh bantuan sosial (PBI PBJS Pusat dan PKH).
- c. Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penduduk kategori miskin ekstrem Rp 150.000/bulan.
4. Program Penanganan Bencana melalui pemberian bantuan bagi korban bencana.
5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan fokus intervensi pemenuhan hak dasar pendidikan bagi warga miskin melalui bantuan bagi masyarakat terdampak kasus kerawanan pangan.
6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan fokus intervensi pemenuhan hak dasar (pangan) bagi warga dengan risiko kerawanan pangan melalui Bantuan Beras bagi masyarakat melalui penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Daerah.
7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan fokus intervensi pemenuhan hak dasar (kesehatan) bagi masyarakat melalui Program Bantuan luran (PBI) BPJS Pemerintah Daerah.
8. Program Hubungan Industrial dengan fokus intervensi pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui Program Bantuan luran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.



5.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Program peningkatan pendapatan masyarakat berfokus pada intervensi:

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan fokus intervensi Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui bantuan untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), KUBE dan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan fokus intervensi pemberian fasilitasi ke UMK untuk akses bantuan pemodal dan pemasaran melalui pengadaan mesin sealer atau mesin produksi pangan serta pelatihannya bagi kelompok UMK di sentra UMK binaan.
3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan fokus intervensi Bantuan pengembangan usaha bagi petani/nelayan kecil melalui bantuan bagi pengembangan usaha industri rumahan bidang perikanan (peralatan atau penyediaan bahan industri rumahan bidang perikanan).
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan fokus intervensi Bantuan pengembangan usaha bagi petani melalui Bantuan bagi petani (pupuk, pestisida dan bibit tanaman).
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan fokus intervensi bantuan pengembangan usaha bagi petani untuk penanganan inflasi melalui bantuan bagi petani yang terdampak bencana pertanian hama penyakit, el nino dll (pupuk).
6. Bantuan bagi petani yang terdampak bencana pertanian hama penyakit, el nino dll (pupuk) dengan fokus intervensi bantuan pengembangan usaha bagi petani/nelayan kecil melalui Bantuan bagi pengembangan usaha industri rumahan bidang perikanan (peralatan atau penyediaan bahan industri rumahan bidang perikanan).



7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan fokus intervensi
 - a. Bantuan pengembangan usaha bagi petani melalui Bantuan bagi petani (pupuk, pestisida dan bibit tanaman).
 - b. Bantuan pengembangan usaha bagi peternak melalui Bantuan ternak sapi pada Poktan Sri Dewi di Desa (Sapi Bali Pejantan 2 Ekor dan Betina calon induk 15 Ekor).
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan fokus intervensi Bantuan pengembangan usaha bagi petani untuk penanganan inflasi melalui bantuan bagi petani yang terdampak bencana pertanian hama penyakit, el nino dll (pupuk dll).
9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan fokus intervensi bantuan pelatihan keterampilan calon tenaga kerja agar memiliki kompetensi untuk memasuki dunia kerja melalui Pelatihan Kompetensi Sertifikasi.

5.3. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

Program penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan berfokus pada intervensi:

1. Program pemberdayaan sosial dengan fokus intervensi pelayanan Kesejahteraan Sosial tingkat Kelurahan dan Desa dalam menangani masalah kesejahteraan sosial melalui Operasional Penyelenggaraan Puskesmas SLRT dan LKSA (Rekomendasi BPK).
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan fokus intervensi Bantuan sanitasi layak bagi warga miskin melalui Pengadaan kloset untuk mendukung bantuan *septic tank* dan pipa pada kegiatan DAK 2023.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan fokus intervensi Pemenuhan Sanitasi layak (Air Bersih) untuk Masyarakat melalui:
 - a. Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum



- b. Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi
- c. Program Kawasan Permukiman dengan fokus intervensi Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu target pembangunan yang membutuhkan dukungan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, program pembangunan yang dilaksanakan harus komprehensif dan seimbang antara pembangunan manusia dan sumber daya alam sebagai bagian dari indikator kemiskinan. Secara historis, prioritas pembangunan seringkali terfokus pada sumber daya manusia, sementara dukungan keberlanjutan sumber daya alam mendapat porsi yang tidak proporsional. Untuk itu, penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu target tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB (*sustainable development goals/SDGs*) memerlukan keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sumber daya alam.

Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang bersinergi secara efektif sehingga penanganannya dilakukan secara lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik. Kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikurangi atau dapat ditekan melalui stimulus pemberian program, baik program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sendiri. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang dalam dokumen Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam



Paser Utara 2024-2026. Hal ini dimaksudkan agar setiap sektor secara bersama-sama menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang berdampak pada alokasi anggaran yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pelaksanaan koordinasi strategis penanggulangan kemiskinan, dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain TKPK sebagai koordinator juga menjadi tim pengendali pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang bertugas melakukan monitoring dan penanganan pengaduan masyarakat serta melaksanakan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor policy*). Oleh karena itu kebijakan tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada kaum miskin (*pro-poor development*) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*).

Kebijakan dan program kerja dalam penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektor, dan kompleks yang diakibatkan oleh kemiskinan tersebut. Maka upaya penanggulangan kemiskinan akan terus diupayakan dan akan menjadi bagian dari pembangunan. Salah satu fungsi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan pemantauan penanggulangan kemiskinan oleh OPD terkait. Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan dapat diukur dengan melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, pengembangan diversifikasi usaha keluarga miskin, efektifitas program pengembangan ekonomi produktif, perluasan kesempatan kerja bagi warga miskin, serta pola pemanfaatan program pengentasan kemiskinan. Sehingga dapat disusun program strategis dan langkah-langkah pembinaan yang terpadu, berkesinambungan, dan



bersifat kontekstual. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah menyusun beberapa program-program inovasi dan program terapan turunan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam capaian pengkulangan kemiskinan telah berjalan cukup baik dan optimal walaupun masih membutuhkan peningkatan-peningkatan di semua bidang.

6.2. Rekomendasi

Rekomendasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam dapat dilakukan dengan:

- a. melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan perbaikan iklim investasi untuk memfasilitasi pembentukan modal, dan peningkatan nilai tambah serta penguatan potensi sektor pertanian dan pariwisata;
- b. melakukan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, melalui perluasan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan ke penduduk miskin, serta peningkatan kapasitas ekonomi produktif melalui program pembukaan akses pasar dan keuangan;
- c. menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan daerah dan harus dilakukan secara sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi dengan baik dibawah kendali TKPK Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada kebijakan publik yang mencakup 3 (tiga) unsur yaitu berpihak kepada orang miskin (*pro-poor policy*), yang diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada kaum miskin (*pro-poor development*) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor growth*);



- e. melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat;
- f. memacu dan meningkatkan kinerja bidang kesehatan dan pendidikan terutama anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan untuk kesehatan adalah penekanan pada kasus kematian bayi dan ibu meninggal pasca melahirkan; dan
- g. mengkoordinasikan peran TKPK Kabupaten Penajam Paser Utara dalam program-program penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan sejalan dengan optimalisasi tata kelola pemerintahan dan mencapai target penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Kabupaten Statistik Penajam Paser Utara. (2024). *Statistik Pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023*. <https://ppukab.bps.go.id/publication/2021/02/26/fff737be7fafb8cd1ef03fba/kabupaten-penajam-paser-utara-dalam-angka-2021.html>. Penajam.
- Badan Pusat Statistik Penajam Paser Utara. (2023). *Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2023*. Penajam.
- Badan Pusat Statistik Penajam Paser Utara. (2024). *Statistik Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara 2024*. Penajam.
- Lembaran Negara. 2007. Undang-Undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025. Jakarta.
- _____. 2003. Undang Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara; Jakarta.
- _____. 2014. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- _____. 2005. Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta.
- _____. 2007. Undang-Undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). Jakarta.
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967). Jakarta.
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). Jakarta.
- _____. 2011. Undang-Undang Nomor 13 tentang Penanganan Fakir Miskin. Jakarta.
- _____. 2023. Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Jakarta.



- _____. 2010. Peraturan Presiden Nomor 15 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- _____. 2017. Peraturan Presiden Nomor 59 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta.
- _____. 2010. Peraturan Presiden Nomor 15 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- _____. 2020. Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta.
- _____. 2011. Keputusan Presiden Nomor 10 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Jakarta.
- _____. 2022. Instruksi Presiden Nomor 4 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Jakarta.
- _____. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 T tentang tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Jakarta.
- _____. 2021. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Samarinda.
- _____. 2023. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026. Samarinda.
- _____. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1). Penajam.
- _____. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3). Penajam.
- _____. 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 02 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 2). Penajam.



- _____. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Penajam.
- _____. 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018–2023. Penajam.
- _____. 2023. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2024-2026. Penajam.
- _____. 2022. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor No 415/238/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 415.05/99/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022. Penajam.



PENAJAM PADER UTARA
SERAMBI
NUSANTARA

2024

